



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023-2042

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Peninjauan kembali merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW Provinsi dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, dinamika pembangunan, dan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Penyusunan RTRW Provinsi memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan Wilayah, kondisi fisik Wilayah yang rentan terhadap bencana, dan peran teknologi dalam memanfaatkan Ruang. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan Wilayah Provinsi juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan Pemanfaatan Ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut berupa peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan.

RTRW Provinsi memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan Wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk itu, penyusunan RTRW Provinsi ini berdasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi mencakup sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi mencakup Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya. RTRW Provinsi ini juga menetapkan arahan Pemanfaatan Ruang yang merupakan KKPR, indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, dan arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang terdiri atas indikasi arahan zonasi sistem Provinsi, arahan perizinan, penilaian pelaksanaan KKPR, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Ruang udara" adalah Wilayah kedaulatan udara di atas Wilayah daratan dan perairan Provinsi Kalimantan Timur.

Yang dimaksud dengan "Ruang di dalam bumi" adalah Wilayah dalam bumi dan/atau bawah permukaan tanah yang menjadi sumber daya tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

#### Ayat (2)

Luas Wilayah RTRW Provinsi berdasarkan perhitungan peta Wilayah administrasi dengan menggunakan sistem proyeksi *cylindrical equal area*. Peta tersebut bersumber dari:

- a. peta batas negara sebagaimana dimaksud dalam geoportal kebijakan satu peta;
- b. peta batas Wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam beberapa peraturan menteri dalam negeri tentang batas daerah;
- c. peta batas Wilayah administrasi kewenangan pengelolaan sumber daya Laut Provinsi sebagaimana dimaksud dalam rancangan peraturan menteri dalam negeri;
- d. peta batas kewenangan pengelolaan sumber daya Laut paling jauh 12 (dua belas) mil Laut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;
- e. peta batas Wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam berita acara kesepakatan; dan
- f. peta Garis Pantai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 26.4 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Dasar Edisi Tahun 1990-2020.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "nama Pulau Kecil" adalah data pulau per Kabupaten/Kota per Provinsi seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi:

- a. mendukung tujuan Penataan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana rincinya melalui keterpaduan antarsektor, antarwilayah, dan Masyarakat;
- b. mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Yang dimaksud dengan "maju" adalah menjadi lebih baik, berkembang, dan/atau mencapai Masyarakat yang adil dan sejahtera.

Yang dimaksud dengan "aman" adalah situasi Masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah keadaan Masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan "lestari" adalah penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi Masyarakat. Lingkup pembangunan Industri Hijau meliputi standardisasi Industri Hijau dan pemberian fasilitas untuk Industri Hijau. Strategi pengembangan Industri Hijau akan dilakukan yaitu:

- a. mengembangkan industri yang sudah ada menuju Industri Hijau; dan
- b. membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip Industri Hijau.

## Pasal 6

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan prasarana Wilayah” adalah satu kesatuan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya yang layak, sehat, aman, dan nyaman, serta saling menghubungkan dan berada dalam pengaruh pelayanan dalam satu hubungan hierarki.

### Huruf d

Kawasan berfungsi lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan Wilayah yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan berfungsi konservasi” adalah kawasan dengan pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Kawasan berfungsi konservasi di Wilayah darat merupakan hutan konservasi.

Yang dimaksud dengan “hutan konservasi” adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Yang dimaksud dengan “kawasan berfungsi konservasi di Perairan Pesisir” adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Huruf f

Kebijakan pengembangan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau bagi kesejahteraan Masyarakat merupakan keselarasan dan keterpaduan kegiatan antarsektor dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2039.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan” adalah lahan dan kawasan pertanian pangan yang dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi secara berkelanjutan. Perencanaan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan pada:

- a. KP2B;
- b. LP2B; dan
- c. LCP2B.

Kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan Masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “potensi lestari” adalah kelestarian potensi sumber daya ikan agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangannya.

Yang dimaksud dengan “ekonomi biru” adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi Laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan Masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “ekosistem sekitarnya” adalah lingkungan alam dan lingkungan buatan yang berada di sekitar kawasan pertambangan.

#### Huruf j

Cukup jelas.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “mitigasi bencana” adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana bagi Masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

Mitigasi bencana termasuk mitigasi perubahan iklim.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “permukiman berbasis air” adalah perumahan dan permukiman yang berada pada tepi badan air di antaranya sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya yang diselenggarakan berdasarkan kearifan lokal.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan



industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana Struktur Ruang” adalah gambaran Struktur Ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup Struktur Ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Rencana Struktur Ruang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem pusat permukiman, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Wilayah sebagai pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan IKN dan dengan mengedepankan pelestarian lingkungan. Rencana Struktur Ruang berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pengembangan sistem pusat permukiman dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam Ruang Wilayah Provinsi sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam Ruang Wilayah Provinsi.

Pengembangan sistem pusat permukiman diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, serta memperhatikan peruntukan Ruang Kawasan Budi Daya di Wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas Pemanfaatan Ruang yang ada.

Dalam sistem pusat permukiman dikembangkan kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi sistem pusat permukiman Provinsi.

Sistem pusat permukiman bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem pusat permukiman guna tercipta keseimbangan perkembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Balikpapan” adalah Kota Balikpapan.

Yang dimaksud dengan “Samarinda” adalah Kota Samarinda.

Yang dimaksud dengan “Bontang” adalah Kota Bontang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Penentuan sistem pusat permukiman berdasarkan kriteria PKL menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kriteria tambahan.

Kriteria PKL menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi:

- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;

- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, antara lain pelabuhan lokal, bandar udara bukan pusat penyebaran, stasiun skala kecil, dan terminal penumpang tipe C;
- c. kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal, antara lain berupa kota pantai sentra pertumbuhan ekonomi lokal dan teknopark kelautan.

Kriteria tambahan meliputi:

- a. klasifikasi ibu kota kecamatan atau pusat desa yang berpotensi menjadi kawasan perkotaan atau pusat pertumbuhan berdasarkan Perka BPS Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia dan Perka BPS Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia Tahun 2020;
- b. perkembangan desa dari perdesaan menjadi perkotaan dari tahun 2010 hingga tahun 2020;
- c. ketersediaan fasilitas pendidikan, perdagangan, atau kesehatan di ibu kota kecamatan atau pusat desa/kelurahan;
- d. akses atau jarak tempuh/pelayanan ke fasilitas pendidikan, perdagangan, atau kesehatan dari ibu kota kecamatan atau pusat desa.

Ayat (10)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sentra industri maritim” adalah daerah yang berperan sebagai sentra untuk pengembangan galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan transportasi” adalah satu kesatuan yang saling menghubungkan sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi Laut, dan bandar udara yang membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien dalam satu hubungan hierarki.

Sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam Ruang Wilayah Provinsi, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi nasional dan internasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, transportasi Laut, dan bandar udara yang menghubungkan antarpulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan Wilayah nasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarsistem pusat permukiman serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara sistem

pusat permukiman dengan sektor kegiatan ekonomi Masyarakat.

Sistem jaringan transportasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarsistem pusat permukiman, keterkaitan antara Wilayah Provinsi dengan Provinsi sekitarnya, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta kegiatan pertanahan dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Sistem jaringan jalan bertujuan untuk menghubungkan antarsistem pusat permukiman, antara sistem permukiman dengan sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi Laut, serta bandar udara umum dan bandar udara khusus, antara sistem permukiman dengan Kawasan Budi Daya, serta Pulau Kecil berpenduduk dan pelayanan pergerakan orang dan/atau bongkar muat barang yang aman, selamat, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan tol” adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang” adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jembatan timbang” merupakan fasilitas penimbangan. Fasilitas penimbangan adalah fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap yang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang mempunyai fungsi pengawasan muatan angkutan barang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jembatan” adalah bangunan penghubungan guna mengatasi rintangan antarruas jalan.

Pasal 12

Ayat (1)

Jalan umum bertujuan menghubungkan antarsistem pusat permukiman, antara sistem permukiman dengan sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi Laut, bandar udara umum dan bandar udara khusus, serta jalur pendaratan dan penerbangan di Laut, serta antara sistem permukiman dengan Kawasan Budi Daya melalui pelayanan jalan yang andal dan prima guna mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi pembangunan jalan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “jalan arteri” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarPKN, antara PKN dan PWK, dan/atau PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer” adalah jalan kolektor dalam skala Wilayah.

Yang termasuk dalam jalan kolektor primer meliputi jalan kolektor primer satu, jalan kolektor primer dua, dan jalan kolektor primer tiga.

Jalan kolektor primer satu merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya.

Jalan kolektor primer dua merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten/Kota.

Jalan kolektor primer tiga merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribu kota Kabupaten/Kota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Terminal penumpang bertujuan untuk mewujudkan kelancaran kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu bagi keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.



Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe A” adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi.

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Ayat (1)

Terminal barang bertujuan untuk mewujudkan kelancaran bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang yang aman dan selamat, serta keterpaduan intramoda dan antarmoda angkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Ayat (1)

Jembatan timbang bertujuan untuk mewujudkan pengawasan muatan angkutan barang bagi keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Ayat (1)

Jembatan bertujuan untuk menghubungkan antarsistem pusat permukiman, antara sistem permukiman dengan Kawasan Budi Daya, atau antara pulau dengan pulau lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan jalur kereta api” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api” adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi Ruang manfaat jalur kereta api, Ruang milik jalur kereta api, dan Ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (2)

Yang termasuk dalam jaringan jalur kereta api meliputi jaringan jalur kereta api umum dan jaringan jalur kereta api khusus.

Kegiatan pokok yang membutuhkan jaringan jalur kereta api khusus, antara lain, kegiatan pertambangan yang membutuhkan jaringan jalur kereta api untuk pengangkutan batubara serta kegiatan industri yang membutuhkan jaringan jalur kereta api untuk pengangkutan hasil produksi

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pasal 19

Ayat (1)

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan bertujuan untuk meningkatkan pengangkutan penumpang dan/atau barang serta pengangkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya antarsistem pusat permukiman, antara sistem pusat permukiman dan Wilayah lain termasuk Pulau Kecil berpenduduk, untuk menunjang pariwisata, kawasan strategis, dan kawasan ekonomi, serta mewujudkan alur-pelayaran sungai dan danau atau lintas penyeberangan yang aman dan selamat untuk dilayari dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi.

Yang dimaksud dengan “alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau” adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan danau yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan” adalah suatu alur perairan di Laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintasan angkutan penyeberangan.

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan antarprovinsi” adalah lintas penyeberangan yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarprovinsi.

Lintas penyeberangan antarprovinsi di Provinsi Kalimantan Timur merupakan lintas penyeberangan sabuk tengah yang berfungsi menghubungkan jalur tengah Wilayah Indonesia.

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi” adalah lintas penyeberangan yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarkabupaten/kota dalam Provinsi.

Yang dimaksud dengan “pelabuhan sungai dan danau” adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.

Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan” adalah pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul untuk menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 20

Ayat (1)

Sistem jaringan transportasi Laut bertujuan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan Laut dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan Laut dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional dan menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional. Pelabuhan Laut bertujuan untuk mewujudkan fungsi pelabuhan untuk meunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.

Yang dimaksud dengan “alur-pelayaran di Laut” adalah perairan Laut yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Alur pelayaran bertujuan untuk mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan utama” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan Laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan Laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpul” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan Laut dalam negeri, alih muat angkutan Laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan Laut dalam negeri, alih muat angkutan Laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.

Yang dimaksud dengan “Terminal Umum” adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang untuk melayani kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan “terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Yang termasuk dalam kegiatan usaha pokok meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap air panas, dan udara dingin, pengelolaan air, pengelolaan air limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar, penyediaan akomodasi, kawasan pariwisata, taman wisata alam, dan taman nasional, dan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan fasilitas dermaga.

Ayat (3)

Pengembangan pelabuhan utama dimaksudkan antara lain untuk membuka akses berbagai produk sektor unggulan ke pasar internasional yang merupakan tujuan ekspor.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “alur-pelayaran umum dan perlintasan” adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di Laut, sungai, dan danau untuk melayani kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran khusus” adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di Laut, sungai, dan danau untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Bandar udara umum dan bandar udara khusus bertujuan untuk mewujudkan bandar udara sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, serta keselamatan dan keamanan penerbangan, serta menunjang pembangunan nasional dan daerah.

Yang dimaksud dengan “bandar udara” adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Yang dimaksud dengan “bandar udara umum” adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan “bandar udara khusus” adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai Provinsi. Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpan” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 22

Ayat (1)

Sistem jaringan energi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan akan datang.

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah jaringan dan infrastruktur kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur ketenagalistrikan” adalah jaringan dan infrastruktur yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah fasilitas dan sarana infrastruktur melalui moda selain pipa untuk kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Yang termasuk dalam fasilitas dan sarana infrastruktur melalui moda selain pipa meliputi fasilitas *liquefied natural gas* atau *compressed natural gas* berupa tangki, terminal penerima *liquefied natural gas*, unit regasifikasi, sarana kompresi dan



dekompresi *compressed natural gas*, stasiun pengisian bahan bakar gas, dan peralatan pendukung lainnya.

Yang dimaksud dengan “jaringan minyak dan gas bumi” adalah fasilitas dan sarana infrastruktur melalui pipa untuk kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Yang termasuk dalam fasilitas dan sarana infrastruktur melalui pipa meliputi pipa transmisi dan pipa distribusi.

Pipa transmisi adalah pipa untuk mengangkut gas bumi dari sumber pasokan gas bumi atau lapangan-lapangan gas bumi ke ruas transmisi, Wilayah jaringan distribusi, Wilayah niaga tertentu, dan/atau konsumen gas bumi.

Pipa distribusi adalah pipa untuk mengangkut gas bumi dari pipa transmisi pada suatu ruas transmisi dan/atau pipa distribusi pada suatu Wilayah jaringan distribusi ke konsumen gas bumi dan/atau Wilayah jaringan distribusi lainnya yang berbentuk jaringan.

Pipa transmisi harus berada di ruas transmisi atau koridor pipa bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut. Pipa distribusi harus berada di Wilayah jaringan distribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau penyimpanan, atau dari kilang pengolahan atau penyimpanan ke konsumen sehingga fasilitas produksi, kilang pengolahan, dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi termasuk juga dalam sistem jaringan energi.

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi.

Ayat (5)

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup,

kualitas yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah instalasi tenaga listrik untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Yang dimaksud dengan “jaringan infastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung” adalah instalasi tenaga listrik untuk kegiatan konversi, transformasi, penyaluran, dan distribusi tenaga listrik.

Pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang berupa pembangkitan tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dan sumber energi baru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem” adalah instalasi tenaga listrik berbentuk jaringan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.

Jaringan transmisi tenaga listrik adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

Yang dimaksud dengan “jaringan distribusi tenaga listrik” adalah instalasi tenaga listrik berbentuk jaringan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

Yang dimaksud dengan “gardu listrik” adalah instalasi tenaga listrik untuk kegiatan konversi dan transformasi tenaga listrik.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “gardu induk” adalah gardu yang terhubung satu dengan lainnya oleh jaringan transmisi dengan pusat beban.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

## Pasal 23

Ayat (1)

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata, serta terjangkau guna meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi.

Yang dimaksud dengan “jaringan tetap” adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkit sewa.

Yang dimaksud dengan “infrastruktur jaringan tetap” adalah fasilitas yang merupakan infrastruktur sipil atau bangunan untuk layanan telekomunikasi.

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak” adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak bagi terselenggaranya telekomunikasi terestrial, seluler, dan satelit.

Ayat (2)

Saluran kabel serat optik merupakan sistem komunikasi serat optik.

Saluran kabel bawah Laut merupakan sistem komunikasi kabel Laut.

Yang dimaksud dengan “sistem komunikasi kabel Laut” adalah suatu sistem transmisi telekomunikasi menggunakan media

kabel yang dibentangkan di dalam lautan dan/atau samudera untuk menghubungkan beberapa stasiun kabel di setiap negara yang dilaluinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 24

Ayat (1)

Sistem jaringan sumber daya air bertujuan untuk:

- a. menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi Masyarakat;
- b. menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; dan
- c. mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Yang dimaksud dengan “pengelolaan sumber daya air” adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.

Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari Masyarakat.

Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Upaya pencegahan ditujukan untuk mencegah

terjadinya bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air. Upaya penanggulangan ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana. Upaya pemulihan akibat daya rusak air ditujukan untuk memulihkan fungsi sumber daya air serta sistem prasarana sumber daya air setelah terjadinya daya rusak air.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prasarana sumber daya air” adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan irigasi” adalah satu kesatuan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Yang dimaksud dengan “sistem pengendalian banjir” adalah satu kesatuan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap secara menyeluruh untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan daya rusak air.

Yang dimaksud dengan “bangunan sumber daya air” adalah infrastruktur konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

SPAM bertujuan untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

SPAL bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Yang dimaksud dengan “sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Bahan berbahaya dan beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 29

Ayat (1)

Sistem jaringan persampahan bertujuan untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan persampahan” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Sarana persampahan adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.

Prasarana persampahan adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 30

Ayat (1)

Kawasan Lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan Wilayah yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan "badan air" adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya" adalah kawasan berfungsi lindung yang terdiri atas kawasan hutan lindung dan Kawasan Lindung gambut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan perlindungan setempat" adalah kawasan kearifan lokal dan sempadan terdiri atas sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat diantaranya RTH, kebun raya, taman keanekaragaman hayati, dan lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kawasan pencadangan konservasi di Laut" adalah kawasan konservasi Perairan Pesisir atau Laut usulan atau belum mendapatkan penetapan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan adat" adalah kawasan hutan yang berada dalam Wilayah Masyarakat hukum adat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Kawasan Lindung geologi" adalah kawasan yang berfungsi untuk melindungi kawasan cagar alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Huruf h



Yang dimaksud dengan "kawasan ekosistem mangrove" adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Penetapan suatu Kawasan Lindung memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

#### Pasal 32

Cukup jelas.

#### Pasal 33

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan lindung" adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air Laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Yang dimaksud dengan "Kawasan Lindung gambut" adalah Wilayah dengan tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 34

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sempadan pantai" adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Penghitungan batas sempadan pantai harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait.

Yang dimaksud dengan "garis sempadan sungai" adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Sempadan sungai meliputi Ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.

Garis sempadan sungai ditentukan pada:

- a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
- b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
- c. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
- d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
- e. sungai yang terpengaruh pasang air Laut; dan
- f. mata air.

Garis sempadan sungai pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
- c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Garis sempadan sungai pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan:

- a. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
- b. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, Ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai Ruang penyalur banjir.

Penentuan garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air Laut, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sungai yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.

Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Yang dimaksud dengan "sempadan danau" adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.

Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Muka air tertinggi yang pernah terjadi, menjadi batas badan danau. Badan danau, merupakan Ruang yang berfungsi sebagai wadah air.

Penentuan garis sempadan waduk dan badan air lainnya, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan danau yang diukur dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 35

Ayat (1)

Kawasan konservasi dilaksanakan dengan memperhatikan pemberdayaan Masyarakat pada kawasan hutan konservasi melalui pengembangan desa konservasi, fasilitas kemitraan antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan Masyarakat, pemberian izin jasa wisata alam, serta akses untuk memungut hasil hutan bukan kayu pada blok zona tradisional atau pemanfaatan tradisional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 36

Cukup jelas.

#### Pasal 37

Penetapan kawasan hutan adat oleh menteri yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan terdiri atas Hutan Adat Hemaq Beniuq dan Hutan Adat Mului.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4618/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2017 tentang Penetapan Hutan Adat Hemaq Beniung Kepada Masyarakat Hukum Adat Kampung Juaq Asa Seluas ± 49 (Empat Puluh Sembilan) Hektare, di Kampung Juaq Asa, Desa Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok,

Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan Hutan Adat Hemaq Beniung berada pada areal penggunaan lain memiliki luas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektare.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5474/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2020 tentang Penetapan Hutan Adat Mului Kepada Masyarakat Hukum Adat Mului Seluas ± 7.722 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua) Hektare, di Kampong Mului, Desa Swan Slutung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Hutan Adat Mului berada pada:

- a. kawasan hutan lindung memiliki luas kurang lebih 3.434 (tiga ribu empat ratus tiga puluh empat) hektare;
- b. kawasan hutan produksi memiliki luas kurang lebih 4.244 (empat ribu dua ratus empat puluh empat) hektare; dan
- c. areal penggunaan lain memiliki luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektare.

Penetapan kawasan hutan adat oleh bupati terdiri atas Kawasan Hutan Adat Bahau Uma Luhut, Kawasan Hutan Adat Anyaang Apoq, Kawasan Hutan Adat Benuaq Telimuk, Kawasan Hutan Adat Teluyen Jarikng Lestari, Kawasan Hutan Adat Benuaq Madjaun, dan Kawasan Hutan Adat Gunung Menaliq di Kabupaten Kutai Barat.

#### Pasal 38

Yang termasuk dalam Kawasan Lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi dan kawasan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Kawasan cagar alam geologi merupakan kawasan bentang alam Karst sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 140K/40/MEM/2019 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur.

Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur berada pada:

- a. kawasan hutan lindung memiliki luas kurang lebih 84.214 (delapan puluh empat ribu dua ratus empat belas) hektare;

- b. kawasan hutan produksi memiliki luas kurang lebih 77.588 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan) hektare;
- c. areal penggunaan lain sebagai Kawasan Lindung geologi memiliki luas kurang lebih 13.861 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh satu) hektare; dan
- d. areal penggunaan lain sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 140K/40/MEM/2019 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur, tetapi telah ada permukiman dan potensi Wilayah pengembangan permukiman termasuk akses kegiatan perikanan dan kelautan sehingga menjadi Kawasan Permukiman memiliki luas kurang lebih 1.996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) hektare.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah merupakan kawasan imbuhan air tanah.

#### Pasal 39

Cukup jelas.

#### Pasal 40

Kawasan Budi Daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan Kawasan Budi Daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi

dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan Kawasan Budi Daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan produksi" adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Yang dimaksud dengan "kawasan perkebunan rakyat" adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas paling kecil 0,25 (dua koma lima puluh) hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50 (lima puluh) persen atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektar.

Yang dimaksud dengan "kawasan pertanian" adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan Wilayah serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi, dan keberadaan infrastruktur penunjang.

Yang dimaksud dengan "kawasan perikanan" adalah Wilayah yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Yang dimaksud dengan "kawasan pertambangan dan energi" adalah sebagian atau seluruh Wilayah untuk kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan dan energi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, termasuk kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Yang dimaksud dengan "kawasan pariwisata" adalah wilayah dengan kegiatan untuk membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Yang dimaksud dengan "kawasan transportasi" adalah kawasan yang berfungsi sebagai simpul sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi Laut, serta bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan Laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

Yang dimaksud dengan "kawasan pertahanan dan keamanan" adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

#### Pasal 41

##### Ayat (1)

Kawasan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Yang termasuk dalam kawasan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 42

Kawasan perkebunan rakyat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan.

Kawasan hutan rakyat berada pada lahan Masyarakat dan dikelola oleh Masyarakat.

#### Pasal 43

##### Ayat (1)

Kawasan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung kedaulatan pangan juga dimaksudkan untuk memenuhi



kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 44

Ayat (1)

Kawasan perikanan dapat berada di Ruang darat, Ruang Laut, dan di luar Kawasan Lindung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 45

Ayat (1)

Kawasan pertambangan dan energi dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dan energi dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

#### Pasal 46

##### Ayat (1)

Kawasan peruntukan industri antara lain dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, dan pengendalian dampak lingkungan.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 47

##### Ayat (1)

Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan daya tarik wisata yang mencakup daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata hasil buatan manusia.

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam, diantaranya meliputi bentang pesisir pantai, bentang Laut, kolam air, dasar Laut, pegunungan dan hutan alam, perauran sungai dan danau, perkebunan, pertanian, bentang alam khusus.

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, diantaranya meliputi cagar budaya, perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya Masyarakat yang khas, museum, kehidupan adat dan tradisi Masyarakat dan aktifitas budaya Masyarakat yang khas di suatu area/tempat, dan kesenian.

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya, diantaranya meliputi fasilitas rekreasi dan hiburan/taman

bertema, fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), dan fasilitas rekreasi dan olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 48

Kawasan Permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kawasan Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

#### Pasal 49

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Kriteria penetapan KSP terdiri atas:

- a. mendukung tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- c. nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- d. kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di Wilayah Provinsi;
- e. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Wilayah Provinsi;
- f. memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan Ruang Wilayah Provinsi yang memiliki kekhususan;
- g. dapat berhimpitan dengan KSN, tetapi harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda, dan harus ada pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi yang jelas;
- h. mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau Masyarakat;
- i. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan Wilayah Provinsi;

- j. dapat berupa kawasan yang berada pada satu Kabupaten/Kota atau lintas Kabupaten/Kota; dan
- k. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “indikasi program utama” adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang Provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang” adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan berusaha” adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan perizinan berusaha.

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonberusaha” adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan perizinan berusaha.

Yang dimaksud dengan “ kegiatan yang bersifat strategis nasional” adalah kebijakan Pemerintah terkait suatu atau beberapa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konfirmasi KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail Tata Ruang.

Yang dimaksud dengan “persetujuan KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain rencana detail Tata Ruang.

Yang dimaksud dengan “rekomendasi KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang.

Rekomendasi KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional harus dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan Penataan Ruang, salah satunya Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan.

Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan dicapai dengan mengedepankan konsep *safeguarding* dalam Pemanfaatan Ruang, antara lain memperhatikan:

- a. aspek keamanan keselamatan/pengurangan risiko bencana;
- b. aspek ketahanan pangan;
- c. aspek kelestarian lingkungan;
- d. aspek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal/regional/nasional;
- e. aspek kerawanan sosial; dan
- f. aspek pertahanan dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persetujuan KKPRL” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi.

Yang dimaksud dengan “konfirmasi KKPRL” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Luas berdasarkan perhitungan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut menggunakan sistem proyeksi *cylindrical equal area*.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

#### Pasal 61

Ayat (1)

Indikasi program utama menggambarkan program yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah. Selain itu, juga terdapat program lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Indikasi waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun disesuaikan dengan periode rencana pembangunan jangka menengah.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan” adalah rencana terpadu yang disusun dengan menyelaraskan indikasi program utama Rencana Tata Ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan” adalah rencana terpadu yang merupakan turunan dari sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program Pemanfaatan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi bertujuan untuk menjamin fungsi sistem Provinsi yang berada di Wilayah Kabupaten/Kota. Materi muatan Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi terdiri atas:

- a. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada suatu kawasan;
- b. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan;

- c. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan pada suatu kawasan;
- d. sarana dan prasarana minimum;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah Provinsi; dan
- f. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.

Ketentuan khusus merupakan ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan peruntukan yang memiliki fungsi khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Ruang milik jalan” adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

Yang dimaksud dengan “Ruang manfaat jalan” adalah Ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi Ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

Yang dimaksud dengan “Ruang pengawasan jalan” adalah Ruang tertentu di luar Ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan dan jaringan utilitas” adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung” adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daerah lingkungan kerja pelabuhan” adalah Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

Yang dimaksud dengan “daerah lingkungan kepentingan pelabuhan” adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (11)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan” adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang menjadi Wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (12)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana bantu navigasi pelayaran” adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal

yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi Kapal dan/atau lalu lintas kapal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

#### Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat penangkapan ikan” adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

Yang dimaksud dengan “alat bantu penangkapan ikan” adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan dan instalasi di Laut” adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut baik yang menempel pada daratan maupun yang tidak menempel pada daratan serta didirikan di Wilayah perairan dan Wilayah yurisdiksi.

Yang dimaksud dengan “pipa bawah Laut” adalah tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi yang terletak di atau tertanam di bagian bawah Laut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Ruang bebas” adalah Ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor jaringan transmisi tenaga listrik di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya serta keamanan operasi jaringan transmisi tenaga listrik.

Yang termasuk dalam jarak bebas minimum meliputi jarak bebas minimum vertikal dari konduktor dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang.

Yang dimaksud dengan “jarak bebas minimum vertikal dari konduktor” adalah jarak terpendek secara vertikal antara konduktor jaringan transmisi tenaga listrik dan permukaan bumi atau benda di atas permukaan bumi yang tidak boleh kurang dari jarak yang telah ditetapkan demi keselamatan

manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya serta keamanan operasi jaringan transmisi tenaga listrik.

Yang dimaksud dengan “jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang” adalah jarak terpendek secara horizontal dari sumbu vertikal menara atau tiang ke bidang vertikal Ruang bebas, meliputi jarak dari sumbu vertikal menara ke konduktor, jarak horizontal akibat ayunan konduktor, dan jarak bebas impuls petir

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang termasuk dalam pemanfaatan kawasan meliputi budi daya tanaman obat, budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya lebah, budi daya hijauan makanan ternak, budi daya buah-buahan dan biji-bijian, budi daya

tanaman atsiri, budi daya tanaman nira, wana mina (*siluofishery*), wana ternak (*siluopastura*), tanam wana tani (*agroforestry*), wana tani ternak (*agrosiluopastura*), penangkaran satwa liar, dan/atau rehabilitasi satwa.

Yang termasuk dalam pemanfaatan jasa lingkungan meliputi usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, dan/atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Yang termasuk dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu meliputi rotan, madu, getah, buah, biji, jamur, daun, bunga, sarang burung walet, dan/atau hasil hutan bukan kayu lainnya.

#### Angka 2

Yang termasuk dalam kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi kegiatan:

- a. religi;
- b. pertambangan;
- c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- g. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- h. fasilitas umum;
- i. industri selain pengolahan hasil hutan;
- j. pertahanan dan keamanan;



- k. prasarana penunjang keselamatan umum;
- l. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
- m. tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang termasuk dalam penelitian, ilmu pengetahuan meliputi kegiatan penelitian yang dapat memberikan manfaat pada peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan gambut.

Yang termasuk dalam pendidikan meliputi pengembangan pendidikan dan kesadartahuan kawasan gambut.

Yang termasuk dalam pemanfaatan jasa lingkungan meliputi kawasan gambut untuk ekosistem sekitarnya, wisata terbatas, perdagangan karbon, dan/atau sosial dan budaya Masyarakat sekitarnya.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus” antara lain industri semen, industri pupuk, industri kertas, industri galangan kapal, dan sebagainya.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang termasuk dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi rotan, sagu, nipah, aren, bambu, getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar, nabati (*bioenergy*), dan/atau komoditas pengembangan tanaman pangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang termasuk dalam pemanfaatan hasil hutan kayu pemanfaatan hasil hutan kayu meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami (hutan alam) dan pemanfaatan hasil hutan kayu budi daya tanaman (hutan tanaman).

Yang termasuk dalam pemungutan hasil hutan kayu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok Masyarakat setempat dan individu.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang termasuk dalam kegiatan panen dan pascapanen meliputi unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budi daya kawasan pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “sumber daya genetik” adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “kawasan penggembalaan umum” adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan ternak Masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Penyediaan prasarana budi daya kawasan pertanian terdiri atas:

- a. kawasan tanaman pangan meliputi jaringan irigasi, jalan penghubung/jalan usaha tani, tenaga listrik dan jaringannya sampai ke pascapanen, gudang, dan

- bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis;
- b. kawasan hortikultura meliputi jaringan irigasi, pengolah limbah, jalan penghubung/jalan usaha tani dari lokasi budi daya sampai lokasi pascapanen dan pasar, tenaga listrik dan jaringannya sampai ke pascapanen, jaringan telekomunikasi sampai ke lokasi budi daya, gudang, rumah atau penaung tanaman, gudang berpendingin, bangsal penanganan pascapanen, dan pasar;
  - c. kawasan perkebunan meliputi jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum, parit drainase, kolam limbah, penangkap gas metan, pembuatan pupuk dari jangjang kosong, teras, dan pancang jalur tanam/pancang kepala; dan
  - d. kawasan peternakan meliputi jalan, jembatan, pasar hewan, dan embung.

#### Angka 7

Yang dimaksud dengan “wisata agro adalah usaha produktif dan kreatif yang dijalankan secara profesional, menyediakan dan/atau mengelola barang dan/atau jasa bagi pemenuhan wisatawan dalam penyelenggaraan wisata agro berbasis pertanian.

#### Angka 8

Yang termasuk dalam kepentingan umum meliputi jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, dan pembangkit dan jaringan listrik.

#### Angka 9

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk hortikultura, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari

kedua faktor tersebut, memberi ciri dan kualitas tertentu pada produk yang dihasilkan.

Yang dimaksud dengan “Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi” adalah daerah asal suatu produk perkebunan yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan/atau faktor manusia memberi indikasi tertentu yang tidak dapat dihasilkan Wilayah lain.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus” antara lain industri semen, industri pupuk, industri kertas, industri galangan kapal, dan sebagainya.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 85

Huruf a

Angka 1



Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang termasuk dalam intensifikasi air dan lahan meliputi peningkatan daya dukung air dan lahan budi daya, peningkatan teknologi dan manajemen budi daya, efisiensi penggunaan air, penggunaan benih, pakan, dan obat ikan, pengendalian hama dan penyakit ikan, diversifikasi pembudidayaan ikan, dan penerapan biosekuriti.

Yang termasuk dalam ekstensifikasi lahan diantaranya meliputi pembukaan dan pengolahan lahan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “plasma nutfah” adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan unggul baru.

Yang dimaksud dengan “sumber daya ikan” adalah potensi semua jenis ikan.

Angka 5

Yang termasuk dalam prasarana dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan meliputi prasarana dan sarana penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, dan pemasaran hasil perikanan.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang termasuk dalam prasarana pendukung kawasan perikanan meliputi tenaga listrik, jalan penghubung, rumah atau penaung, dan pasar.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “pergaraman” adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.

Pemanfaatan air Laut selain energi berupa instalasi pengolahan air Laut untuk air minum antara lain berupa pipa pengambilan air Laut dalam untuk produksi air minum.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “kesenangan dan wisata” adalah wisata memancing.

Pemeliharaan untuk kesenangan adalah kegiatan pemeliharaan jenis ikan dilindungi penuh yang dilakukan oleh perseorangan.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “pembuangan (*dumping*)” adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Yang termasuk dalam pembuangan (*dumping*) meliputi pengerukan dan pembuangan limbah ke Laut.

Pengerukan adalah penimbunan pembuangan hasil pekerjaan pengerukan atau pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Yang termasuk dalam pembuangan (*dumping*) limbah ke Laut meliputi:

- a. limbah bahan berbahaya dan beracun berupa:
  1. tailing dari kegiatan pengolahan hasil pertambangan; dan
  2. serbuk bor dari hasil pengeboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di Laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis (*synthetic based mud*); dan
- b. limbah nonbahan berbahaya dan beracun berupa serbuk bor dan lumpur bor dari hasil pengeboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di Laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar air (*water based mud*).

Lokasi pembuangan mempertimbangkan perlindungan terhadap area sensitif dan rona awal kualitas air Laut yang memenuhi baku mutu air Laut.

Area sensitif antara lain terdiri atas kawasan konservasi perairan, daerah rekreasi atau wisata bahari, kawasan

Mangrove, padang lamun, terumbu karang, kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam Laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam, daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budi daya perikanan, alur migrasi biota Laut yang dilindungi, daerah penangkapan ikan atau zona perikanan, alur pelayaran, dan/atau Wilayah pertahanan.

Yang dimaksud dengan “reklamasi” adalah:

- a. kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase; atau
- b. pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah Garis Pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Pasal 86

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “zona terlarang” adalah area paling jauh 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar bangunan dan instalasi di Laut;

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang termasuk dalam infrastruktur industri paling sedikit meliputi jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, dan jaringan transportasi.

Yang termasuk dalam logistik meliputi kegiatan distribusi, penyimpanan, sortasi, pelabelan, pengemasan kembali, dan lain-lain.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang termasuk dalam infrastruktur penunjang paling sedikit meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran, dan tempat pembuangan sampah.

Yang termasuk dalam sarana penunjang antara lain hotel dan restoran, sarana olahraga, sarana ibadah, sarana perbankan, kantor pos dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pariwisata berkelanjutan” adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan Masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang termasuk dalam prasarana daya tarik wisata meliputi jaringan listrik dan lampu penerangan, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan sistem pengelolaan limbah.

Yang termasuk dalam fasilitas umum meliputi fasilitas keamanan, fasilitas keuangan dan perbankan, fasilitas bisnis, fasilitas kesehatan, fasilitas sanitasi dan kebersihan, fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia, fasilitas rekreasi, fasilitas lahan parkir, dan fasilitas ibadah.

Yang termasuk dalam fasilitas pariwisata meliputi fasilitas akomodasi, fasilitas rumah makan, fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*, polisi pariwisata dan satuan tugas wisata, toko cinderamata (*souvenir shop*), penunjuk arah/papan

informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*), dan bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "*zero delta Q policy*" adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)



Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "lingkungan hunian" adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

Yang dimaksud dengan "permukiman" adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Yang dimaksud dengan "perumahan" adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik, perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "prasarana" adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

Yang termasuk dalam prasarana paling sedikit meliputi jaringan jalan, saluran pembuangan air hujan atau drainase, penyediaan air minum, saluran pembuangan air limbah atau sanitasi, dan tempat pembuangan sampah.

Yang dimaksud dengan "sarana" adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Yang termasuk dalam sarana paling sedikit meliputi RTH dan sarana umum mencakup rumah ibadah,

tempat bermain anak-anak, tempat olahraga, dan papan penunjuk jalan.

Yang termasuk dalam tempat kegiatan pendukung meliputi lokasi pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta pertahanan dan keamanan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "rumah" adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan "utilitas umum" adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Yang termasuk dalam utilitas umum paling sedikit meliputi jaringan listrik.

Angka 5

Pembangunan kembali lingkungan hunian dilakukan dengan cara rehabilitasi, rekonstruksi, atau peremajaan permukiman dan perumahan.

Peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh meliputi pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali di Kawasan Permukiman perkotaan.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “usaha secara terbatas” adalah kegiatan usaha yang diperkenankan dapat dikerjakan di rumah untuk mendukung terlaksananya fungsi hunian.

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian” adalah kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan bencana yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugian.

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian” adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pangkalan militer atau kesatrian” adalah kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal sehingga mempunyai kesiapsiagaan yang tinggi.

Pangkalan militer atau kesatrian untuk satuan TNI Angkatan Darat satuan setingkat Koramil ke atas, untuk satuan TNI Angkatan Laut satuan setingkat Posal ke atas, dan untuk satuan TNI Angkatan Udara satuan setingkat Posau ke atas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan keselamatan operasi penerbangan” adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta

Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan” adalah ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Huruf b

Materi muatan KP2B digambarkan sesuai Petunjuk Teknis Nomor: 5/Juknis-HK.02/VI/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana” adalah kawasan yang mempunyai risiko bencana alam tingkat tinggi. Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana” adalah ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan rawan bencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan cagar budaya” adalah ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan cagar budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan resapan air” adalah Wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah.

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air” adalah ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan resapan air.

Huruf f

Yang termasuk dalam kawasan sempadan meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau dan waduk, serta sempadan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut.

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan” adalah ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan sempadan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertahanan dan keamanan” adalah ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan pertahanan dan keamanan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kawasan karst adalah karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu.

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan karst” adalah ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan karst.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kawasan pertambangan mineral dan batubara” adalah Wilayah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bilumen padat, gambut, dan batuan aspal, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara” adalah

ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kawasan migrasi satwa” adalah Wilayah perpindahan satwa liar atau lingkungan tempat satwa dapat hidup dan berkembang, baik Wilayah jelajah atau lintasan satwa liar atau koridor satwa liar di luar kawasan hutan konservasi maupun alur migrasi biota Laut yang dilindungi dan terancam punah dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis.. Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan migrasi satwa” adalah ketentuan Pemanfaatan Ruang tambahan terhadap Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang bertampalan atau tumpang susun dengan kawasan migrasi satwa.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “daerah latihan militer” adalah Wilayah yang disiapkan/digunakan untuk meningkatkan kemampuan perorangan dan/atau satuan dalam rangka menghadapi kemungkinan ancaman musuh.

Yang dimaksud dengan “instalasi militer” adalah instalasi yang digunakan untuk kepentingan mendukung kegiatan militer, seperti instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a



Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “bentuk eksokarst” adalah karst pada bagian permukaan.

Yang termasuk dalam bentuk eksokarst meliputi mata air permanen, bukit karst, dolina, uvala, polje, dan/atau telaga.

Mata air permanen adalah mata air yang selalu mengalir sepanjang tahun.

Bukit karst adalah bukit dengan bentuk kerucut (*conical*), membulat (*sinusoida*), menara (*tower*), meja (*table*), dan/atau bentukan lainnya.

Dolina adalah lekukan tertutup di permukaan akibat proses pelarutan dan peruntuhan yang memiliki ukuran bervariasi dengan kedalaman antara 2 (dua) sampai dengan 100 (seratus) meter dan diameter antara 10 (sepuluh) sampai dengan 1.000 (seribu) meter.

Uvala adalah gabungan dari 2 (dua) atau lebih dolina.

Polje adalah gabungan dari 2 (dua) atau lebih uvala.

Telaga adalah uvala atau polje yang tergenang air.

Yang dimaksud dengan “bentuk endokarst” adalah karst pada bagian bawah permukaan.

Yang termasuk dalam bentuk endokarst meliputi sungai bawah tanah dan/atau speleotem.

Sungai bawah tanah adalah sungai yang mengalir di bawah permukaan tanah.

Speleotem adalah bentukan hasil proses pelarutan kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) yang menghiasi bagian dalam gua seperti stalaktit, stalakmit, pilar, dan *flowstone*.

Yang dimaksud dengan “karstifikasi” adalah proses alam yang menyebabkan terbentuknya karst.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang termasuk dalam mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, selenit, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium.

Yang termasuk dalam mineral bukan logam meliputi asbestos, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, volasfonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon.

Yang termasuk dalam batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir Laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Yang termasuk dalam batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.

Selain golongan mineral bukan logam terdapat mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Yang termasuk dalam konstruksi meliputi penyediaan dan pengujian peralatan pertambangan, serta pembangunan sarana/prasarana pertambangan meliputi tambang bawah tanah, tambang terbuka, tambang bawah air, komisioning tambang, penyemenan tambang bawah tanah, ventilasi tambang, bangunan pengolahan dan pemurnian, jalan tambang, dan gudang bahan peledak.

Yang termasuk dalam penambangan meliputi pengupasan lapisan tanah atau batu penutup,

penggalian atau pengambilan, serta pemuatan dan pemindahan.

Yang termasuk dalam pengolahan dan pemurnian meliputi pencampuran dan pengolahan.

Yang termasuk dalam reklamasi dan pascatambang, termasuk pengelolaan sisa tambang meliputi reklamasi, penutupan tambang, pembongkaran fasilitas, penyiapan dan penataan lahan, pembibitan, penanaman, dan perawatan.

Yang termasuk dalam prasarana pendukung pertambangan meliputi jalan penghubung, tenaga listrik, telekomunikasi, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengolahan limbah bahan berbahaya, dan beracun, pengolahan sampah, alat pemadam kebakaran, dan/atau prasarana pendukung lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif non fiskal” adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.

Yang dimaksud dengan “disinsentif non fiskal” adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.



LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN  
2023-2042

**PETA CAKUPAN WILAYAH DAN NAMA PULAU KECIL**

II. Nama Pulau Kecil

NO	NAMA PULAU	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
1.	Pulau Agaragar	117°31'49.000" T	0°7'53.000" U	TBP
2.	Pulau Aji	117°33'44.770" T	2°10'13.730" U	TBP
3.	Pulau Andongabu	118°38'19.000" T	2°13'48.000" U	TBP
4.	Pulau Babanir Baru	117°32'17.990" T	2°9'51.000" U	TBP
5.	Pulau Babi	116°48'32.460" T	1°16'48.180" S	TBP
6.	Pulau Badakbadak	117°54'39.020" T	2°10'51.660" U	TBP
7.	Pulau Badakbadak Barat	117°30'47.990" T	0°9'5.000" U	TBP
8.	Pulau Badakbadak Timur	117°31'14.000" T	0°9'2.990" U	TBP
9.	Pulau Bajau	118°3'6.990" T	0°55'16.000" U	TBP
10.	Pulau Bakungan Diki	118°44'6.000" T	2°6'50.000" U	TBP
11.	Pulau Bakungan Hea	118°43'51.730" T	2°6'7.070" U	TBP
12.	Pulau Balambangan	118°59'47.000" T	1°47'20.000" U	TBP
13.	Pulau Balang	116°43'25.000" T	1°7'23.990" S	TBP
14.	Pulau Balikkukup	118°38'8.090" T	1°31'30.100" U	TBP
15.	Pulau Bangau	117°28'50.990" T	0°38'21.990" S	TBP
16.	Pulau Bansik	116°18'2.260" T	1°39'38.340" S	TBP
17.	Pulau Bansik Besar	116°14'54.530" T	1°39'21.210" S	
18.	Pulau Bansik Kecil	116°15'1.870" T	1°39'0.590" S	
19.	Pulau Baru	117°22'57.130" T	0°49'51.530" S	
20.	Pulau Batukapal	116°29'54.190" T	2°15'21.780" S	TBP
21.	Pulau Belian	118°55'41.000" T	0°54'33.990" U	TBP
22.	Pulau Benawa Kecil	116°43'57.520" T	1°4'31.500" S	TBP
23.	Pulau Berasbasah	117°33'33.990" T	0°3'50.000" U	BP
24.	Pulau Berau	117°29'49.120" T	0°22'4.270" S	TBP
25.	Pulau Berukang	117°29'47.950" T	0°26'55.610" S	TBP
26.	Pulau Besar	117°4'44.920" T	2°13'7.510" U	BP
27.	Pulau Besing	117°40'1.540" T	2°11'47.770" U	TBP
28.	Pulau Bilangbilangan	118°56'58.990" T	1°33'41.000" U	TBP



<b>NO</b>	<b>NAMA PULAU</b>	<b>BUJUR</b>	<b>LINTANG</b>	<b>KETERANGAN</b>
29.	Pulau Bilung	115°28'52.760" T	0°12'48.530" U	TBP
30.	Pulau Bingkar	117°52'46.990" T	2°8'56.000" U	TBP
31.	Pulau Birahbirahan	118°28'23.240" T	0°41'42.660" U	TBP
32.	Pulau Bonggong Besar	117°39'42.000" T	2°11'12.990" U	TBP
33.	Pulau Bonggong Kecil	117°40'32.990" T	2°10'50.990" U	TBP
34.	Pulau Buaya	117°14'30.830" T	0°34'39.820" S	TBP
35.	Pulau Bukuan	117°17'24.000" T	0°50'24.000" S	TBP
36.	Pulau Bulanbulan	118°39'3.190" T	2°13'14.730" U	TBP
37.	Pulau Bulingisan	118°38'11.000" T	2°13'59.990" U	TBP
38.	Pulau Bunglalang	117°5'8.870" T	2°13'1.350" U	TBP
39.	Pulau Burung	116°33'2.130" T	2°12'15.400" S	BP
40.	Pulau Burung	117°27'0.000" T	0°30'15.620" S	TBP
41.	Pulau Cerocok	117°16'26.020" T	0°48'25.510" S	TBP
42.	Pulau Cok	117°32'5.320" T	0°24'25.390" S	TBP
43.	Pulau Datu	117°28'41.890" T	0°48'38.080" S	TBP
44.	Pulau Datuk	116°42'55.000" T	1°7'54.990" S	TBP
45.	Pulau Demis	116°44'6.000" T	1°5'17.990" S	TBP
46.	Pulau Derawan	118°14'39.000" T	2°17'3.000" U	BP
47.	Pulau Dinar	117°19'46.970" T	0°44'7.530" S	TBP
48.	Pulau Gandeng	117°24'12.640" T	0°47'19.180" S	BP
49.	Pulau Genting Besar	117°28'48.000" T	0°36'0.000" S	TBP
50.	Pulau Genting Kecil	117°29'57.690" T	0°36'24.230" S	TBP
51.	Pulau Guntung	117°52'23.000" T	2°6'49.000" U	TBP
52.	Pulau Gurimbang	117°35'25.950" T	2°11'21.890" U	TBP
53.	Pulau Gusung	117°30'25.670" T	0°11'19.270" U	BP
54.	Pulau Gusung Dua	117°30'41.390" T	0°11'27.290" U	
55.	Pulau Gusung Situnggala	118°35'0.720" T	2°16'8.570" U	
56.	Pulau Halan	115°13'10.820" T	0°32'44.750" U	TBP
57.	Pulau Hantu	118°3'8.480" T	0°56'3.970" U	TBP
58.	Pulau Harapan	116°59'55.000" T	0°25'32.000" S	BP
59.	Pulau Hurai	115°25'46.990" T	0°22'50.000" U	TBP
60.	Pulau Idoh	116°42'11.620" T	1°11'54.300" S	TBP
61.	Pulau Ilu	117°36'0.000" T	0°26'24.000" S	TBP
62.	Pulau Jerang	117°0'56.330" T	0°34'24.500" S	TBP
63.	Pulau Jompang	118°0'10.000" T	0°58'41.000" U	TBP
64.	Pulau Jopang	117°26'12.990" T	0°24'28.000" S	TBP
65.	Pulau Kakaban	118°32'10.480" T	2°8'39.540" U	TBP
66.	Pulau Kamagi Lekkat	118°34'28.810" T	2°18'0.380" U	TBP
67.	Pulau Kamagi Pikkit	118°34'54.790" T	2°17'33.930" U	TBP
68.	Pulau Kambing	117°18'54.380" T	0°34'20.310" S	TBP
69.	Pulau Kaniungan Besar	118°50'34.080" T	1°7'0.530" U	BP

<b>NO</b>	<b>NAMA PULAU</b>	<b>BUJUR</b>	<b>LINTANG</b>	<b>KETERANGAN</b>
70.	Pulau Kaniungan Kecil	118°52'41.390" T	1°9'12.960" U	TBP
71.	Pulau Kanyuran	117°30'18.170" T	0°48'25.020" S	
72.	Pulau Karan	115°26'59.830" T	0°15'6.680" U	TBP
73.	Pulau Karangansirau	115°30'13.740" T	0°12'40.770" U	TBP
74.	Pulau Karangkiampau	117°31'27.990" T	0°11'6.000" U	TBP
75.	Pulau Kayumajarang	117°30'36.000" T	0°40'48.000" S	TBP
76.	Pulau Kedindingan Barat	117°32'44.000" T	0°5'2.000" U	TBP
77.	Pulau Kedindingan Tengah	117°33'32.740" T	0°4'47.700" U	TBP
78.	Pulau Kedindingan Timur	117°33'40.420" T	0°5'19.350" U	TBP
79.	Pulau Kedindingan Utara	117°33'15.990" T	0°5'3.990" U	TBP
80.	Pulau Kedumpit	116°45'18.000" T	1°10'14.990" S	TBP
81.	Pulau Kedumpit Barat	116°44'42.000" T	1°10'9.990" S	TBP
82.	Pulau Kedumpit Tengah	116°44'48.730" T	1°10'17.030" S	TBP
83.	Pulau Kedumpit Timur	116°44'54.660" T	1°10'19.840" S	TBP
84.	Pulau Kelambu	117°19'34.210" T	0°43'37.290" S	TBP
85.	Pulau Kelawasan	116°43'49.000" T	1°6'24.000" S	TBP
86.	Pulau Kelelawar	117°52'41.350" T	2°9'24.780" U	
87.	Pulau Kemantis	116°44'44.990" T	1°4'27.000" S	TBP
88.	Pulau Keramat	115°31'3.680" T	0°10'19.100" U	TBP
89.	Pulau Kerbau	117°18'36.000" T	0°45'36.000" S	TBP
90.	Pulau Kobe	117°31'12.300" T	0°47'59.690" S	BP
91.	Pulau Kokok	118°39'6.990" T	2°13'13.000" U	TBP
92.	Pulau Kualan	115°33'26.070" T	0°2'16.990" U	TBP
93.	Pulau Kumala	117°31'42.770" T	0°25'24.870" S	BP
94.	Pulau Kwangan	116°44'37.970" T	1°8'52.000" S	TBP
95.	Pulau Labaanbilik	118°46'55.530" T	0°48'15.060" U	TBP
96.	Pulau Labatan	118°35'32.420" T	2°15'58.990" U	TBP
97.	Pulau Labulabu	118°7'53.000" T	2°19'58.000" U	TBP
98.	Pulau Laham	115°23'58.870" T	0°21'0.340" U	TBP
99.	Pulau Lakitkuhita	118°38'15.830" T	2°14'57.940" U	TBP
100.	Pulau Lalawan	117°48'39.670" T	2°6'2.780" U	TBP
101.	Pulau Lalukena	117°24'36.000" T	0°44'24.000" S	TBP
102.	Pulau Lantang Kecil	117°30'26.120" T	0°26'53.770" S	TBP
103.	Pulau Layangan	117°16'0.540" T	0°51'6.810" S	TBP
104.	Pulau Layangan Dua	117°16'48.110" T	0°49'39.030" S	
105.	Pulau Layangan Empat	117°16'16.630" T	0°52'0.340" S	
106.	Pulau Layangan Satu	117°16'39.150" T	0°48'33.440" S	
107.	Pulau Layangan Tiga	117°16'6.560" T	0°50'2.470" S	
108.	Pulau Lerong	117°28'48.000" T	0°25'12.000" S	TBP
109.	Pulau Letung	117°28'12.500" T	0°22'47.830" S	TBP
110.	Pulau Lipan	116°43'34.930" T	1°6'37.760" S	TBP

<b>NO</b>	<b>NAMA PULAU</b>	<b>BUJUR</b>	<b>LINTANG</b>	<b>KETERANGAN</b>
111.	Pulau Liuqkarau	115°24'15.000" T	0°16'32.000" U	TBP
112.	Pulau Lungsurannaga	117°48'30.510" T	2°4'41.440" U	TBP
113.	Pulau Manambula	118°11'39.990" T	2°22'23.000" U	TBP
114.	Pulau Mangkubur	117°25'59.990" T	0°41'40.920" S	
115.	Pulau Manimbora	118°32'1.020" T	1°28'1.240" U	TBP
116.	Pulau Maratua	118°36'25.990" T	2°11'26.990" U	BP (PPKT)
117.	Pulau Mataha	118°54'29.000" T	1°31'10.990" U	TBP
118.	Pulau Melaham	115°17'5.530" T	0°27'24.490" U	TBP
119.	Pulau Melahing	117°32'12.990" T	0°6'32.000" U	TBP
120.	Pulau Merah	115°25'38.360" T	0°22'57.850" U	TBP
121.	Pulau Merayap	116°27'20.000" T	2°9'37.000" S	BP
122.	Pulau Merdeka	117°15'24.090" T	0°49'44.540" S	TBP
123.	Pulau Merdeka Selatan	117°15'35.060" T	0°52'7.660" S	TBP
124.	Pulau Merdeka Tengah	117°15'27.790" T	0°50'56.110" S	TBP
125.	Pulau Merdeka Utara	117°15'27.620" T	0°50'28.910" S	TBP
126.	Pulau Miang	117°20'24.000" T	0°35'24.000" S	
127.	Pulau Miang	117°21'1.190" T	0°35'11.640" S	
128.	Pulau Miang Besar	118°0'36.830" T	0°43'44.170" U	BP
129.	Pulau Miang Kecil	118°2'34.170" T	0°46'35.170" U	TBP
130.	Pulau Muara Ulu Besar	117°23'49.580" T	0°51'32.110" S	
131.	Pulau Muara Ulu Biccuc	117°23'52.360" T	0°51'48.300" S	
132.	Pulau Muaraulu	117°22'12.000" T	0°52'12.000" S	TBP
133.	Pulau Nakal	117°46'44.000" T	2°6'36.000" U	TBP
134.	Pulau Nibung	117°19'48.000" T	0°46'12.000" S	TBP
135.	Pulau Nibung Kecil	117°20'8.270" T	0°46'7.730" S	
136.	Pulau Nubi	117°30'36.000" T	0°42'0.000" S	TBP
137.	Pulau Pabahanan	118°37'50.900" T	2°14'12.990" U	TBP
138.	Pulau Padai	117°39'47.910" T	2°4'22.130" U	TBP
139.	Pulau Pagat	117°15'28.060" T	0°50'38.190" S	
140.	Pulau Panalukang	115°24'9.000" T	0°25'23.990" U	TBP
141.	Pulau Panjang	118°12'25.770" T	2°22'4.080" U	TBP
142.	Pulau Panjang	117°31'4.730" T	0°3'51.790" U	
143.	Pulau Panjang Dua	117°56'6.510" T	1°2'33.460" U	TBP
144.	Pulau Panjang Satu	118°55'1.990" T	0°54'11.000" U	TBP
145.	Pulau Patin	117°22'48.000" T	0°34'12.000" S	TBP
146.	Pulau Patin	117°22'57.270" T	0°34'24.870" S	
147.	Pulau Payau	117°16'27.000" T	2°7'9.000" U	TBP
148.	Pulau Peapea	118°36'28.000" T	2°11'17.000" U	BP
149.	Pulau Pegah	117°17'19.460" T	0°46'46.580" S	TBP
150.	Pulau Pemantuan	117°54'50.690" T	1°6'7.360" U	TBP
151.	Pulau Penti	117°26'24.000" T	0°46'48.000" S	TBP

<b>NO</b>	<b>NAMA PULAU</b>	<b>BUJUR</b>	<b>LINTANG</b>	<b>KETERANGAN</b>
152.	Pulau Perangatan	117°32'49.990" T	0°38'3.990" S	TBP
153.	Pulau Perangatan Besar	117°21'0.000" T	0°50'24.000" S	TBP
154.	Pulau Perangatan Kecil	117°20'24.000" T	0°53'24.000" S	TBP
155.	Pulau Pesayan	117°38'49.730" T	2°4'55.400" U	
156.	Pulau Peti	117°57'53.690" T	1°2'5.770" U	TBP
157.	Pulau Posa	116°49'14.000" T	1°11'43.000" S	TBP
158.	Pulau Prangatan Besar Dua	117°20'57.910" T	0°47'44.780" S	
159.	Pulau Prangatan Besar Empat	117°22'4.120" T	0°49'41.290" S	
160.	Pulau Prangatan Besar Satu	117°20'21.950" T	0°46'52.020" S	
161.	Pulau Prangatan Besar Tiga	117°21'38.760" T	0°48'45.330" S	
162.	Pulau Pusa	117°30'36.220" T	0°44'59.320" S	BP
163.	Pulau Radak	117°51'22.360" T	1°55'41.100" U	
164.	Pulau Rambairangas	117°20'56.230" T	0°46'22.620" S	TBP
165.	Pulau Rampien	117°19'45.420" T	2°6'9.000" U	TBP
166.	Pulau Rantau Besar	116°16'29.770" T	1°54'17.770" S	BP
167.	Pulau Rantau Kecil	116°13'58.670" T	1°55'1.770" S	BP
168.	Pulau Rapak	117°55'55.230" T	1°3'3.300" U	TBP
169.	Pulau Rinding	118°1'17.000" T	0°53'23.020" U	BP
170.	Pulau Saketa	117°50'11.340" T	1°58'37.200" U	
171.	Pulau Samama	118°19'44.000" T	2°7'57.000" U	TBP
172.	Pulau Sambit	119°2'10.840" T	1°46'50.190" U	BP (PPKT)
173.	Pulau Sangalaki	118°23'58.990" T	2°5'8.000" U	TBP
174.	Pulau Sangalan Diki	118°38'51.630" T	2°13'35.370" U	TBP
175.	Pulau Sangalan Hea	118°38'39.990" T	2°13'52.000" U	TBP
176.	Pulau Sebenah	115°16'14.000" T	0°28'23.000" U	TBP
177.	Pulau Segajah	117°33'31.970" T	0°9'5.860" U	
178.	Pulau Seleteh	117°30'1.350" T	0°30'59.340" S	TBP
179.	Pulau Seleteh Kecil	117°29'40.910" T	0°31'9.900" S	TBP
180.	Pulau Selokia Dalam	117°30'29.810" T	0°11'20.230" U	
181.	Pulau Selumut	116°42'43.990" T	1°8'8.000" S	TBP
182.	Pulau Semut	118°35'1.000" T	2°15'59.000" U	TBP
183.	Pulau Sengkuang	117°57'38.000" T	1°1'21.000" U	BP
184.	Pulau Sentubung	118°39'10.000" T	2°13'5.990" U	TBP
185.	Pulau Senumpak	118°0'4.000" T	0°55'5.000" U	BP
186.	Pulau Sepinggan	117°21'29.700" T	0°40'10.830" S	TBP
187.	Pulau Sera	116°42'3.650" T	1°12'13.600" S	TBP
188.	Pulau Serai	118°0'47.990" T	0°54'25.990" U	TBP
189.	Pulau Seribu	117°27'53.060" T	0°32'34.320" S	
190.	Pulau Seribu	117°29'51.490" T	0°32'16.700" S	
191.	Pulau Seribu	117°31'22.340" T	0°31'4.630" S	
192.	Pulau Seribu	117°53'57.060" T	1°4'40.780" U	TBP

<b>NO</b>	<b>NAMA PULAU</b>	<b>BUJUR</b>	<b>LINTANG</b>	<b>KETERANGAN</b>
193.	Pulau Seribu	117°54'34.580" T	1°4'44.220" U	
194.	Pulau Serundung	117°34'56.670" T	2°11'33.000" U	TBP
195.	Pulau Siacca	117°29'31.340" T	0°4'4.590" U	
196.	Pulau Sialod	118°35'55.000" T	2°15'29.000" U	TBP
197.	Pulau Siappung	118°35'28.380" T	2°15'43.990" U	TBP
198.	Pulau Sibela	118°35'40.770" T	2°15'46.390" U	TBP
199.	Pulau Sibilambay	118°36'1.380" T	2°16'46.590" U	TBP
200.	Pulau Siddau	118°35'39.710" T	2°15'29.990" U	TBP
201.	Pulau Sigending Besar	118°46'48.000" T	1°8'39.990" U	TBP
202.	Pulau Sigending Kecil	118°47'26.990" T	1°7'49.000" U	TBP
203.	Pulau Simanik	118°4'29.800" T	2°20'2.380" U	TBP
204.	Pulau Sitoddo	118°54'11.990" T	0°53'17.990" U	TBP
205.	Pulau Sodang Besar	117°45'33.000" T	2°8'3.990" U	
206.	Pulau Sungaikelambu	117°21'41.130" T	0°39'21.820" S	
207.	Pulau Talisapan	118°46'35.000" T	1°8'10.000" U	TBP
208.	Pulau Tambora	117°23'50.570" T	0°34'30.040" S	TBP
209.	Pulau Tambora	117°26'33.500" T	0°38'45.130" S	TBP
210.	Pulau Tangkapaan	118°33'31.000" T	1°22'18.990" U	TBP
211.	Pulau Tani Baru Tengah	117°33'33.420" T	0°31'27.590" S	
212.	Pulau Tanjung Aju	117°35'39.300" T	0°28'51.560" S	
213.	Pulau Tanjung Harapan	117°29'53.130" T	0°47'43.690" S	
214.	Pulau Tanjung Pamerung	117°25'40.140" T	0°52'29.150" S	
215.	Pulau Tanjung Pimping	117°31'49.050" T	0°27'1.350" S	
216.	Pulau Tanjungbuayabuaya	118°29'40.990" T	1°24'7.990" U	TBP
217.	Pulau Tanjungdewa	117°19'9.030" T	0°39'30.690" S	TBP
218.	Pulau Tanjungsitibba	118°43'4.000" T	0°49'1.990" U	TBP
219.	Pulau Telasau	117°44'31.990" T	2°10'41.000" U	TBP
220.	Pulau Telukgenting	117°29'0.540" T	0°35'29.960" S	TBP
221.	Pulau Tempurung	117°51'23.000" T	2°10'32.990" U	TBP
222.	Pulau Tempurung	117°59'27.670" T	0°55'58.210" U	TBP
223.	Pulau Tidung	117°53'5.020" T	2°11'3.310" U	TBP
224.	Pulau Tiga	115°11'47.830" T	0°32'5.730" U	TBP
225.	Pulau Tiga Selatan	117°28'12.000" T	0°46'12.000" S	BP
226.	Pulau Tiga Tengah	117°26'21.020" T	0°44'28.810" S	TBP
227.	Pulau Tiga Utara	117°26'13.910" T	0°44'14.930" S	TBP
228.	Pulau Tihikihik	117°31'40.000" T	0°3'59.000" U	TBP
229.	Pulau Timbangbarukang	117°28'48.000" T	0°49'48.000" S	TBP
230.	Pulau Tukung	116°48'16.010" T	1°16'28.110" S	TBP
231.	Pulau Tunu	117°33'47.800" T	0°30'3.780" S	TBP
232.	Pulau Ujohbilang	115°14'49.990" T	0°30'47.990" U	TBP
233.	Pulau Uraban	118°31'53.370" T	1°23'29.660" U	TBP

NO	NAMA PULAU	BUJUR	LINTANG	KETERANGAN
234.	Pulau Using	116°49'53.000" T	1°12'28.000" S	TBP
235.	Pulau Yupa	117°4'4.910" T	0°20'12.190" S	TBP
236.	Pulau Baru Ilir	116°42'39.590" T	1°7'35.380" S	TBP (WIL.IKN)
237.	Pulau Baru Ulu	116°42'28.980" T	1°7'19.990" S	TBP (WIL.IKN)
238.	Pulau Batupayau	116°43'5.120" T	1°5'52.430" S	TBP (WIL.IKN)
239.	Pulau Benawa Besar	116°43'36.000" T	1°5'13.990" S	TBP (WIL.IKN)
240.	Pulau Cempa	116°42'56.000" T	1°7'36.190" S	TBP (WIL.IKN)
241.	Pulau Jawang	116°44'30.990" T	1°1'21.000" S	TBP (WIL.IKN)
242.	Pulau Maridan	116°42'33.990" T	1°7'44.000" S	TBP (WIL.IKN)
243.	Pulau Sabut	116°43'36.990" T	1°2'49.370" S	TBP (WIL.IKN)
	<b>JUMLAH PULAU</b>		<b>243</b>	

Keterangan:

BP : Berpenghuni  
TBP : Tidak Berpenghuni  
PPKT : Pulau-Pulau Kecil Terluar  
WIL.IKN : Wilayah Ibu Kota Nusantara

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

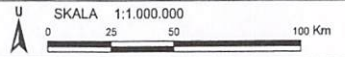
  
3  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

**PETA CAKUPAN WILAYAH  
RTRW PROVINSI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Ibu Kota Pemerintahan</li> <li>● Ibu Kota Kabupaten/Kota</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Batas Administrasi</li> <li>--- Batas Negara</li> <li>--- Batas Provinsi</li> <li>--- Batas Kabupaten/Kota</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Perairan</li> <li>— Garis Pantai</li> <li>— Garis Pantai Rencana</li> <li>— Badan Air</li> </ul> |
|--|--|---|

CAKUPAN WILAYAH

Cakupan Wilayah RTRWP Kalimantan Timur

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
  
 SUPARMI  
NIR 19690512 198903 2 009

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
2. Peta RZWP-3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

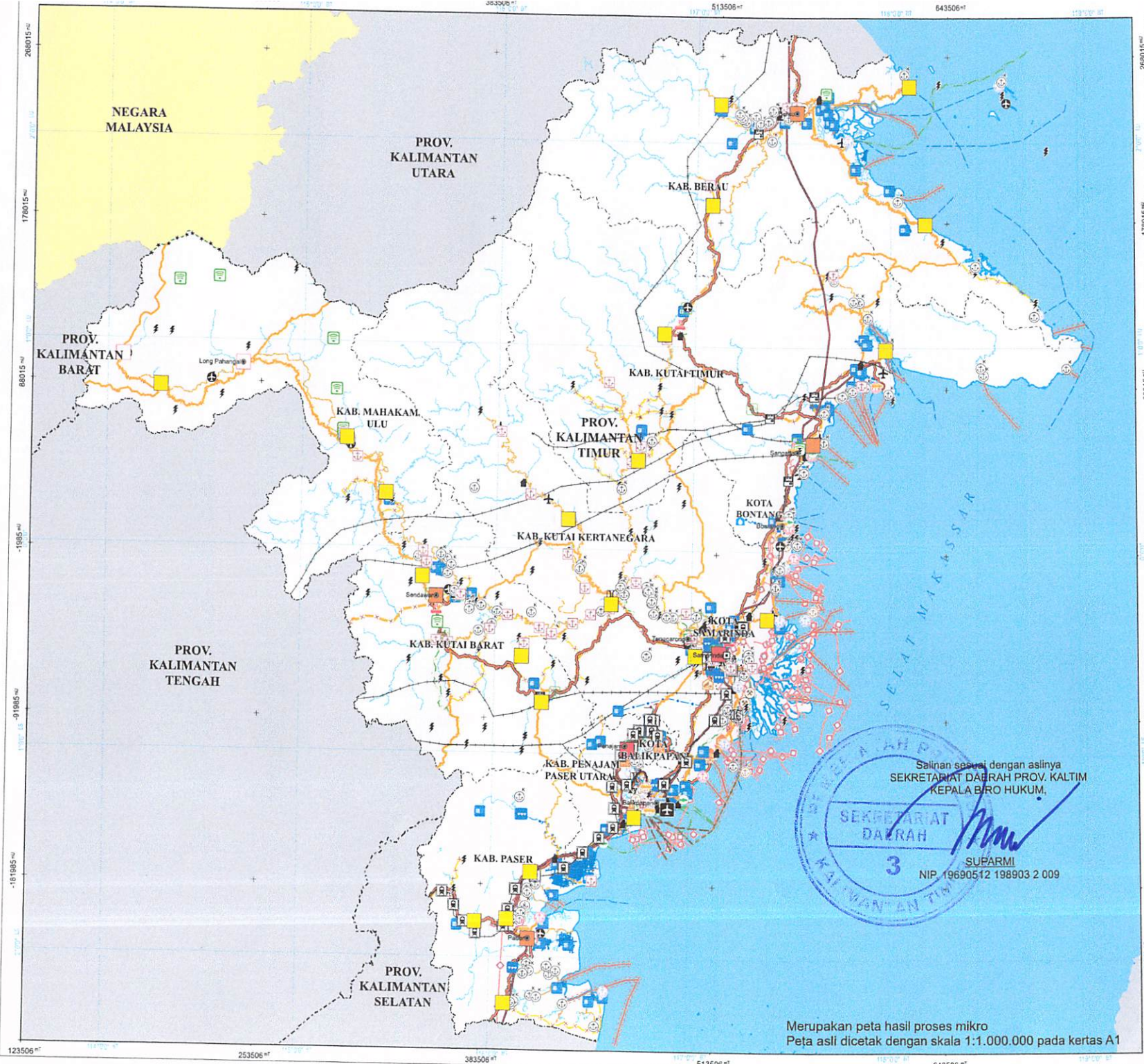
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

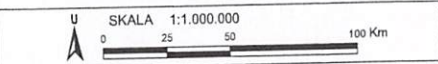
ISRAN NOOR

Merupakan peta hasil proses mikro  
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1




**PERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**  
 Ibukota Pemerintahan : Kota Provinsi  
 Ibu Kota Kabupaten/Kota : Kota Kabupaten/Kota  
 Batas Administrasi : Batas Negara  
 Batas Provinsi : Batas Kabupaten/Kota  
 Batas Air : Garis Pantai  
 Garis Pantai Rencana : Badan Air

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Sistem Pusat Permukiman**
- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
  - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
  - Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Sistem Jaringan Transportasi Darat**
- Terminal Penumpang Tipe A
  - Terminal Penumpang Tipe B
  - Terminal Barang
  - Jembatan
  - Jembatan Timbang
  - Stasiun Kereta Api
  - Pelabuhan Sungai dan Danau
  - Pelabuhan Persebaran
  - Jalan Tol
  - Jalan Arteri Primer
  - Jalan Kolektor Primer
  - Jaringan Jalur Kereta Api
  - Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau
- Sistem Jaringan Transportasi Udara**
- Bandar Udara Pengumpul
  - Bandar Udara Pengumpungan
  - Bandar Udara Khusus
- Sistem Jaringan Energi**
- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
  - Infrastruktur Pembangunan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
  - Garis Listrik
  - Jaringan Minyak dan Gas Bumi
  - Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
  - Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarmantan
- Sistem Jaringan Telekomunikasi**
- Infrastruktur Jaringan Tetap
  - Jaringan Bergerak
  - Jaringan Tetap
- Sistem Jaringan Sumber Daya Air**
- Bangunan Sumber Daya Air
  - Bangunan Pengendalian Banjir
  - Sistem Jaringan Irigasi
  - Jaringan Pengendalian Banjir
- Sistem Jaringan Persebaran Lainnya**
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
  - Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
  - Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
  - Sistem Jaringan Panserapan
  - Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
  - Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Transportasi Laut**
- Pelabuhan Utama
  - Pelabuhan Pengumpul
  - Pangkalan Pandaratan Ikan
  - Terminal Umum
  - Terminal Khusus
- Sistem Jaringan Antarprovinsi**
- Lintas Penyelubungan Antarprovinsi
  - Lintas Penyelubungan Antarkecamatan/Kota dalam Provinsi

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRU HUKUM,  
  
**SUPARMI**  
 NIP. 19690512 198903 2 009

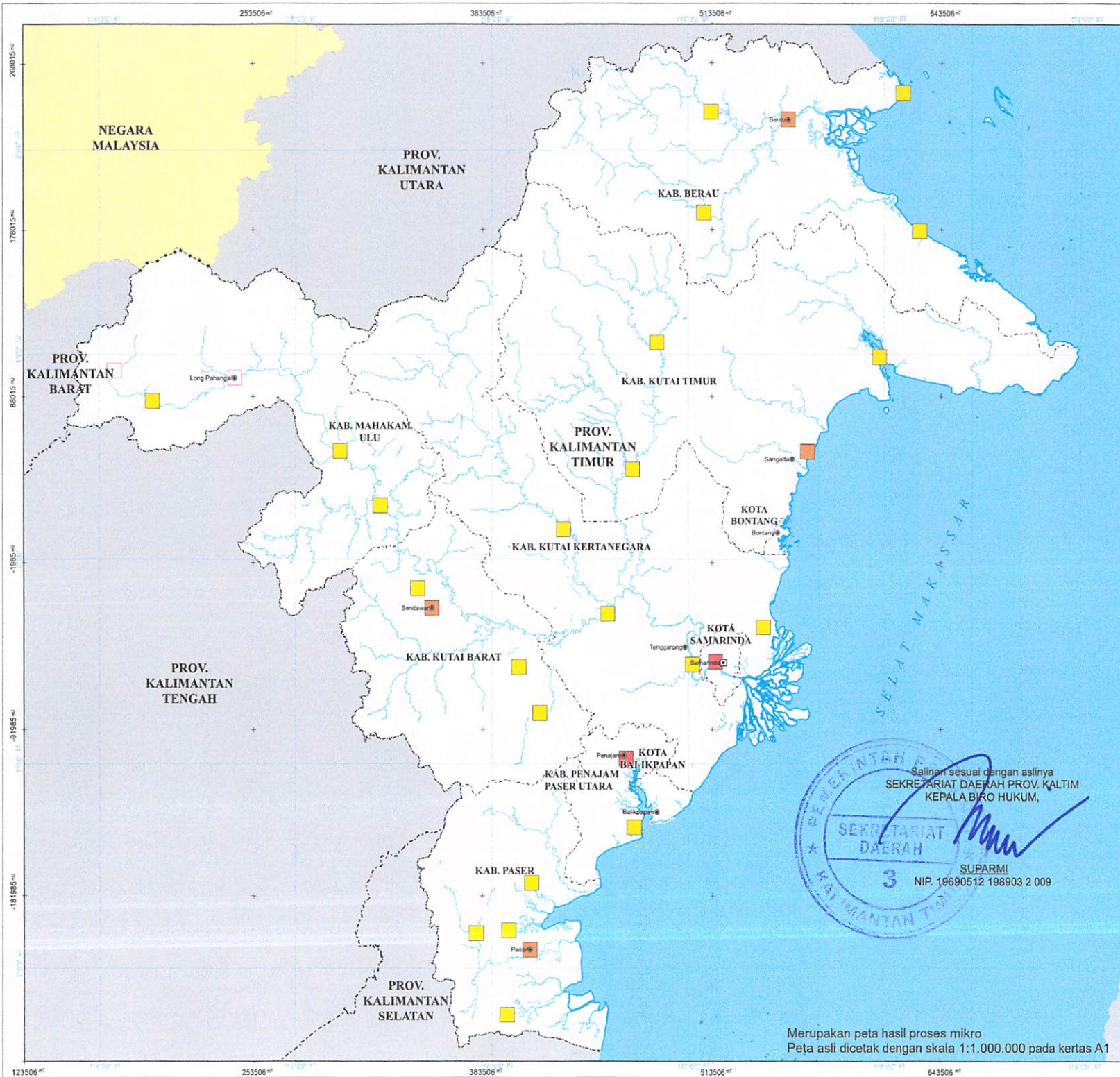
**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
 2. Peta RZWPJK Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,  
 ttd  
**ISRAN NOOR**

Merupakan peta hasil proses mikro  
 Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1





PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042  
**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**

SKALA 1:1.000.000  
0 25 50 100 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- |                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Ibukota Pemerintahan    | Batas Administrasi   | Peraliran            |
| Ibu Kota Provinsi       | Batas Negara         | Garis Pantai         |
| Ibu Kota Kabupaten/Kota | Batas Provinsi       | Garis Pantai Rencana |
|                         | Batas Kabupaten/Kota | Badan Air            |

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
  - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
  - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
  - Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA.  
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 Bkt tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2016 dan 2019  
2. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

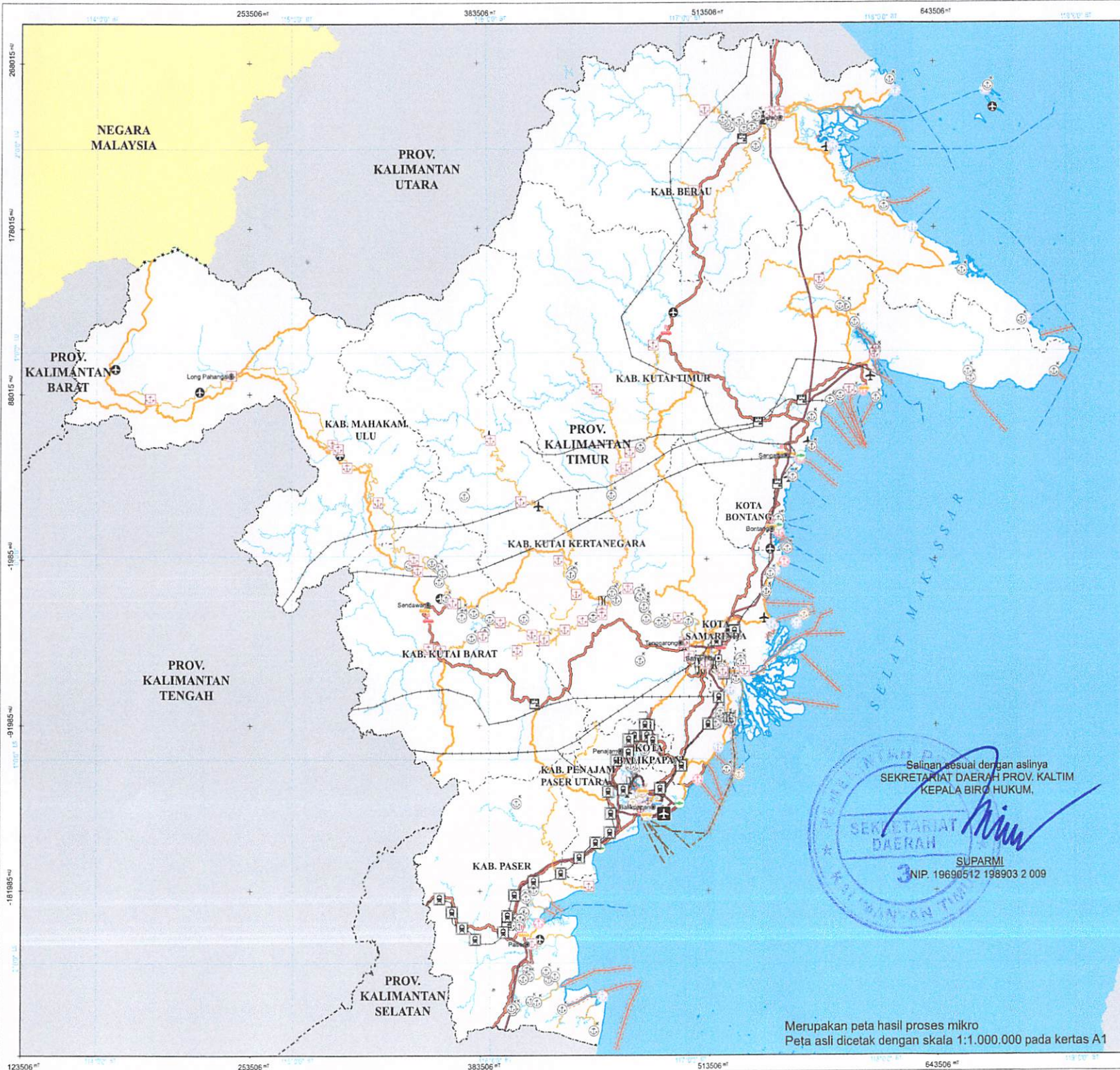
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

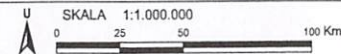
Merupakan peta hasil proses mikro  
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



**PEREMPTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

**LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

<b>Ikubota Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>	<b>Peraliran</b>
□ Ibu Kota Provinsi	◆ - ◆ Batas Negara	— Garis Pantai
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Provinsi	--- Garis Pantai Rencana
	--- Batas Kabupaten/Kota	■ Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

<b>Sistem Jaringan Transportasi</b>	<b>Transportasi Udara</b>
<b>Transportasi Darat</b>	✈ Bandar Udara Pengumpul
— Terminal Penumpang Tipe A	✈ Bandar Udara Pengumpang
— Terminal Penumpang Tipe B	✈ Bandar Udara Khusus
— Terminal Barang	
<b>Jembatan</b>	<b>Transportasi Laut</b>
— Jembatan Timbang	— Pelabuhan Utama
— Stasiun Kereta Api	— Pelabuhan Pengumpul
— Pelabuhan Sungai dan Danau	— Pelabuhan Pengumpang
— Pelabuhan Penyeberangan	— Pangkalan Pendaratan Run
— Jalan Tol	— Terminal Umum
— Jalan Arteri Primer	— Terminal Khusus
— Jalan Kolektor Primer	— Alur-Pelayaran Umum dan Parkirnaan
— Jaringan Jalur Kereta Api	— Alur-Pelayaran Khusus
— Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	
— Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	
— Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota	
— Lintas Penyeberangan Antarkecamatan/Kota	
— Lintas Penyeberangan Kecamatan	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

*Suparmi*  
**SUPARMI**  
NIP. 19690512 198903 2 009

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
2. Peta RZWP-3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

Merupakan peta hasil proses mikro  
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN  
2023-2042

**INFRASTRUKTUR PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DAN SARANA  
PENDUKUNGNYA**

I. PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG SUDAH ADA

JENIS PEMBANGKIT	NAMA PEMBANGKIT	KABUPATEN/ KOTA
Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	PLTG Kaltim <i>Peaking</i>	Kutai Kartanegara
	PLTG Sambera	Kutai Kartanegara
	PLTG Senipah (ST)	IKN
	PLTG Senipah	IKN
Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)	PLTGU Tanjung Batu	Kutai Kartanegara
Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)	PLTMG Kaltimex	Kutai Kartanegara
	PLTMG SW Petung (PT. Benuo Taka Energy)	Penajam Paser Utara
	PLTMG Belimbing	Bontang
	PLTMG Bontang	Bontang
	PLTMG MPP Kaltim	Bontang
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	PLTU Rimba Raya	Kutai Kartanegara
	PLTU Embalut	Kutai Kartanegara
	PLTU Sumalindo	Kutai Kartanegara
	PLTU PT. Kalimantan <i>Power Indo</i>	Kutai Kartanegara
	PLTU Kaltim 4	Kutai Kartanegara
	PLTU Lati	Berau
	PLTU Tanjung Redeb/Teluk Bayur	Berau

JENIS PEMBANGKIT	NAMA PEMBANGKIT	KABUPATEN/ KOTA
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	PLTU Sangatta (PT. Kaltim Prima Coal) Ex Sektor Mahakam	Kutai Timur
	PLTU Kariangau Power	Balikpapan
	PLTU Kaltim/Teluk Balikpapan (FTP1)	Balikpapan
	PLTU Mangkujenang	Samarinda
	PLTU Senoni	Samarinda
	PLTU Kaltim (FTP 2)	Bontang
	PLTU PT. Kaltim Daya Mandiri	Bontang
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	PLTS Terpusat Long Sayo	Paser
	PLTS Komunal Muara Enggelam Muara Wis)	Kutai Kartanegara
	PLTS Derawan	Berau
	PLTS Terpusat Maratua Teluk Harapan	Berau
	PLTS Terpusat Maratua Bohesilian	Berau
	PLTS Bandar Udara Kalimantan	Berau
	PLTS Manaar Bulatn	Kutai Barat
	PLTS Tering	Kutai Barat
	PLTS Terpusat Pulau Miang	Kutai Timur
	PLTS Terpusat Long Lunuk	Mahakam Ulu
	PLTS Terpusat Long Pahangai	Mahakam Ulu
	PLTS Terpusat Long Pananeh	Mahakam Ulu
	PLTS Terpusat Long Apari dan Naha Tivab	Mahakam Ulu
	PLTS Long Ampung	Mahakam Ulu
	PLTS Gusung	Bontang
	PLTS Loktunggul	Bontang
	PLTS Melahing	Bontang
	PLTS Selangan	Bontang
	PLTS Tihi-Tihi	Bontang
Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid	PLT Hybrid Tiong Ohang	Mahakam Ulu
Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)	PLTBm Talisayan DL	Berau
	PLTBm Gunung Sari HHM	Berau
	PLTBm Karangany DL	Kutai Timur
	PLTBm PT Daya Lestari (Muara Bengkal)	Kutai Timur
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	PLTMH Beno Harapan	Kutai Timur
	PLTMH Juwata	Kutai Timur
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Batu Sopang	Paser
	PLTD Kerang	Paser
	PLTD Long Ikis	Paser

<b>JENIS PEMBANGKIT</b>	<b>NAMA PEMBANGKIT</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>
	PLTD Muara Komam	Paser
	PLTD Tanah Grogot	Paser
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Jantur	Kutai Kartanegara
	PLTD Kahala	Kutai Kartanegara
	PLTD Muara Aloh	Kutai Kartanegara
	PLTD Muara Siran	Kutai Kartanegara
	PLTD Semayang	Kutai Kartanegara
	PLTD Muara Muntai	Kutai Kartanegara
	PLTD Perangat	Kutai Kartanegara
	PLTD Sebuntal	Kutai Kartanegara
	PLTD Tabang	Kutai Kartanegara
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Batu Putih	Berau
	PLTD Biduk-Biduk	Berau
	PLTD Gunung Sari	Berau
	PLTD Derawan	Berau
	PLTD Sambaliung	Berau
	PLTD Talisayan	Berau
	PLTD Tanjung Batu	Berau
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Kelumpang	Kutai Barat
	PLTD Long Iram	Kutai Barat
	PLTD Muara Pahu	Kutai Barat
	PLTD Muara Kedang	Kutai Barat
	PLTD Penyinggahan	Kutai Barat
	PLTD Sendawar	Kutai Barat
	PLTD Tabisaq	Kutai Barat
	PLTD Tanjung Isuy	Kutai Barat
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Batu Ampar	Kutai Timur
	PLTD Gemar Baru	Kutai Timur
	PLTD Long Segar	Kutai Timur
	PLTD Muara Bengkal	Kutai Timur
	PLTD Muara Wahau	Kutai Timur
	PLTD Sangata	Kutai Timur
	PLTD Sangkulirang	Kutai Timur
	PLTD Senyiur	Kutai Timur
	PLTD Sepaso	Kutai Timur
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Jenebora/Gresik	Penajam Paser Utara
	PLTD Petung	Penajam Paser Utara
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Batakan	Balikpapan
	PLTD Gunung Malang	Balikpapan
	PLTD CDE Karang Joang (MFO)	Balikpapan
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Karang Asam	Samarinda
	PLTD Kledang	Samarinda

II. RENCANA PENINGKATAN PLTD MENJADI PLTS

JENIS PEMBANGKIT	NAMA PEMBANGKIT	KABUPATEN/ KOTA
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	PLTD/S Tanjung Aru	Paser
	PLTD/S Muara Pantuan	Kutai Kartanegara
	PLTD/S Sedulang	Kutai Kartanegara
	PLTD/S Dilang Putih	Kutai Barat
	PLTD/S Karang Dalam	Kutai Timur
	PLTD/S Datah Bilang	Mahakam Ulu
	PLTD/S Long Apari	Mahakam Ulu
	PLTD/S Long Bagun	Mahakam Ulu
	PLTD/S Long Pahangai	Mahakam Ulu

III. RENCANA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

NO	JENIS PEMBANGKIT	NAMA PEMBANGKIT	KAPASITAS (MW)	PENGEMBA NG	TAHUN	KABUPATEN /KOTA
1	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	PLTS Muara Jawa				Kutai Kartanegara
		PLTS Loa Kulu				Kutai Kartanegara
		PLTS Komunal Sepatin				Kutai Kartanegara
		PLTS Komunal Muara Jawa				Kutai Kartanegara
		PLTS Komunal Tunjungan Muara Kaman				Kutai Kartanegara
		PLTS Komunal Lamin Telihan Kenohan				Kutai Kartanegara
		PLTS Komunal Kupang Baru Muara Kaman				Kutai Kartanegara
		PLTS Komunal Liang Buaya Muara Kaman				Kutai Kartanegara
		PLTS Komunal Menamang Kanan Muara Kaman				Kutai Kartanegara
		PLTS Komunal Menamang Kiri Muara Kaman				Kutai Kartanegara
		PLTS Komunal				Kutai Kartanegara
		PLTS Bentian Besar				Kutai Barat
		PLTS Bongon				Kutai Barat
		PLTS Jempang				Kutai Barat
		PLTS Manaar Bulatn				Kutai Barat
		PLTS Muara Pahu				Kutai Barat
PLTS Nyuatan				Kutai Barat		
PLTS Siluq Ngurai				Kutai Barat		
2	Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)	PLTBm PT. Mega Prima Persada	20	PT. Mega prima		Kutai Kartanegara

NO	JENIS PEMBANGKIT	NAMA PEMBANGKIT	KAPASITAS (MW)	PENGELOMPOKAN	TAHUN	KABUPATEN /KOTA
				Persada		
3	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	PLTA Tabang	90	PLN	2028	Kutai Kartanegara
		PLTA Tabang	240			Kutai Kartanegara
4	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	PLTMH Bongan				Kutai Barat
		PLTMH Damai				Kutai Barat
		PLTMH Linggang Bigung				Kutai Barat
		PLTMH Long Iram				Kutai Barat
		PLTMH Nyuatan				Kutai Barat
		PLTMH Siluq Ngurai				Kutai Barat
		PLTMH Bentian Besar				Kutai Barat

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SEKRETARIAT DAERAH  
KALIMANTAN TIMUR  
3

SUPARMI

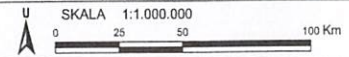
NIP. 19690512 198903 2 009



PEREMPTORIAN  
KALIMANTAN TIMUR

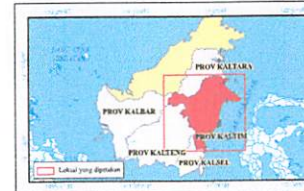
LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
SISTEM JARINGAN ENERGI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

<b>Ibukota Pemerintahan</b> □ Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kabupaten/Kota	<b>Batas Administrasi</b> - - - - - Batas Negara - - - - - Batas Provinsi - - - - - Batas Kabupaten/Kota	<b>Perairan</b> ~ Garis Pantai ~ Garis Pantai Rencana ~ Badan Air
---	---	--

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

Sistem Infrastruktur Energi  
 ⊕ Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi  
 ⊕ Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung  
 ⊕ Gardu Listrik  
 ⊕ Jaringan Minyak dan Gas Bumi  
 ⊕ Jaringan Distribusi Tenaga Listrik  
 ⊕ Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,  
 SUPARMI  
 NIP. 19690512 198903 2 009

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
 1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
 2. Peta RZWP-3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

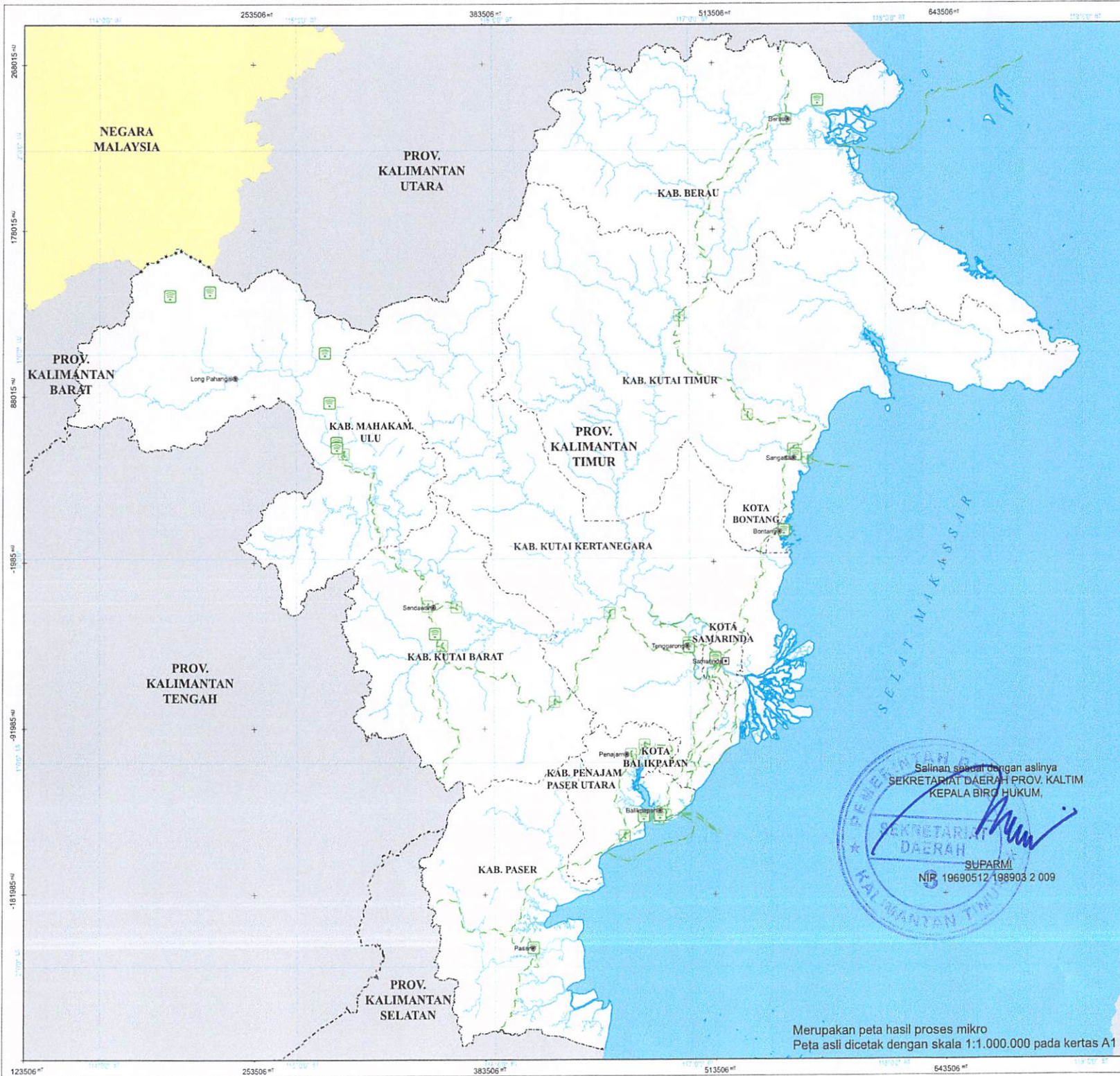
Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

Merupakan peta hasil proses mikro  
 Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1





**PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

U SKALA 1:1.000.000  
0 25 50 100 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

- |                         |                |                      |
|-------------------------|----------------|----------------------|
| Ibu Kota Provinsi       | Batas Negara   | Garis Pantai         |
| Ibu Kota Kabupaten/Kota | Batas Provinsi | Garis Pantai Rencana |
| Batas Kabupaten/Kota    | Badan Air      |                      |

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

- Beragam Infrastruktur Telekomunikasi
- Indikator Jaringan Tetap
  - Jaringan Bergerak
  - Jaringan Tetap

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
2. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

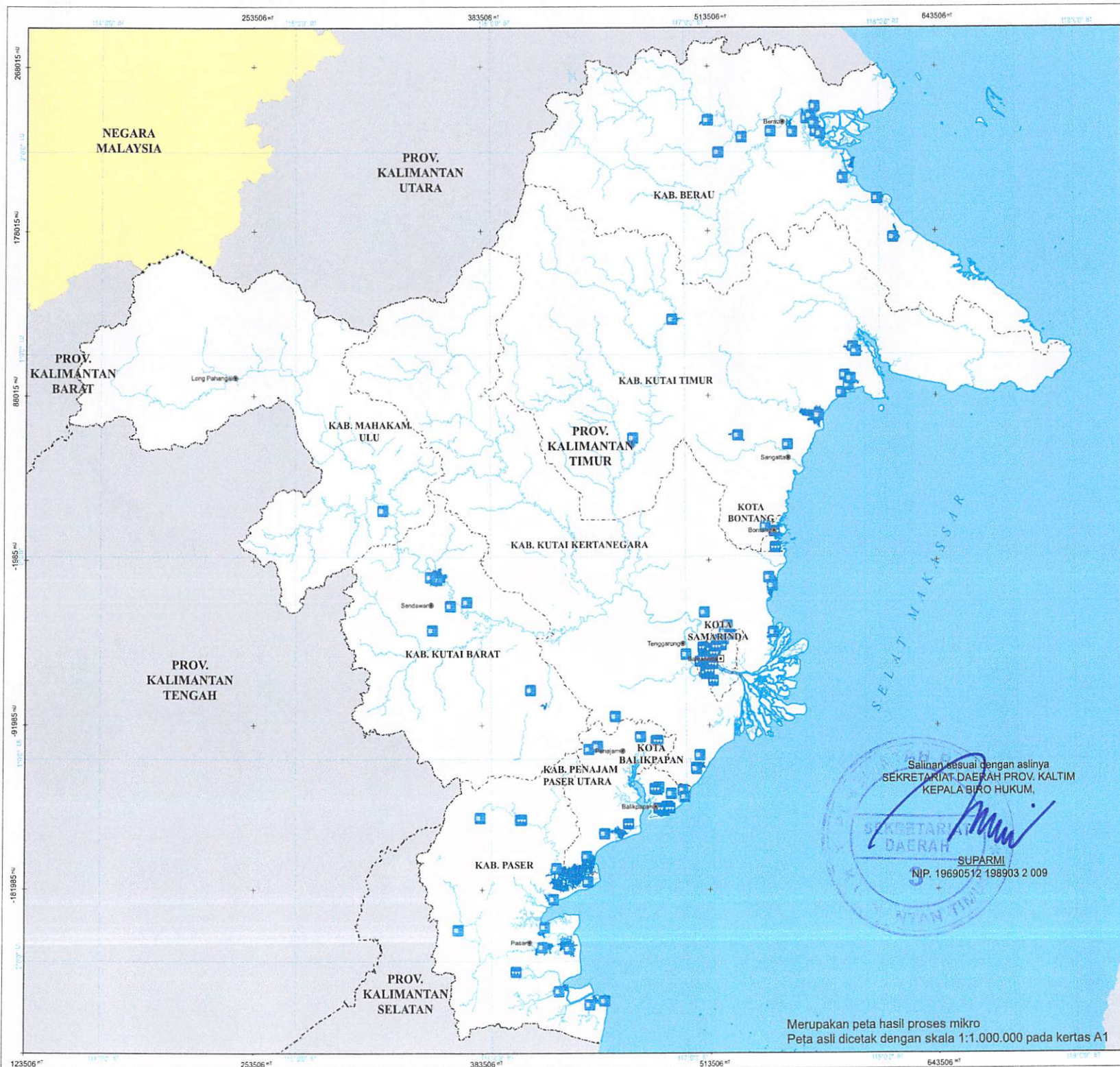
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

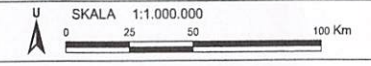
Merupakan peta hasil proses mikro  
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



**PEREMPTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

**LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

- |                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Ibu Kota Provinsi       | Batas Administrasi   | Perairan             |
| Ibu Kota Kabupaten/Kota | Batas Negara         | Garis Pantai         |
| Kota                    | Batas Provinsi       | Garis Pantai Rencana |
| Kota                    | Batas Kabupaten/Kota | Badan Air            |
- RENCANA STRUKTUR RUANG**  
Sistem Infrastruktur Sumber Daya Air
- Bangunan Sumber Daya Air
  - Bangunan Pengendalian Banjir
  - Sistem Jaringan Irigasi
  - Jaringan Pengendalian Banjir

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
**SUPARMI**  
NIP. 19690512 198903 2 009

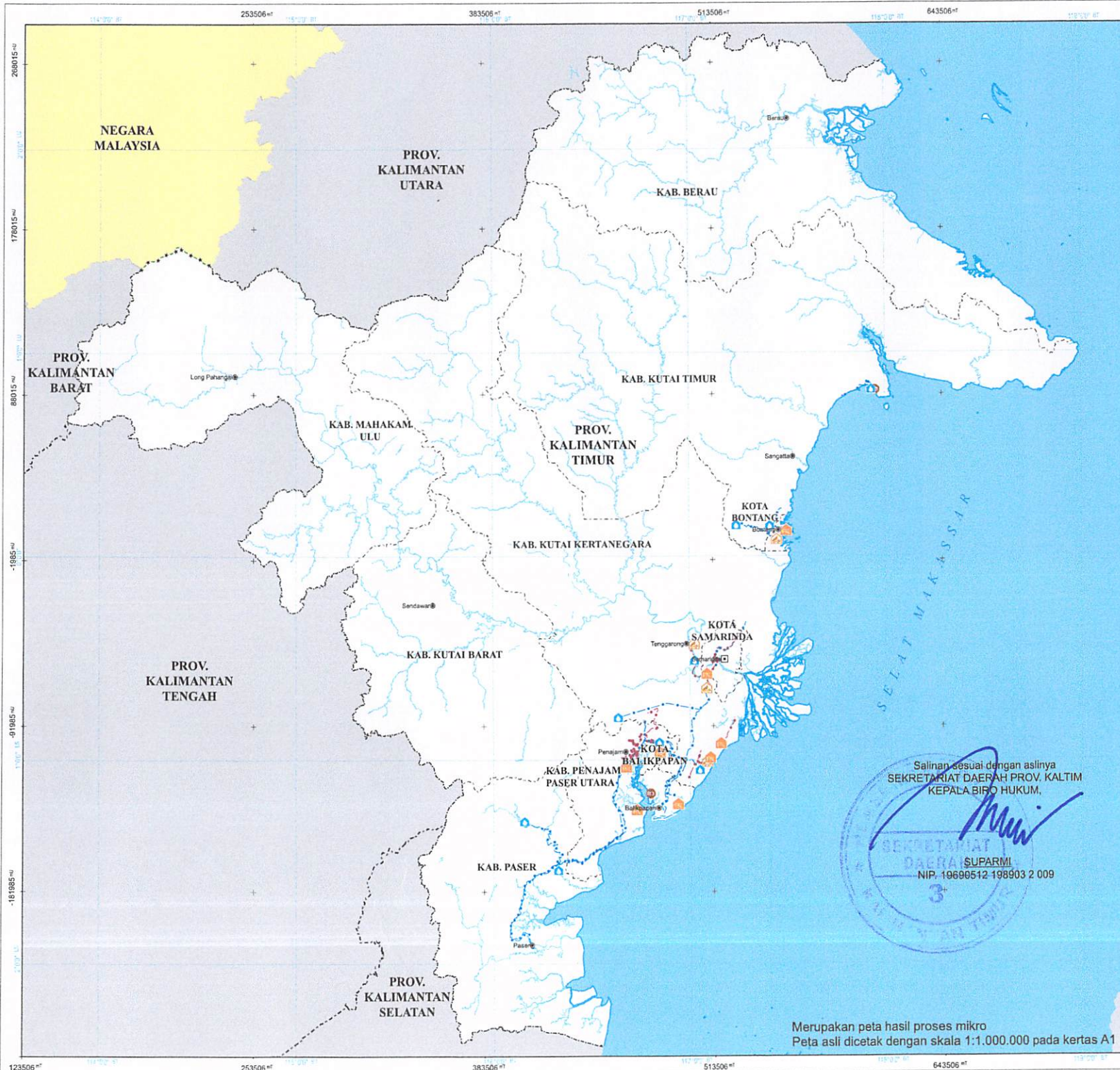
Merupakan peta hasil proses mikro  
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
2. Peta RZWPQK Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perdes Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi  
Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

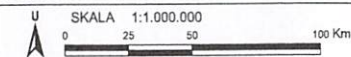
ISRAN NOOR



**PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

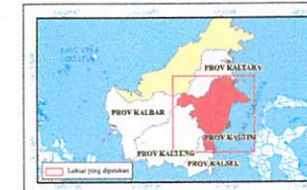
**LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

- |                             |                           |                        |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Ibukota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> | <b>Peraliran</b>       |
| □ Ibu Kota Provinsi         | ••••• Batas Negara        | ~ Gelis Pantai         |
| ● Ibu Kota Kabupaten/Kota   | --- Batas Provinsi        | ~ Gelis Pantai Rencana |
|                             | --- Batas Kabupaten/Kota  | ~ Badan Air            |

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

- Sistem Infrastruktur Prasarana Lainnya
- Infrastruktur Sistem Pengaliran Air Limbah (SPAL)
  - Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
  - Sistem Pengaliran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
  - Sistem Jaringan Persampahan
  - Jaringan Sistem Pengaliran Air Limbah (SPAL)
  - Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
*[Signature]*  
SUPARMI  
NIP. 19690512-198903 2 009

Merupakan peta hasil proses mikro  
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
2. Peta RZWP-OK Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Percoba Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

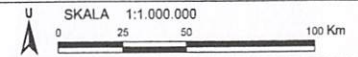
ISRAN NOOR



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**  
Ibukota Pemerintahan : □ Ibu Kota Provinsi, ● Ibu Kota Kabupaten/Kota  
Batas Administrasi : —\*—\*— Batas Negara, - - - Batas Provinsi, --- Batas Kabupaten/Kota  
Peraliran : ~ Garis Pantai, ~ Garis Pantai Rencana, ~ Badan Air

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung		Kawasan Budi Daya	
BA	Badan Air	PM	Kawasan Permukiman
PS	Kawasan Perlindungan Sempit	P	Kawasan Pertanian
KS	Kawasan Konservasi	PKP	Kawasan Pertanian/Kawasan Hutan Produksi
KS/P	Kawasan Konservasi/Kawasan Permukiman	PKS	Kawasan Pertanian/Kawasan Konservasi
KS/PK	Kawasan Konservasi/Kawasan Pertanian	PI	Kawasan Perikanan
KS/PK/P	Kawasan Konservasi/Kawasan Perikanan	TE	Kawasan Pertambangan dan Energi
KA	Kawasan Hutan Adat	SI	Kawasan Peruntukan Industri
LG	Kawasan Lindung Geologi	W	Kawasan Perlembata
EM	Kawasan Ekosistem Mangrove	TS	Kawasan Transportasi
PP	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	PK	Kawasan Perkebunan Rakyat
PP/P	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian		
PP/PK	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan		
PP/PK/P	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Hutan Produksi		
PP/PK/P/P	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Konservasi		
PP/PK/P/P/PP	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Konservasi/Kawasan Mangrove		
PP/PK/P/P/PP/P	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Konservasi/Kawasan Mangrove/Kawasan Perikanan		
PP/PK/P/P/PP/P/PP	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Konservasi/Kawasan Mangrove/Kawasan Perikanan/Kawasan Pertanian		
PP/PK/P/P/PP/P/PP/P	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Konservasi/Kawasan Mangrove/Kawasan Perikanan/Kawasan Pertanian/Kawasan Perumahan		
PP/PK/P/P/PP/P/PP/P/PP	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Konservasi/Kawasan Mangrove/Kawasan Perikanan/Kawasan Pertanian/Kawasan Perumahan/Kawasan Perlembata		
PP/PK/P/P/PP/P/PP/P/PP/P	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Konservasi/Kawasan Mangrove/Kawasan Perikanan/Kawasan Pertanian/Kawasan Perumahan/Kawasan Perlembata/Kawasan Transportasi		
PP/PK/P/P/PP/P/PP/P/PP/P/PP	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Konservasi/Kawasan Mangrove/Kawasan Perikanan/Kawasan Pertanian/Kawasan Perumahan/Kawasan Perlembata/Kawasan Transportasi/Kawasan Perkebunan Rakyat		

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
**SUPARMI**  
NIP. 19690512 198903 2 009

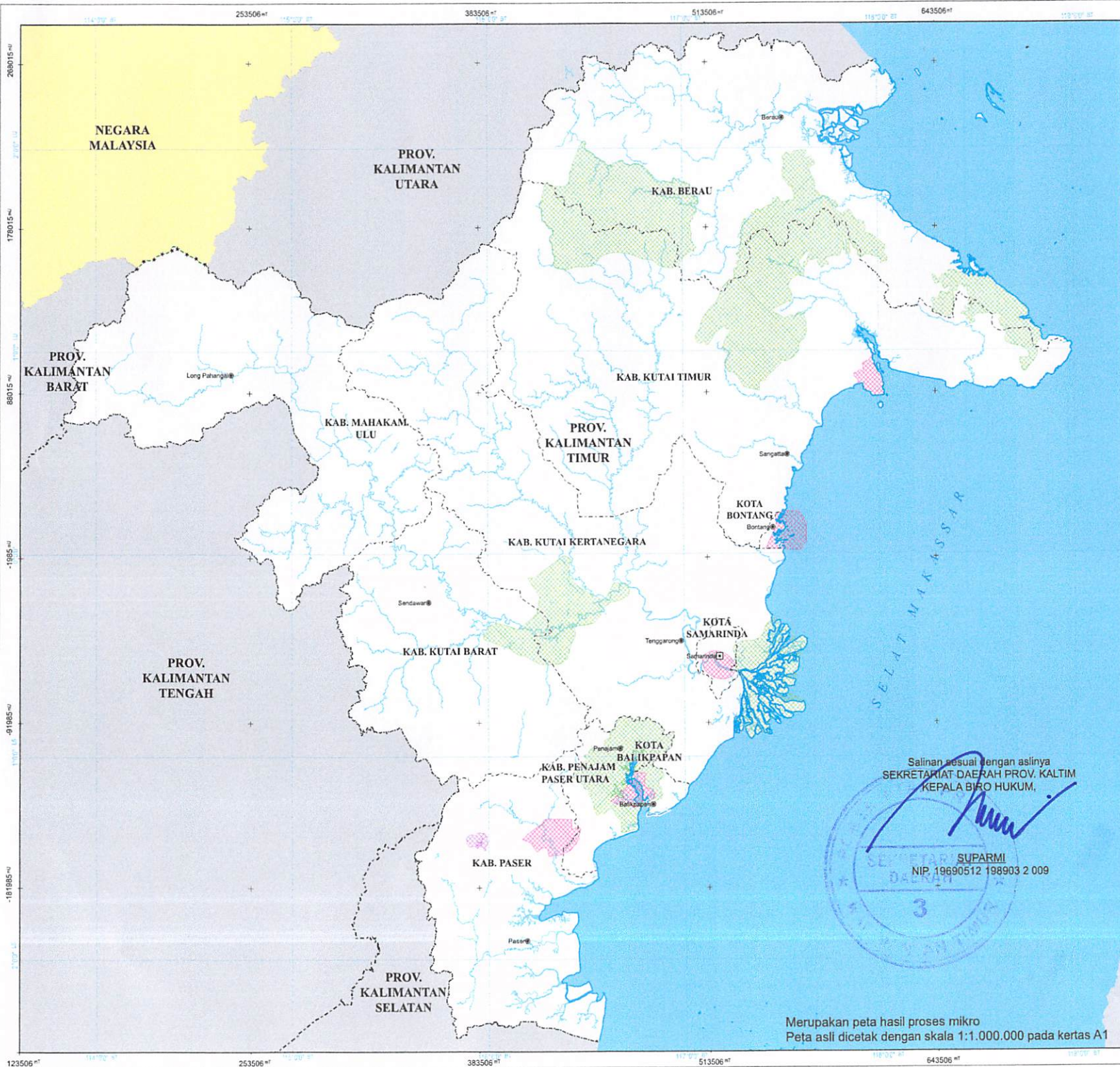
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
2. SK No 6628/ME/LUK-PT/KL/KUH/PLA/21/0/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur  
3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Peta Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi  
Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

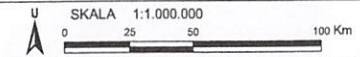
ISRAN NOOR

Merupakan peta hasil proses mikro  
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



PEREMPTARAN PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN XI  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042  
**PETA KAWASAN STRATEGIS  
PROVINSI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN :**
- |                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan   | Batas Administrasi   | Perairan             |
| Ibu Kota Kabupaten/Kota | Batas Negara         | Garis Pantai         |
|                         | Batas Provinsi       | Garis Pantai Rencana |
|                         | Batas Kabupaten/Kota | Badan Air            |
- PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**
- Sudut Kepentingan
- Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
  - Pertumbuhan Ekonomi
  - Sosial dan Budaya

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
**SUPARMI**  
NIP. 19690512 198903 2 009

Merupakan peta hasil proses mikro  
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA  
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
2. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023-2042

**KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT**

**I. Kawasan Konservasi**

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
1.	Konservasi Lainnya	SML-01	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	Kepmen KP No. 87 Tahun 2016 KKP3K Derawan Dsk: Pulau Semama, Kec. P. Derawan-Kab. Berau, Suaka Marga Satwa (Pesisir) SK Kawasan Hutan 6628 Tahun 2021	122.69	118° 19' 43.917" E	2° 8' 8.700" N	<b>Zona Inti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian kegiatan konservasi</li> </ul> <b>Zona Perikanan Berkelanjutan KKP:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata edukasi</li> <li>• Usaha wisata dayung</li> <li>• Usaha wisata selam</li> <li>• Usaha wisata memancing</li> </ul>	<b>Zona Inti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata dayung Usaha wisata selam</li> <li>• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>• kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>• Pengapungan (refloating)</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> </ul>	<b>Zona Inti KKP3K</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>• Pendidikan kegiatan konservasi</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-W-17	Kawasan Konservasi	Kab. Kutai Timur	Pantai Teluk Lombok, Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur, Taman Nasional Kutai SK Kawasan Hutan 6628 Tahun 2021	9.77	117° 33' 42.408" E	0° 25' 0.344" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata selancar</li> <li>Usaha wisata snorkeling</li> <li>Usaha wisata tontonan</li> <li>Usaha wisata berenang</li> <li>Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>Pengoperasia Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan</li> <li>Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> <li>Pembangunan terminal Roro</li> <li>Pembangunan terminal curah CAIR</li> </ul>	<p><b>Zona Pemanfaatan Terbatas KKP3K</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata edukasi</li> <li>Penanaman Pipa 0-20 cm</li> <li>Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>Usaha wisata selam</li> <li>Usaha wisata memancing</li> <li>Usaha wisata selancar</li> <li>Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>Usaha dermaga wisata</li> <li>Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> </ul>	
		TWAL-01	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	Pulau Sangalaki, Kec. Maratua-Kab. Berau	265.17	118° 24' 2.274" E	2° 5' 11.167" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>Pendidikan kegiatan konservasi</li> <li>Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal &lt; 10GT</li> </ul> <p><b>Zona Pemanfaatan Terbatas KKP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata edukasi</li> <li>Usaha wisata dayung</li> <li>Usaha wisata selam</li> <li>Usaha wisata memancing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>Pendidikan kegiatan konservasi</li> <li>Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal &lt; 10GT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata selam</li> <li>Usaha wisata memancing</li> <li>Usaha wisata selancar</li> <li>Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>Usaha dermaga wisata</li> <li>Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> </ul>	
		KKP3K-02	Kawasan Konservasi	Kab. Paser	Teluk Apar, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser, SK Kawasan Hutan 6628 Tahun 2021	1,362.61	116° 26' 45.959" E	2° 10' 34.321" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata selancar</li> <li>Usaha wisata snorkeling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata selancar</li> <li>Usaha wisata snorkeling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata selam</li> <li>Usaha wisata memancing</li> <li>Usaha wisata selancar</li> <li>Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>Usaha dermaga wisata</li> <li>Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> </ul>	
2.	Taman	KK-P3K-ZI-01	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-17, Batu Putih dan Biduk-	101.79	118° 56' 58.250" E	1° 33' 34.515" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata selancar</li> <li>Usaha wisata snorkeling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata selancar</li> <li>Usaha wisata snorkeling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata selam</li> <li>Usaha wisata memancing</li> <li>Usaha wisata selancar</li> <li>Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>Usaha dermaga wisata</li> <li>Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Biduk-Kab. Berau				<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata tontonan</li> <li>Usaha wisata berenang</li> <li>Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>Pendidikan kegiatan konservasi</li> <li>Survei/dan penelitian ilmiah</li> <li>Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal &lt;10 gt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Kolam pelabuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> <li>Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>Penanaman kabel</li> <li>Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>Usaha vila (cottage) di atas laut</li> <li>Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>Usaha wisata snorkeling</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> </ul>	
		KK-P3K-ZI-02	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-18, Pulau Mataha, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	370.48	118° 54' 49.892" E	1° 31' 25.043" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>Pendidikan kegiatan konservasi</li> </ul>			
		KK-P3K-ZI-03	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-20, Karang Muaras Barat, Kec. Maratua-Kab. Berau	798.66	118° 50' 36.042" E	1° 54' 21.016" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>Pendidikan kegiatan konservasi</li> </ul>			
		KK-P3K-ZI-04	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-23, Karang Muaras Barat, Kec. Maratua-Kab. Berau	705.71	118° 49' 27.283" E	1° 56' 0.175" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>Pendidikan kegiatan konservasi</li> </ul>			
		KK-P3K-ZI-05	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-26, Pulau Semama, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	6,531.29	118° 19' 50.501" E	2° 7' 2.079" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perindungan keanekaragaman hayati;</li> </ul>			



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KK-P3K-ZI-06	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-26, Utara Pulau Kakaban, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	94.18	118° 31' 28.88 4" E	2° 9' 43.05 3" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>• Pendidikan kegiatan konservasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> <li>• Usaha wisata tontonan</li> <li>• Usaha wisata berenang</li> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT</li> <li>• Penggunaan galah untuk mendorong perahu</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut</li> </ul>	
		KK-P3K-ZI-07	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-30, Lhok Patti, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	1,299.52	118° 9' 51.48 5" E	2° 20' 4.369 " N	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>• Pendidikan kegiatan konservasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Usaha wisata selancar</li> <li>• Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> <li>• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha vila (cottage) di atas laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT</li> <li>• Penggunaan galah untuk mendorong perahu</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut</li> </ul>	
		KK-P3K-ZI-01	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-17, Batu Putih dan Biduk-Biduk-Kab. Berau	10,2341.84	118° 38' 58.35 5" E	1° 21' 41.12 6" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>• Pendidikan kegiatan konservasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Usaha wisata selancar</li> <li>• Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> <li>• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha vila (cottage) di atas laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT</li> <li>• Penggunaan galah untuk mendorong perahu</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut</li> </ul>	
		KK-P3K-ZI-02	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-18, Bilang-Bilangan, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	6,327.45	118° 50' 26.76 7" E	1° 30' 25.37 8" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>• Pendidikan kegiatan konservasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Usaha wisata selancar</li> <li>• Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> <li>• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha vila (cottage) di atas laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT</li> <li>• Penggunaan galah untuk mendorong perahu</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut</li> </ul>	
		KK-P3K-ZI-03	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-20, Balembangan, Kec. Maratua-	18,495.89	118° 54' 41.97 7" E	1° 51' 29.89 8" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>• Pendidikan kegiatan konservasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Usaha wisata selancar</li> <li>• Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> <li>• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha vila (cottage) di atas laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT</li> <li>• Penggunaan galah untuk mendorong perahu</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Kab. Berau								
		KK-P3K-ZL-04	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-23, Balembangan, Kec. Maratua-Kab. Berau	4,840.18	118° 51' 11.587" E	1° 59' 2.118" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata snorkeling</li> <li>Usaha wisata tontonan</li> <li>Usaha wisata berenang</li> <li>Usaha restoran di atas laut</li> <li>Usaha wisata alam perairan</li> <li>Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>Pengambilan terumbu karang</li> <li>Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu;getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>Penangkapan ikan dengan kapal</li> <li>Pengambilan barang-barang Purbakala</li> <li>Pengambilan barang-barang selain barang purbakala</li> <li>Pelepasan jangkar Penggunaan galah untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(kerapu,kakap, baronang)</li> <li>Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri</li> <li>Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung)</li> <li>Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil</li> <li>Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>Pemasangan rumpon perairan dalam</li> <li>Pemasangan rumpon perairan dangkal</li> <li>Bongkar muat ikan</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> </ul>		
		KK-P3K-ZL-05	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-26, Kakaban, Kec. Maratua-Kab. Berau	46,356.46	118° 26' 47.433" E	2° 3' 28.389" N					
		KK-P3K-ZL-06	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-30, Tanjung Batu, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	15,126.82	118° 8' 55.604" E	2° 22' 57.198" N					
		KK-P3K-ZPT-01	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-17, Batu Berlubang, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	739.54	118° 55' 53.759" E	1° 4' 8.757" N					
		KK-P3K-ZPT-02	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-17, P. Kaniungan Besar, Kec.	1,186.27	118° 50' 48.817" E	1° 7' 7.760" N					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG					
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS		
					Biduk-Biduk-Kab. Berau									
		KK-P3K-ZPT-03		Kab. Berau	KKP3K-17, P. Kaniungan Kecil, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	1,052.79	118° 52' 46.81 4" E	1° 9' 22.29 4" N				<ul style="list-style-type: none"> <li>mendorong perahu</li> <li>Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>Usaha pembudidayaan ikan laut</li> <li>Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri</li> <li>Usaha budidaya perikanan terapung</li> <li>Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>Penanaman kabel</li> <li>Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal</li> </ul>	
		KK-P3K-ZPT-04	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-17, Sigending, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	5,052.05	118° 46' 57.03 4" E	1° 9' 18.84 4" N				<ul style="list-style-type: none"> <li>mendorong perahu</li> <li>Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>Usaha pembudidayaan ikan laut</li> <li>Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri</li> <li>Usaha budidaya perikanan terapung</li> <li>Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>Penanaman kabel</li> <li>Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal</li> </ul>	
		KK-P3K-ZPT-05	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-17, Labuan Kelambu, Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau	1,056.86	118° 42' 10.52 4" E	1° 15' 45.24 5" N				<ul style="list-style-type: none"> <li>mendorong perahu</li> <li>Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>Usaha pembudidayaan ikan laut</li> <li>Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri</li> <li>Usaha budidaya perikanan terapung</li> <li>Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>Penanaman kabel</li> <li>Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal</li> </ul>	
		KK-P3K-ZPT-06	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-17, Tanjung Perepat, Kec. Biduk-Biduk-	1,739.04	118° 33' 14.36 0" E	1° 22' 44.57 6" N				<ul style="list-style-type: none"> <li>mendorong perahu</li> <li>Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>Usaha pembudidayaan ikan laut</li> <li>Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri</li> <li>Usaha budidaya perikanan terapung</li> <li>Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>Penanaman kabel</li> <li>Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Kab. Berau								
		KK-P3K-ZPT-07	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-17, Teluk Gila, Kec. Batu Putih-Kab. Berau	432.35	118° 28' 5.174" E	1° 26' 5.047" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil</li> <li>Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>Pemasangan rumpon perairan dalam</li> <li>Pemasangan rumpon perairan dangkal</li> <li>Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>Bongkar muat ikan</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>Industri penggaraman</li> <li>Pengapungan (refloating)</li> <li>Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut</li> <li>Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>Latihan militer</li> </ul>		
		KK-P3K-ZPT-08	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-17, Timur Tanjung Buaya, Kec. Batu Putih-Kab. Berau	256.90	118° 29' 27.910" E	1° 26' 40.310" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>Bongkar muat ikan</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Industri penggaraman</li> <li>Pengapungan (refloating)</li> <li>Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut</li> <li>Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>Latihan militer</li> </ul>		
		KK-P3K-ZPT-09	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-17, Karang Besar Barat, Kec. Talisayan-Kab. Berau	3,456.72	118° 24' 30.065" E	1° 35' 41.763" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangkutan Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>Bongkar muat ikan</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Industri penggaraman</li> <li>Pengapungan (refloating)</li> <li>Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut</li> <li>Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>Latihan militer</li> </ul>		
		KK-P3K-ZPT-10	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-17, Silonjongan, Kec. Batu Putih-Kab. Berau	7,663.87	118° 31' 19.018" E	1° 38' 1.408" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangkutan Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>Bongkar muat ikan</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Industri penggaraman</li> <li>Pengapungan (refloating)</li> <li>Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut</li> <li>Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>Latihan militer</li> </ul>		
		KK-P3K-ZPT-11	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-18, Pulau Mataha	4,086.00	118° 56'	1° 32' 24.562" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangkutan Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>Bongkar muat ikan</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Industri penggaraman</li> <li>Pengapungan (refloating)</li> <li>Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut</li> <li>Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>Latihan militer</li> </ul>		

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG					
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS		
					dan Bilang-Bilangan-Kab. Berau		9.751" E							
		KK-P3K-ZPT-12	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-19, Kawasan Mangrove Tg. Belanak, Kec. Sambaliung dan Tabalar-Kab. Berau	4,029.64	117° 53' 32.226" E	1° 53' 34.372" N				<ul style="list-style-type: none"> <li>dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetik ke lingkungan</li> <li>• Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving)</li> </ul>	
		KK-P3K-ZPT-12	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-19, Kawasan Mangrove Tg. Belanak, Kec. Sambaliung dan Tabalar-Kab. Berau	71.97	117° 46' 31.911" E	2° 0' 56.660" N						
		KK-P3K-ZPT-13	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-26, Gosong Malungun, Kec. Maratua-Kab. Berau	7,703.60	118° 26' 45.646" E	1° 55' 3.686" N						

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KK-P3K-ZPT-14	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-20, Karang Muaras Selatan, Kec. Maratua-Kab. Berau	1,824.51	118° 53' 11.932" E	1° 49' 27.971" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Pengerukan perairan dengan capital dredging</li> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> </ul>	works dalam rangka industri maritim) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja</li> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>• Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> </ul>	
		KK-P3K-ZPT-15	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-23, Karang Muaras Barat, Kec. Maratua-Kab. Berau	3,005.97	118° 48' 40.167" E	1° 58' 24.638" N				
		KK-P3K-ZPT-16	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-26, Pulau Sangalaki, Kec. Maratua-Kab. Berau	1,429.3	118° 23' 56.513" E	2° 5' 14.931" N				
		KK-P3K-ZPT-17	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-26, Pulau Kakaban, Kec. Maratua-Kab. Berau	3,637.6	118° 32' 19.215" E	2° 8' 16.268" N				
		KK-P3K-ZPT-18	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-29, DPL Tebabinga, Kec. P. Derawan-	398.14	118° 14' 27.579" E	2° 15' 27.118" N				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG					
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS		
					Kab. Berau									
		KK-P3K-ZPT-18	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-29, DPL Tebabinga, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	46.21	118° 14' 24.947" E	2° 16' 0.022" N				<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan PLTU</li> <li>Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif</li> <li>Pengolahan &amp; Pemurnian Batubara</li> <li>Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral logam</li> <li>Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral radioaktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing</li> <li>Operasi Kapal Angkatan Penyeberangan Dalam Provinsi</li> <li>Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional</li> <li>Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> </ul>	
		KK-P3K-ZPT-19	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-30, Utara Pulau Derawan, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	876.32	118° 14' 20.405" E	2° 18' 40.299" N						
		KK-P3K-ZPT-20	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-30, Utara Pulau Derawan, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	2178.96	118° 7' 16.118" E	2° 23' 7.781" N						
		KK-P3K-ZPT-21	Kawasan Konservasi	Kab. Berau	KKP3K-30, Karang Butasan, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	1491.58	118° 9' 41.478" E	2° 25' 25.256" N						
		KKP-03	Kawasan Konservasi	Kota Bontang	P. Beras Basah, P. Kedindingan, Kec. Bontang	751.80	117° 33' 28.968" E	0° 4' 48.117" N						

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Selatan-Kota Bontang								
		KKP-04	Kawasan Konservasi	Kota Bontang	P. Melahing, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	2,213.30	117° 32' 21,64 5" E	0° 6' 56,28 6" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut</li> <li>Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG</li> <li>Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring)</li> <li>Pemusnahan handak migas</li> <li>Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.</li> <li>Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> </ul>		
		KKP-05	Kawasan Konservasi	Kota Bontang	Karang Segajah, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	406.61	117° 33' 15,26 8" E	0° 9' 14,79 9" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>Eksplorasi energi OTEC</li> <li>Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>Pembangunan turap (revetment),</li> </ul>		
3.	Kawasan Konservasi Maritim	KKM-01	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Paser	Kapal Amagiri, Selat Makassar , Kab. Paser	400.43	116° 45' 0.001" E	2° 10' 0.000 " S					
		KKM-02	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Kutai Timur	Kapal SS Sierra Cordoba, Selat Makassar , Kab. Kutai Timur	399.86	119° 10' 0.002" E	1° 0' 0.005 " N					



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
4.	Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	KKP-01	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Paser	Karang Tg. Aru, Selat Makassar, Kab. Paser	2,304.69	116° 39' 53.281" E	2° 15' 2.514" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Penetapan tempat labuh</li> <li>• Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> <li>• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> <li>• Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>• Pembangunan terminal ro-ro</li> <li>• Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Pembangunan TPI</li> <li>• Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembangunan groin</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan</li> <li>• Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>• Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan</li> </ul>	
		KKP-02	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Penajam Paser Utara	Karang Tanjung Jumlai, Kec. Penajam-Kab. PPU	967.08	116° 46' 21.274" E	1° 23' 41.837" S				
		KKP-02	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Penajam Paser Utara	Karang Tanjung Jumlai, Kec. Penajam-Kab. PPU dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	585.53	116° 46' 52.472" E	1° 23' 13.811" S				
		KKP-06	Kawasan Pencadangan	Kab. Kutai Timur	P. Miang Besar, Kec. Sangkulir	1136.8	117° 59' 24.225" E	0° 44' 19.468" N				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG					
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS		
			Konservasi di Laut		ang-Kab. Kutai Timur									
		KKP3K-01	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Paser	Tanjung Harapan, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	5,080.49	116° 36' 6.502" E	2° 16' 6.381" S				<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan turap (revetment)</li> <li>pembangunan groin;</li> <li>Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan</li> <li>Uji coba kapal</li> <li>Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pancing Rawai Dasar</li> <li>Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radio aktif</li> <li>Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>Usaha wisata selam</li> <li>Usaha wisata memancing</li> <li>Usaha wisata selancar</li> <li>Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>Usaha dermaga wisata</li> <li>Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> </ul>	
		KKP3K-02	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Paser	Teluk Apar, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	5,256.48	116° 28' 57.717" E	2° 7' 49.272" S						
		KKP3K-03	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Paser	Teluk Apar, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	15,128.6	116° 27' 4.862" E	1° 53' 44.010" S						
		KKP3K-04	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Penajam Paser Utara/Kab. Paser	Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara	3,357.13	116° 33' 29.459" E	1° 31' 40.361" S						
		KKP3K-04	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Penajam Paser Utara/Kab. Paser	Tg.Telake -Tg. Sembiling, Kec. Longkali Kab. Paser	2,323.09	116° 33' 35.437" E	1° 36' 5.761" S						

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KKP3K-05	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Penajam Paser Utara	Tanjung Jumlai, Kec. Penajam-Kab. PPU	299.3	116° 45' 43.55" E	1° 21' 1.824" S		bagi kepentingannya sendiri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> </ul>	
		KKP3K-06	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Penajam Paser Utara	Teluk Balikpapan-Kab. Penajam Paser Utara	45.63	116° 42' 41.916" E	1° 7' 9.530" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha angkutan laut internasional wisata</li> </ul>	
		KKP3K-07	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Penajam Paser Utara	Teluk Balikpapan-Kab. Penajam Paser Utara	67.14	116° 43' 48.069" E	1° 4' 29.204" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>Usaha vila (cottage) di atas laut</li> </ul>	
		KKP3K-08	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Kutai Kartanegara	Kec. Marangayu-Kab. Kutai Kartanegara	1,101.38	117° 26' 46.197" E	0° 18' 6.937" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata snorkeling</li> </ul>	
		KKP3K-09	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Kutai Kartanegara	Kec. Marangayu-Kab. Kutai Kartanegara	735.85	117° 27' 12.051" E	0° 10' 8.788" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata berenang</li> <li>Usaha wisata alam perairan</li> </ul>	
		KKP3K-10	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	1,657.54	117° 29' 49.740" E	0° 4' 22.143" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata alam perairan</li> <li>Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan</li> </ul>	
		KKP3K-11	Kawasan Pencadangan	Kab. Kutai Kartanegara	Kec. Marangkayu-Kab.	462.52	117° 30' "	0° 0' 3.232" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata berenang</li> <li>Usaha wisata alam perairan</li> <li>Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan</li> <li>Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG					
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS		
			Konservasi di Laut		Kutai Kartanegara		55.218" E							
		KKP3K-11	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Kutai Kartanegara	Kec. Marangayu-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	27.92	117° 31' 16.553" E	0° 1' 24.863" S				<ul style="list-style-type: none"> <li>pelabuhan internasional</li> <li>Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> <li>Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut</li> <li>Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.</li> <li>Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi</li> <li>Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan</li> <li>Penetapan rute pelayaran internasional</li> <li>Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing</li> <li>Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing</li> <li>Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawe Dasar</li> <li>Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>Budidaya mangrove</li> <li>Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> </ul>	
		KKP3K-12	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Kutai Timur	Kec. Teluk Pandan dan Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	4778.52	117° 36' 13.882" E	0° 25' 5.968" N						
		KKP3K-13	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Kutai Timur	Tg. Sangatta Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	410.12	117° 36' 13.882" E	0° 25' 5.968" N						
		KKP3K-14	Kawasan Pencadangan	Kab. Kutai Timur	Tg. Bungalun, Kec.	1,030.88	117° 42' 42" E	0° 38' 15.546" N						

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
			Konservasi di Laut		Bengalon -Kab. Kutai Timur		8.904" E				<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> <li>Pengangkutan dan penjualan Garam</li> <li>Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT</li> <li>Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 5-30 GT</li> <li>Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT</li> <li>Pelepasan jangkar</li> <li>Penggunaan galah untuk mendorong perahu</li> <li>Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang)</li> <li>Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri</li> <li>Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung)</li> <li>Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk</li> </ul>	
		KKP3K-15	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Kutai Timur	Teluk Sangkulirang, Kec. Sangkulirang dan Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur	1,671.16	117° 56' 7.414" E	1° 2' 1.485" N					
		KKP3K-16	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Kutai Timur	Teluk Sangkulirang-Tg. Pagar, Kec. Sandaran -Kab. Kutai Timur	1,797 3.87	118° 14' 0.778" E	0° 51' 47.53 1" N					
		KKP3K-17	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Tg. Belanak, Kec. Sambaliung dan Tabalar- Kab. Berau	1,952 6.99	117° 58' 41.11 0" E	1° 51' 17.61 0" N					
		KKP3K-18	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	KSNT P. Maratua dan P. Sambit: Karang Muaras Barat, P.	5,421 .96	119° 2' 47.12 1" E	1° 52' 35.93 2" N					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Sambit Kec. Maratua-Kab. Berau								
		KKP3K-20	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Karang Muaras Barat, P. Sambit Kec. Maratua-Kab. Berau	35,927.89	119° 1' 48.805" E	1° 46' 54.602" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;</li> <li>Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;</li> <li>Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).</li> <li>Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kepentingan ekonomi</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil</li> <li>Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>Pemasangan rumpon perairan dalam</li> <li>Pemasangan rumpon perairan dangkal</li> <li>Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia"</li> <li>Bongkar muat ikan</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya</li> </ul>		
		KKP3K-21	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Karang Muaras Barat, P. Sambit Kec. Maratua-Kab. Berau	2,729.63	119° 2' 35.349" E	1° 49' 56.244" N					
		KKP3K-22	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Karang Muaras Barat, P. Sambit Kec. Maratua-Kab. Berau	6.84	118° 55' 14.140" E	1° 57' 57.771" N					
		KKP3K-23	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Karang Muaras Barat, P. Maratua Kec. Maratua-Kab. Berau	53,890.76	118° 41' 50.353" E	2° 8' 46.833" N					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
		KKP3K-23	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Karang Muaras Barat, P. Maratua Kec. Maratua-Kab. Berau	868.70	118° 32' 31.262" E	2° 21' 3.017" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penarikan (Towing)</li> <li>• Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri</li> <li>• Biofarmakologi / Bioteknologi Laut</li> <li>• Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>• Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Pipa intake dan outake industri garam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> </ul>		
		KKP3K-24	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Karang Muaras Barat, P. Maratua Kec. Maratua-Kab. Berau	20,023.67	118° 33' 39.357" E	2° 9' 47.065" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Pipa intake dan outake industri garam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri</li> <li>• Biofarmakologi / Bioteknologi Laut</li> <li>• Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>• Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Pipa intake dan outake industri garam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> </ul>	
		KKP3K-24	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Karang Muaras Barat, P. Maratua Kec. Maratua-Kab. Berau	1711.58	118° 26' 5.918" E	2° 18' 39.750" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Pipa intake dan outake industri garam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> </ul>		
		KKP3K-25	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Karang Muaras Barat, P. Maratua Kec. Maratua-Kab. Berau	10,835.27	118° 42' 58.624" E	2° 12' 53.697" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Pipa intake dan outake industri garam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> </ul>		
		KKP3K-25	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Karang Muaras Barat, P. Maratua Kec. Maratua-Kab. Berau	148.8	118° 34' 56.134" E	2° 22' 18.023" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Pipa intake dan outake industri garam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> </ul>		

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG					
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS		
					Kab. Berau									
		KKP3K-27	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Tg. Bingkar, Kec. Pulau Derawan-Kab. Berau	13,76 8.41	117° 53' 28.91 7" E	2° 6' 37.42 4" N				<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pembangunan terminal Roro</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> <li>Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>batubara, mineral radioaktif</li> <li>Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>Pengerukan perairan dengan capital dredging</li> <li>Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>Pembangunan PLTU</li> <li>Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam</li> <li>Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> </ul>	
		KKP3K-30	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	Kab. Berau	Tg. Karangtigu, Kec. Pulau Derawan-Kab. Berau	1,122 .76	118° 1' 14.06 1" E	2° 23' 15.75 7" N						



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										memotong material karang dan/atau batu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Pengambilan terumbu karang</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal <math>\geq</math> 30GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala</li> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas <math>\geq</math> 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasagenetik</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>• Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>• Eksplorasi energi OTEC</li> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi</li> <li>• Penanaman kabel</li> <li>• Penanaman Pipa 0-20 cm</li> <li>• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Penetapan tempat labuh</li> <li>• Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<p>dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan pukot hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> <li>• Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>• Pembangunan terminal Roro</li> <li>• Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Pembangunan TPI</li> <li>• Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>• Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin;</li> <li>• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan</li> <li>• Uji coba kapal</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										logam, batuan, batubara, mineral radioaktif <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Pengerukan perairan dengan capital dredging</li> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>• Pembangunan PLTU</li> <li>• Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>• Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan</li> </ul>	pemeliharaan kapal perikanan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>• Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>logam atau mineral batuan</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Batubara</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral logam</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral radioaktif</li> <li>• Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut</li> <li>• Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG</li> <li>• Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring)</li> <li>• Pemusnahan handak migas</li> <li>• Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional</li> <li>• Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> <li>• Usaha jasa penyewaan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>• Eksplorasi energi OTEC</li> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan</li> <li>• Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> <li>• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> <li>• Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>• Pembangunan terminal ro-ro</li> <li>• Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Pembangunan TPI</li> <li>• Pembangunan breakwater</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peralatan angkutan laut</li> <li>• Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.</li> <li>• Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi</li> <li>• Penetapan rute pelayaran internasional</li> <li>• Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing</li> <li>• Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										(pemecah gelombang) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan turap (revetment)</li> <li>• pembangunan groin;</li> <li>• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan</li> <li>• Uji coba kapal</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> <li>• Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>• Industri penggaraman</li> <li>• Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>• Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>• Penarikan (Towing)</li> <li>• Pengapungan (refloating)</li> <li>• Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• pelabuhan internasional</li> <li>• Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> <li>• Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut</li> <li>• Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.</li> <li>• Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi</li> <li>• Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan</li> <li>• Penetapan rute pelayaran internasional</li> <li>• Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing</li> <li>• Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing</li> <li>• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>• Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Latihan militer</li> </ul> <p><b>Zona Inti KKP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>• Pendidikan kegiatan konservasi</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> </ul>	



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> <li>• Pengangkutan dan penjualan Garam</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>• Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;</li> </ul>	<p><b>Zona Perikanan Berkelanjutan KKP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata edukasi</li> <li>• Penanaman Pipa 0-20 cm</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>• Penanaman kabel</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) Penarikan (Towing)</li> </ul> <p><b>Zona Perikanan Berkelanjutan KKP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>• kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Usaha wisata selam</li> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Usaha wisata selancar</li> <li>• Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> <li>• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha vila (cottage) di atas laut</li> <li>• Usaha wisata snorkeling</li> <li>• Usaha wisata tontonan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>• Pengoperasia Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>• Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>• Pembangunan terminal Roro</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha vila (cottage) di atas laut</li> <li>• Usaha restoran di atas laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata berenang</li> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• "Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)"</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT</li> <li>• Penggunaan galah untuk mendorong perahu</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan terumbu karang</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal <math>\geq 10</math></li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala</li> <li>• Pelepasan jangkar</li> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas <math>\geq 5</math> Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (kerapu,kakap, baronang)</li> <li>• Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri</li> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung)</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dalam</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dangkal</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan pukut hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan cein e nets dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroam dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermoto</li> <li>• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Pengerukan perairan dengan capital dredging</li> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>• Pembangunan PLTU</li> <li>• Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>• Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal</li> <li>• Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>• Industri penggaraman</li> <li>• Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut</li> <li>• Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>• Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Batubara</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral logam</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral radioaktif</li> <li>• Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut</li> <li>• Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG</li> <li>• Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring)</li> <li>• Pemusnahan handak migas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> </ul> <p><b>Zona Pemanfaatan Terbatas KKP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata edukasi</li> <li>• Penanaman Pipa 0-20 cm</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>• Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>• Eksplorasi energi OTEC</li> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan</li> <li>• Penetapan tempat labuh</li> <li>• Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> <li>• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> <li>• Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>• Pembangunan terminal ro-ro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Usaha wisata selam</li> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Usaha wisata selancar</li> <li>• Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> <li>• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha vila (cottage) di atas laut</li> </ul>	



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Pembangunan TPI</li> <li>• Pembangunan groin;</li> <li>• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan</li> <li>• Uji coba kapal</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata snorkeling</li> <li>• Usaha wisata tontonan</li> <li>• Usaha wisata berenang</li> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• "Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)"</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT</li> <li>• Penggunaan galah untuk mendorong perahu</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										kepentingannya sendiri. • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang)</li> <li>• Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri</li> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung)</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dalam</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>antar Provinsi dan pelabuhan internasional</li> <li>• Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional.</li> <li>• Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi</li> <li>• Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan</li> <li>• Penetapan rute pelayaran internasional</li> <li>• Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing</li> <li>• Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing</li> <li>• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> <li>• Pengangkutan dan penjualan Garam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan rumpon perairan dangkal</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Penanaman kabel</li> <li>• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>• Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja</li> <li>• Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal</li> <li>• Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>• Industri penggaraman</li> <li>• Pengapungan (refloating)</li> <li>• Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut</li> <li>• Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>• Pembangunan pembangkitan,</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<p>dipergunakan dalam kapal;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>• Penarikan (Towing)</li> <li>• penjualan tenaga listrik</li> <li>• Pipa intake dan outake industri</li> </ul> <p><b>Zona Pemanfaatan Terbatas KKP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan,</li> </ul>	<p>transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Latihan militer</li> </ul> <p><b>Zona Lainnya KKP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>• Penanaman Pipa 0-20 cm</li> <li>• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>• Usaha wisata edukasi</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetik ke lingkungan</li> <li>• Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>• Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Pembangunan terminal Roro</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Pengambilan terumbu karang</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal <math>\geq</math> 30GT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biofarmakologi /Bioteknologi Laut</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim)</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja</li> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>• Kegiatan Industri Galangan Kapal</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala</li> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasagenetik</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> <li>• Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing</li> <li>• Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi</li> <li>• Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional</li> <li>• Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>• Reklamasi di wilayah perairan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Pengerukan perairan dengan capital dredging</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.</li> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan :</li> </ul>	



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>• Pembangunan PLTU</li> <li>• Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>• Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Batubara</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral logam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>• Bongkar muat ikan Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral radioaktif</li> <li>• Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut</li> <li>• Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG</li> <li>• Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring)</li> <li>• Pemusnahan handak migas</li> <li>• Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>• Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>• Eksplorasi energi OTEC</li> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Usaha wisata selam</li> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Usaha wisata selancar</li> <li>• Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> </ul>		

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>• Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> <li>• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> <li>• Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>• Pembangunan terminal ro-ro</li> <li>• Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Pembangunan TPI</li> <li>• Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>• Pembangunan turap (revetment)</li> <li>• pembangunan groin;</li> <li>• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha vila (cottage) di atas laut</li> <li>• Usaha wisata snorkeling</li> <li>• Usaha wisata tontonan</li> <li>• Usaha wisata berenang</li> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji coba kapal</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>• Pengoperasian Pelabuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 5-30 GT</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT</li> <li>• Pelepasan jangkar</li> <li>• Penggunaan galah untuk mendorong perahu</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang)</li> <li>• Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri</li> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung)</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>• Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan</li> <li>• Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>• Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan</li> <li>• Pengumpulan Region dan Lokal</li> <li>• Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional</li> <li>• Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> <li>• Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut</li> <li>• Pengelolaan (TUKS) di dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dalam</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dangkal</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia"</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional. • Operasi Kapal Angkatan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Pengangkutan dan penjualan Garam • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan	Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>penimbunan limbah B3</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>• Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Pengerukan perairan dengan capital dredging</li> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>• Pembangunan PLTU</li> <li>• Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>• Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>• Penarikan (Towing)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>• Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam</li> <li>• Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>• Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>• Eksplorasi energi OTEC</li> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi</li> <li>• Penanaman kabel</li> <li>• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu</li> </ul>	



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											Navigasi Pelayaran (SBNP) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan tempat labuh</li> <li>• Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> <li>• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> <li>• Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>• Pembangunan terminal Roro</li> <li>• Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Pembangunan TPI</li> <li>• Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>• Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin;</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan</li> <li>• Uji coba kapal</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan :</li> <li>• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											cement grinding plant dan cement packing plant • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Penetapan rute pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> <li>• Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>• Industri penggaraman</li> <li>• Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penarikan (Towing)</li> <li>• Pengapungan (refloating)</li> <li>• Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi/Bioteknologi Laut</li> <li>• Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>• Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Latihan militer</li> </ul>	

II. Kawasan Pemanfaatan Umum

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
1.	Zona Pariwisata	KPU-W-01	Kawasan Pariwisata	Kab. Paser	Pantai Teluk Adang, Kec. Kuaro-	375.64	116° 16' 27.413" E	1° 45' 35.022" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata edukasi</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan terumbu karang</li> <li>• Reklamasi di wilayah perairan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Penanaman Pipa 0-20 cm</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Kab. Paser				dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia	pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>• kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetik ke lingkungan</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim)</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> </ul>	
		KPU-W-02	Kawasan Pariwisata	Kab. Penajam Paser Utara	Pantai Corong dan Tanjung Jumlai, Kec. Penajam Kab. PPU	310.18	116° 40' 31.925" E	1° 23' 52.026" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata selam</li> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Usaha wisata selancar</li> <li>• Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> <li>• usaha wisata dayung</li> <li>• usaha wisata selam</li> <li>• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥5 Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Budidaya lkan hasil rekayasa genetik</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>• Pelepasan jangkar</li> </ul>		
		KPU-W-03	Kawasan Pariwisata	Kab. Penajam Paser Utara	Pantai Nipah-Nipah, Kec. Penajam-Kab. PPU	54.57	116° 45' 45.008" E	1° 17' 32.674" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• usaha wisata selam</li> <li>• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Budidaya lkan hasil rekayasa genetik</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>• Pelepasan jangkar</li> </ul>		
		KPU-W-04	Kawasan Pariwisata	Kota Balikpapan	Pantai Manggar-Pantai Lamaru, Kec. Balikpapan Timur-Kota Balikpapan	214.58	116° 59' 44.456" E	1° 12' 14.053" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• usaha wisata selam</li> <li>• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budidaya lkan hasil rekayasa genetik</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>• Pelepasan jangkar</li> </ul>		
		KPU-W-10	Kawasan Pariwisata	Kab. Kutai Kartanegara	Pantai Pegempang, Kec. Marangayu-Kab. Kutai Kartanegara	91.28	117° 25' 52.644" E	0° 13' 8.192" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>• Pelepasan jangkar</li> </ul>		
		KPU-W-11	Kawasan Pariwisata	Kab. Kutai Kartanegara	Pantai Biru-Pantai	165.96	117° 29'	0° 3' 40.775" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelepasan jangkar</li> </ul>		



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Rapak Lama, Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara		41.57 5" E		<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha vila (cottage) di atas laut</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>usaha wisata snorkeling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja</li> <li>Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja</li> </ul>	
		KPU-W-12	Zona Pariwisata	Kota Bontang	Karang Sagajah, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	18.68	117° 33' 51.08 6" E	0° 9' 35.13 4" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>usaha wisata tontonan</li> <li>Usaha wisata berenang</li> <li>Usaha wisata alam perairan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)</li> <li>Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>Industri penggaraman</li> </ul>	
		KPU-W-13	Zona Pariwisata	Kota Bontang	Karang Sagajah, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	19.58	117° 33' 43.81 6" E	0° 10' 3.210 " N	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>Konstruksi Pertambangan Garam</li> </ul>	
		KPU-W-14	Zona Pariwisata	Kota Bontang	Pulau Gusung, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	6.89	117° 30' 29.25 8" E	0° 11' 20.26 6" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>Penelitian kegiatan konservasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Balubara</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> <li>Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal</li> </ul>	
		KPU-W-15	Zona Pariwisata	Kab. Kutai Timur	Pantai Teluk Kaba, Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	167.4 4	117° 31' 47.11 5" E	0° 18' 45.00 3" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-W-16	Zona Pariwisata	Kab. Kutai Timur	Pantai Teluk Lombok, Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	31.55	117° 33' 40.958" E	0° 22' 37.509" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>Mitigasi Bencana dan Kondisi dadrut di laut;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan &amp; Pemurnian Batubara</li> <li>Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral logam</li> <li>Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral radioaktif</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut</li> <li>Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG</li> <li>Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring)</li> <li>Pemusnahan handak migas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing</li> <li>Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan</li> <li>Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi</li> <li>Latihan militer</li> <li>Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional</li> <li>Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar</li> </ul>	
	KPU-W-17	Zona Pariwisata	Kab. Kutai Timur	Pantai Teluk Lombok, Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	310.08	117° 33' 55.413" E	0° 24' 45.396" N					
	KPU-W-18	Zona Pariwisata	Kab. Kutai Timur	Pantai Kenyamukan, Kec. Sangatta Utara-Kab. Kutai Timur	27.57	117° 36' 18.133" E	0° 28' 48.166" N					
	KPU-W-19	Zona Pariwisata	Kab. Kutai Timur	Pantai Tanjung Bara Aquatic, Kec. Sangatta Utara-Kab. Kutai Timur	309.03	117° 39' 45.276" E	0° 34' 32.179" N					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-W-20	Kawasan Pariwisata	Kab. Kutai Timur	Pantai Sekerat, Kec. Kaliorang -Kab. Kutai Timur	66.64	117° 47' 3.372" E	0° 46' 33.807" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan terminal ro-ro</li> <li>Pembangunan Tempatperbaikan kapal</li> <li>Uji coba kapal</li> <li>Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pengerukan diwilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Usaha pelayananjasa pemanduan kapal.</li> <li>Industri penggaraman</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>Penempatan kapal mati</li> <li>Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> </ul>	
		KPU-W-21	Kawasan Pariwisata	Kab. Kutai Timur	Pantai Selangka u, Kec. Kaliorang -Kab. Kutai Timur	258.61	117° 49' 44.812" E	0° 48' 4.200" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan terminal ro-ro</li> <li>Pembangunan Tempatperbaikan kapal</li> <li>Uji coba kapal</li> <li>Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pengerukan diwilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Usaha pelayananjasa pemanduan kapal.</li> <li>Industri penggaraman</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>Penempatan kapal mati</li> <li>Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> </ul>	
		KPU-W-22	Kawasan Pariwisata	Kab. Kutai Timur	P. Miang Kecil, Kec. Sangkulirang-Kab. Kutai Timur	245.43	118° 2' 35.795" E	0° 46' 32.432" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan terminal ro-ro</li> <li>Pembangunan Tempatperbaikan kapal</li> <li>Uji coba kapal</li> <li>Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pengerukan diwilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Usaha pelayananjasa pemanduan kapal.</li> <li>Industri penggaraman</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>Penempatan kapal mati</li> <li>Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> </ul>	
		KPU-W-23	Kawasan Pariwisata	Kab. Kutai Timur	P. Birah-Birahan, Kec. Kaliorang -Kab. Kutai Timur	270.89	118° 28' 22.541" E	0° 41' 30.516" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan terminal ro-ro</li> <li>Pembangunan Tempatperbaikan kapal</li> <li>Uji coba kapal</li> <li>Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pengerukan diwilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Usaha pelayananjasa pemanduan kapal.</li> <li>Industri penggaraman</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>Penempatan kapal mati</li> <li>Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> </ul>	
		KPU-W-24	Kawasan Pariwisata	Kab. Berau	P. Derawan, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	1,211.33	118° 13' 47.437" E	2° 17' 19.396" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan terminal ro-ro</li> <li>Pembangunan Tempatperbaikan kapal</li> <li>Uji coba kapal</li> <li>Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pengerukan diwilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Usaha pelayananjasa pemanduan kapal.</li> <li>Industri penggaraman</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>Penempatan kapal mati</li> <li>Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> </ul>	
		KPU-W-24	Kawasan Pariwisata	Kab. Berau	P. Derawan, Kec. P. Derawan-	157.5	118° 14' 27.670" E	2° 16' 49.482" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan terminal ro-ro</li> <li>Pembangunan Tempatperbaikan kapal</li> <li>Uji coba kapal</li> <li>Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pengerukan diwilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Usaha pelayananjasa pemanduan kapal.</li> <li>Industri penggaraman</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>Penempatan kapal mati</li> <li>Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Kab. Berau dan Kabel Bawah Laut Koridor Berau-Berau (Kepmen KP 14 2021): namkab IGG						<ul style="list-style-type: none"> <li>pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock</li> <li>Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;</li> <li>Pertambangan pasir di laut (tidak Boleh)</li> <li>Destructive fishing</li> <li>Pembuangan hasil pengerukan di laut (Dumping Area)</li> <li>Pemasangan Bagan Tancap</li> <li>Pemasangan Belat, Jermal</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove(madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan terminal Roro</li> <li>Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>Pengolahan dan Pemurnian mineral logam</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya</li> </ul>	
		KPU-W-24	Kawasan Pariwisata	Kab. Berau	P. Derawan, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	32.04	118° 12' 52.614" E	2° 16' 40.365" N					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi	dengan kapal nelayan kecil • Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung) • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industry • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan Pelabuhan • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>• Penetapan rute pelayaran internasional</li> <li>• Pembangunan PLTU</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>• Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>• Eksplorasi energi OTEC</li> <li>• Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional</li> <li>• Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Usaha wisata selancar</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Penetapan tempat labuh</li> <li>• Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha vila (cottage) di atas laut</li> <li>• Usaha restoran di atas laut</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal &lt;10 GT</li> <li>• Pengambilan barang - barang purbakala</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala</li> <li>• Penggunaan galah untuk mendorong perahu</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut</li> </ul>	



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil</li> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dalam</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dangkal</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan SquidJigging</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami</li> <li>• Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>• Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan</li> <li>• Penanaman kabel</li> <li>• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman dan atau pemancangan kabel tiang serta sarana di laut</li> <li>• Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> <li>• Pembangunan Kolarn pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>• Pembangunan TPI</li> <li>• Pembangunan turap (revetment)</li> <li>• Pembangunan groin;</li> <li>• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan</li> <li>• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintaspelabuhan antar kab/kota dalarn provinsi, antar provinsi dan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Pengangkutan dan penjualan Garam • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) • pengambilan air laut selain energi; • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut • Pipa intake dan outtake industri garam dan perikanan budidaya • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Fasilitas Terapung	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
												(Floating Facility) Migas: Mooring <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> </ul>	
2.	Zona Pelabuhan Umum	KPU-PL-01	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Paser	Teluk Apar, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	3,375.01	116° 25' 12.01 9" E	2° 5' 38.28 6" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>Pendidikan kegiatan konservasi</li> <li>Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>Pelepasan jangkar</li> <li>Penggunaan galah untuk mendorong perahu</li> <li>Pembangunan terminal ro-ro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata dayung</li> <li>Usaha wisata selam</li> <li>Usaha wisata selancar</li> <li>Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Bioteknologi /Bioteknologi Laut</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata edukasi</li> <li>Penanaman Pipa 0-20 cm</li> <li>Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan</li> <li>Latihan militer</li> <li>Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> </ul>		
		KPU-PL-02	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Paser	Teluk Adang-Kab. Paser	19,877.66	116° 23' 1.883 " E	1° 44' 22.38 9" S					
		KPU-PL-04	Zona Pelabuhan Umum	Kota Balikpapan	Pelabuhan Balikpapan, Teluk Balikpapan	36,039.04	116° 51' 42.14 6" E	1° 17' 53.42 6" S					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
		KPU-PL-04	Zona Pelabuhan Umum	Kota Balikpapan	Pelabuhan Balikpapan, Teluk Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	1,318.80	116° 54' 49.521" E	1° 22' 48.060" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan pemecah gelombang (breakwater)</li> <li>pembangunan groin; dari dan ke pelabuhan</li> <li>Penetapan alur pelayaran</li> <li>Usaha pelayaran perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>Pembangunan danpengoperasian Jetty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>penimbunan limbah B3</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>Industri penggaraman</li> <li>Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>Pelatihan perang menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penarikan (Towing)</li> <li>Pengapungan (refloating)</li> <li>Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim)</li> <li>Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja</li> <li>Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja</li> <li>Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal</li> </ul>		
		KPU-PL-04	Zona Pelabuhan Umum	Kota Balikpapan	Pelabuhan Balikpapan, Teluk Balikpapan dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	7,609.67	116° 53' 30.617" E	1° 21' 47.792" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Usaha angkutan laut badan</li> <li>usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi</li> <li>Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi danpelabuhan internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>Pelatihan perang menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim)</li> <li>Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja</li> <li>Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja</li> <li>Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal</li> </ul>		
		KPU-PL-04	Zona Pelabuhan Umum	Kota Balikpapan	Pelabuhan Balikpapan	484.82	116° 55'	1° 22' 52.054" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>danpelabuhan internasional</li> </ul>				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					an, Teluk Balikpapan dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk, serta Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)		54.400" E		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung;</li> <li>Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan dan Pemurnian mineral logam</li> <li>Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil</li> <li>Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung)</li> <li>Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>Usaha vila (cottage) di atas laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.</li> <li>Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut</li> <li>Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> </ul>	
		KPU-PL-04	Zona Pelabuhan Umum	Kota Balikpapan	PPI Filial Klandasan, Kec. Balikpapan Kota-Kota Balikpapan	46.14	116° 49' 54.190" E	1° 17' 14.239" S				
		KPU-PL-06	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Samarinda, Muara Mahakam-Kab.	161,337.16	117° 31' 21.880" E	0° 37' 12.826" S				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Kutai Kartanegara						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata snorkeling</li> <li>• Usaha wisata berenang</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Pengambilan terumbu karang</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut</li> <li>• Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri</li> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> <li>• Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal</li> <li>• Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan</li> <li>• Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing</li> <li>• Operasi Kapal Angkatan Penyeberangan Dalam Provinsi</li> <li>• Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional</li> </ul>	
		KPU-PL-06	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Samarinda, Muara Mahakam-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	275.37	117° 31' 15.008" E	0° 42' 44.228" S					
		KPU-PL-06	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Samarinda, Muara Mahakam-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Kutai Kartanegara-Offshore Eni	1,890.11	117° 22' 58.959" E	0° 59' 55.638" S					



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					(Kepmen KP 14 2021)								
		KPU-PL-06	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Samarinda, Muara Mahakam-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Muara Delta Mahakam-Pesisir Delta Mahakam (Kepmen KP 14 2021)	24,515.28	117° 30' 32.630" E	0° 37' 59.047" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>Pemasangan rumpon perairan dalam</li> <li>Pemasangan rumpon perairan dangkal</li> <li>Bongkar muat ikan</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> <li>Pembangunan PLTU</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>Eksplorasi energi OTEC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> <li>Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional</li> <li>Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu</li> <li>Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> </ul>		
		KPU-PL-06	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Samarinda, Muara Mahakam-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor	1,423.87	117° 18' 56.863" E	1° 2' 29.228" S		<ul style="list-style-type: none"> <li>Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>Pemasangan rumpon perairan dalam</li> <li>Pemasangan rumpon perairan dangkal</li> <li>Bongkar muat ikan</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> <li>Pembangunan PLTU</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>Eksplorasi energi OTEC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> <li>Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional</li> <li>Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu</li> <li>Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> </ul>		

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Sepinggan/Balikpapan-Offshore (Kepmen KP 14 2021)						<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif</li> <li>Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>Uji coba kapal</li> <li>Penetapan rute pelayaran internasional</li> <li>Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan</li> <li>Pembangunan turap (revetment)</li> <li>pembangunan groin</li> <li>Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>Penempatan kapal mati</li> <li>Pembangunan terminal Roro</li> <li>Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> </ul>	
		KPU-PL-06	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Samarinda, Muara Mahakam-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Sepingga/Offshore (Kepmen KP 14 2021)	1,791.58	117° 23' 16.691" E	0° 58' 36.875" S					
		KPU-PL-06	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Samarinda, Muara Mahakam-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor	402.80	117° 24' 11.628" E	0° 58' 41.252" S					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Sepinggan/Offshore dan Koridor Sepingga/Offshore (Kepmen KP 14 2021)						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring)</li> <li>• Pemusnahan handak migas</li> <li>• Pembangunan TPI</li> <li>• destructive fishing</li> <li>• Pertambangan pasir di laut</li> <li>• Pemasangan Bagan Tancap</li> <li>• Pemasangan Belat, Jermal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> <li>• Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Penetapan tempat labuh</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu</li> </ul>	
		KPU-PL-06	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	6,417.35	117° 39' 18.934" E	0° 18' 59.651" S					
		KPU-PL-07	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Tersus/TUKS, Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	712.48	117° 28' 44.771" E	0° 7' 9.540" S					
		KPU-PL-08	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Tanjung Santan, Kec. Marangk	485.26	117° 31' 38.715" E	0° 2' 24.126" S					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG						
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS			
					ayu-Kab. Kutai Kartanegara										
		KPU-PL-08	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Tanjung Santan, Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	57.72	117° 31' 30.599" E	0° 1' 40.205" S						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> <li>• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha wisata tontonan</li> <li>• Usaha restoran di atas laut</li> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Penangkapan ikan</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala</li> </ul>	
		KPU-PL-09	Zona Pelabuhan Umum	Kota Bontang	Pelabuhan Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	2,908.94	117° 31' 30.649" E	0° 4' 1.010" N						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Penangkapan ikan</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala</li> </ul>	
		KPU-PL-09	Zona Pelabuhan Umum	Kota Bontang	Pelabuhan Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan-	207.90	117° 34' 18.481" E	0° 2' 7.868" N						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Penangkapan ikan</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG					
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS		
					Kota Bontang dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)									
		KPU-PL-10	Zona Pelabuhan Umum	Kota Bontang	Tersus/TUKS, Selat Makassar, Kota Bontang	63.92	117° 38' 26.612" E	0° 5' 17.558" N					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan barang-barang bukan purbakala</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> </ul>	
		KPU-PL-11	Zona Pelabuhan Umum	Kota Bontang	Pelabuhan Lhok Tuan, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	1,909.95	117° 33' 31.298" E	0° 10' 13.896" N					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> </ul>	
		KPU-PL-12	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Pelabuhan Sangatta, Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	496.87	117° 34' 38.258" E	0° 22' 38.695" N					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Pengerukan perairan dengan capital dredging</li> </ul>	
		KPU-PL-13	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/TUKS, Kec. Sangatta	725.76	117° 37' 10.539" E	0° 28' 1.639" N					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Utara-Kab. Kutai Timur								
		KPU-PL-15	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/T UKS, Kec. Sangatta Utara-Kab. Kutai Timur	5,084.84	117° 40' 43.706" E	0° 31' 24.600" N					<ul style="list-style-type: none"> <li>material karang dan/atau batu</li> <li>Pengolahan &amp; Pemurnian Batubara</li> <li>Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral logam</li> <li>Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral radioaktif</li> <li>Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut</li> <li>Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik</li> <li>Penanaman kabel</li> <li>Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> </ul>
		KPU-PL-16	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/T UKS, Kec. Bengalon-Kab. Kutai Timur	271.00	117° 43' 22.839" E	0° 41' 31.985" N					
		KPU-PL-17	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/T UKS, Kec. Bengalon-Kab. Kutai Timur	2,123.39	117° 46' 34.337" E	0° 44' 46.464" N					
		KPU-PL-18	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/T UKS, Kec. Kaliorang, Kab. Kutai Timur	739.66	117° 49' 2.561" E	0° 46' 59.281" N					
		KPU-PL-19	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/T UKS, Kec. Kaliorang-Kab.	2,063.44	117° 52' 36.317" E	0° 47' 34.919" N					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Kutai Timur								
		KPU-PL-20	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Pelabuhan Maloy, Kec. Kaliorang-Kab. Kutai Timur	2,029.51	117° 54' 26.290" E	0° 46' 0.545" N					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan riset atau survei hidrografi</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 Kegiatan pekerjaan</li> <li>• penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).</li> <li>• Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>• Kegiatan pendalaman dan pelebaran alur pelayaran</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus salvage;</li> </ul>
		KPU-PL-21	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/TUKS, Kec. Sangkulirang-Kab. Kutai Timur	181.08	117° 59' 39.450" E	0° 46' 13.989" N					
		KPU-PL-22	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Teluk Sangkulirang-Kab. Kutai Timur	12,894.74	118° 1' 47.440" E	0° 55' 21.929" N					
		KPU-PL-23	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	STS Teluk Sangkulirang-Kab. Kutai Timur	875.24	118° 12' 48.000" E	0° 45' 12.000" N					
		KPU-PL-24	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/TUKS, Kec. Sandaran-Kab. Kutai Timur	571.21	118° 28' 45.833" E	0° 49' 6.529" N					
		KPU-PL-25	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/TUKS, Kec. Sandaran	137.87	118° 54' 36.394" E	0° 53' 35.092" N					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG					
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS		
					-Kab. Kutai Timur									
		KPU-PL-26	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	Tersus/TUKS, Kec. Sandaran -Kab. Kutai Timur	23.64	118° 58' 54.526" E	1° 0' 22.555" N					<ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>kegiatan penggunaan atau pemanfaatan air laut</li> <li>kegiatan perikanan budidaya yang tidak mengganggu aktivitas kepelabuhanan dan pelayaran.</li> </ul>	
		KPU-PL-27	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Berau	Pelabuhan Talisayan, Kec. Biatan dan Talisayan -Kab. Berau	185.01	118° 11' 1.346" E	1° 36' 40.077" N					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemasangan pipa intake dan outake industri dan perikanan</li> </ul>	
		KPU-PL-28	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Berau	STS Muara Berau, Kec. P. Derawan -Kab. Berau	4,053.3	118° 7' 51.874" E	1° 55' 13.555" N					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> </ul>	
		KPU-PL-29	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Berau	Muara Berau, Kec. P. Derawan -Kab. Berau	13,975.99	117° 51' 56.975" E	2° 5' 26.003" N					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area)</li> </ul>	
		KPU-PL-29	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Berau	Tg. Bingkar, Kec. Pulau Derawan-	13,676.28	117° 53' 30.587" E	2° 6' 37.343" N					<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> </ul>	



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Kab. Berau								
		KPU-PL-30	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Berau	Tg. Batu, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	166.41	118° 5' 52.167" E	2° 16' 19.728" N					
		KPU-PL-31	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Berau	KSNT P. Maratua dan P. Sambit: P. Maratua Kec. Maratua-Kab. Berau	1,222.08	118° 30' 37.019" E	2° 15' 58.590" N					
		KPU-PL-31	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Berau	KSNT P. Maratua dan P. Sambit: P. Maratua Kec. Maratua-Kab. Berau	236.31	118° 31' 45.957" E	2° 16' 26.792" N					
		KPU-PL-32	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Berau	KSNT P. Maratua dan P. Sambit: P. Maratua Kec. Maratua-Kab. Berau	405.55	118° 32' 43.150" E	2° 16' 37.208" N					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
3.	Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PL-03	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Penajam Paser Utara	PPI Api-Api, Kec. Waru-Kab. PPU	62.58	116° 34' 38.593" E	1° 26' 57.384" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>• Pendidikan kegiatan konservasi</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Pelepasan jangkar</li> <li>• Penggunaan galah untuk mendorong perahu</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata selancar</li> <li>• Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Pengolahan dan Pemurnian mineral logam</li> <li>• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha vila (cottage) di atas laut</li> <li>• Usaha wisata snorkeling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata edukasi</li> <li>• Penanaman Pipa 0-20 cm</li> <li>• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>• Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>• Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>• Penarikan (Towing)</li> <li>• Pengapungan (refloating)</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam</li> </ul>	
		KPU-PL-03	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Penajam Paser Utara	PPI Api-Api, Kec. Waru-Kab. PPU dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	98.66	116° 34' 37.076" E	1° 26' 34.369" S				
		KPU-PL-05	Zona Pelabuhan Umum	Kota Balikpapan	PPI Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timut-Kota Balikpapan	255.25	116° 58' 48.939" E	1° 13' 31.556" S				
		KPU-PL-11	Zona Pelabuhan Umum	Kota Bontang	PPI Tanjung Limau, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	62.57	117° 29' 29.110" E	0° 9' 20.767" N				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PL-11	Zona Pelabuhan Umum	Kota Bontang	PPI Tanjung Limau, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang. Reklamasi	1.61	117° 29' 25.436" E	0° 9' 7.335" N	Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata berenang</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Pengambilan terumbu karang</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rangka industri maritim)</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Perikanan bakar nelayan</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja</li> <li>• Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> <li>• Usaha jasa penyewaan</li> </ul>	
		KPU-PL-14	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	PPI Sangatta, Kec. Sangatta Utara-Kab. Kutai Timur	6.96	117° 36' 54.704" E	0° 29' 17.988" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja</li> <li>• Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> <li>• Usaha jasa penyewaan</li> </ul>	
		KPU-PL-14	Zona Pelabuhan Umum	Kab. Kutai Timur	PPI Sangatta, Kec. Sangatta Utara-Kab. Kutai Timur dan Kabel Bawah Laut Koridor Sanggata-Palu (Kepmen KP 14 2021): namkab Jaka2Ladema	63.44	117° 36' 43.735" E	0° 29' 12.362" N		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja</li> <li>• Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> <li>• Usaha jasa penyewaan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dalam</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dangkal</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan pukot hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami</li> <li>• Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peralatan angkutan laut</li> <li>• usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional</li> <li>• Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>• Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan</li> <li>• Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>• Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>• Pengoperasia Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan B48</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Batubara</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral logam</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral radioaktif</li> <li>• Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>• Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.</li> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan</li> <li>• Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin</li> <li>• Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG</li> <li>• Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring)</li> <li>• Pemusnahan handak migas</li> <li>• Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>• Pembangunan terminal ro-ro</li> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> <li>• Pembangunan terminal Roro</li> <li>• Eksplorasi energi OTEC</li> <li>• Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>• Pembangunan TPI</li> <li>• Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>• Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Penetapan tempat labuh</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										Provinsi , antar provinsi dan pelabuhan internasional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>• destructive fishing</li> <li>• Pertambangan pasir di laut</li> <li>• Pemasangan Belat, Jermal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung)</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Usaha wisata tontonan</li> <li>• Usaha restoran di atas laut</li> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Penangkapan ikan dengan</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang)</li> <li>• Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Penetapan rute pelayaran internasional</li> <li>• Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi</li> <li>• Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian</li> </ul>	



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											cement grinding plant dan cement packing plant • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Eksplorasi energi OTEC</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> <li>• Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Pengerukan perairan dengan capital dredging</li> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											instalasi pipanisasi di perairan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman kabel</li> <li>• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>• Penanaman dan ataupemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> <li>• Uji coba kapal</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>• Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan</li> <li>• Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing</li> <li>• Pengangkutan dan penjualan Garam</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>• Industri penggaraman</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Pembangunan PLTU</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pendalaman dan pelebaran alur pelayaran</li> <li>• saha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• pembangunan dan pengoperasian terminal khusus pertanian, perikanan dan peternakan alvage;</li> <li>• Kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>• Kegiatan penggunaan atau pemanfaatan air laut</li> <li>• Kegiatan perikanan budidaya yang tidak</li> <li>• mengganggu aktivitas kepelabuhanan dan pelayaran.</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Pemasangan pipa intake dan outake industri dan perikanan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area)</li> <li>Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing</li> </ul>	
4.	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-01	Kawasan Perikanan	Kab. Paser	Selat Makassar, Kab. Paser	213,833.91	116° 36' 11.747" E	2° 1' 5.811" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata edukasi</li> <li>Usaha wisata dayung</li> <li>Usaha wisata selam</li> <li>Usaha wisata memancing</li> <li>Usaha wisata selancar</li> <li>Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>Usaha dermaga wisata</li> <li>Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan terumbu karang</li> <li>Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> <li>Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing</li> <li>Reklamasi di wilayah perairan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Penanaman Pipa 0-20 cm</li> <li>Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>Pengintroduksian organisme hasil</li> </ul>	
		KPU-PT-01	Kawasan Perikanan	Kab. Paser/ Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar, Kab. Paser- Kab. Penajam Paser Utara dan Pipa Bawah Laut Koridor	3.75	116° 44' 45.435" E	1° 28' 43.730" S				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)				<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>Pengolahan dan Pemurnian mineral logam</li> <li>Pembangunan terminal curah CAIR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut</li> </ul>	
		KPU-PT-01	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar , Kab. Penajam Paser Utara	57,22 6.17	116° 43' 23.22 5" E	1° 29' 49.77 6" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan pukut hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> </ul>	
		KPU-PT-01	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar , Kab. Penajam Paser Utara dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	2,118 .31	116° 40' 32.28 5" E	1° 27' 35.42 3" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil</li> <li>Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung)</li> <li>Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal</li> <li>Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja</li> <li>Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja</li> <li>Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan</li> </ul>	
		KPU-PT-01	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar , Kab. Penajam Paser Utara	745.7 3	116° 49' 16.54 2" E	1° 25' 44.98 3" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha angkutan laut internasional wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan,</li> </ul>		

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					dan Pipa Bawah Laut Koridor Tajnung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha vila (cottage) di atas laut</li> <li>• Usaha wisata snorkeling</li> <li>• Usaha wisata tontonan</li> <li>• Usaha wisata berenang</li> <li>• Usaha restoran di atas laut</li> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>• Pendidikan kegiatan konservasi</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Pertambangan pasir di laut</li> <li>• Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area)</li> <li>• Destructive fishing</li> <li>• Pertambangan pasir di laut</li> <li>• Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing</li> <li>• Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut</li> <li>• usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional</li> <li>• Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>• Pengoperasia Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> </ul>	
		KPU-PT-01	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar , Kab. Penajam Paser Utara dan Pipa Bawah Laut Koridor Tajnung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan (Kepmen	100.6	116° 44' 8.235 " E	1° 27' 11.813 " S				



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
		KPU-PT-01	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar, Kab. Penajam Paser Utara dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	2,897.97	116° 46' 58.377" E	1° 26' 13.392" S	<p>pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan dengan</li> <li>• Pelepasan jangkar kapal</li> <li>• Penggunaan galah untuk mendorong perahu</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut</li> <li>• Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri</li> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>• Pembangunan PLTU</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan</li> <li>• Pembangunan terminal Roro</li> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan</li> <li>• Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu</li> <li>• Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal</li> </ul>		
		KPU-PT-01	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar, Kab. Penajam Paser Utara dan Pipa Bawah Laut Koridor	309.51	116° 46' 11.426" E	1° 26' 12.249" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hasil Budidaya</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> </ul>				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan rumpun perairan dalam</li> <li>• Pemasangan rumpun perairan dangkal</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil</li> <li>• budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> </ul>	
		KPU-PT-02	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar, Kab. Penajam Paser Utara	1,980.83	116° 47' 30.932" E	1° 24' 25.333" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan rumpun perairan dalam</li> <li>• Pemasangan rumpun perairan dangkal</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil</li> <li>• budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> </ul>	
		KPU-PT-02	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar, Kab. Penajam Paser Utara dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan (Kepmen	492.06	116° 48' 24.643" E	1° 24' 49.182" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan rumpun perairan dalam</li> <li>• Pemasangan rumpun perairan dangkal</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil</li> <li>• budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					KP 14 2021)				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penarikan (Towing)</li> <li>• Pengapungan (refloating)</li> <li>• Pemanfaatan dan pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Storage Production and Offloading)</li> <li>• Pengerukan perairan dengan capital dredging</li> <li>• Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>• Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> </ul>	
		KPU-PT-02	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar, Kab. Penajam Paser Utara dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	118.44	116° 46' 14.332" E	1° 23' 29.203" S				
		KPU-PT-03	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar, Kab. Penajam Paser Utara	735.42	116° 45' 1.634" E	1° 22' 25.186" S				
		KPU-PT-03	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Selat Makassar, Kab. Penajam Paser Utara dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-	459.38	459.38	1° 22' 52.567" S				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Offshore Teluk Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)							<ul style="list-style-type: none"> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif</li> <li>Pengolahan &amp; Pemurnian Batubara</li> <li>Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral logam</li> <li>Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral radioaktif</li> <li>Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut</li> <li>Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG</li> <li>Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring)</li> <li>Pemusnahan handak migas</li> <li>Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>Eksplorasi energi OTEC</li> <li>Penanaman kabel</li> </ul>	
		KPU-PT-04	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan	7,608.22	117° 2' 34.119" E	1° 22' 46.485" S					
		KPU-PT-04	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Balikpapan-Doda (Sulawesi Barat) (Kepmen KP 14 2021)	1,245.33	116° 59' 8.727" E	1° 18' 22.445" S					
		KPU-PT-04	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore	1,626.07	117° 1' 21.202" E	1° 21' 19.124" S					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Teluk Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)								
		KPU-PT-04	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	100.32	116° 58' 49.585" E	1° 16' 20.782" S				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Penetapan tempat labuh</li> <li>• Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> <li>• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>• Pembangunan terminal</li> <li>• Pembangunan terminal ro-ro</li> <li>• Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
		KPU-PT-04	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar, Kota Balikpapan	5,378.53	116° 58' 59.46" E	1° 18' 3.479" S				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Pembangunan TPI</li> <li>• Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>• Pembangunan turap (revetment)</li> <li>• pembangunan groin;</li> <li>• Uji coba kapal</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.</li> </ul>	
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Pipa Bawah Laut Koridor Sepinggan/Balikpapan-Offshore (Kepmen KP 14 2021) Pipa Gas Mubada Petroleum	213.36	117° 7' 29.619" E	1° 20' 59.934" S					
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan	5,481.87	117° 2' 52.881" E	1° 19' 17.679" S					
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan dan pipa Bawah Laut Koridor Sepinggan	150.17	117° 7' 41.250" E	1° 19' 58.015" S					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					n/Balikpapan-Offshore dan Kabel Bawah Laut Balikpapan-Doda (Sulawesi Barat) (Kepmen KP 14 2021)							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>• Pengoperasian Pelabuhan</li> <li>• Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>• Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>• Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi , antar provinsi dan pelabuhan internasional</li> <li>• Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> <li>• Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut</li> <li>• Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan</li> </ul>	
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Balikpapan-Doda (Sulawesi Barat) (Kepmen KP 14 2021)	3,320.95	117° 2' 55.88 2" E	1° 17' 20.58 8" S					
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-	70.9	116° 56' 36.51 3" E	1° 15' 32.94 7" S					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG					
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS		
					WP Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)									
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Balikpapan-Doda (Kepmen KP 14 2021)	293.81	116° 56' 53.716" E	1° 15' 22.462" S						<ul style="list-style-type: none"> <li>pengumpulan regional.</li> <li>Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi</li> <li>Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan</li> <li>Penetapan rute pelayaran internasional</li> <li>Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> <li>Pengangkutan dan penjualan Garam</li> <li>Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>Industri penggaraman</li> <li>Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> </ul>
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Mamuju-Balikpapan (Kepmen	208.15	116° 58' 15.847" E	1° 15' 23.594" S						



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG					
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS		
					KP 14 2021). Kabel IGG									
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Mamuju-Balikpapan (Kepmen KP 14 2021). Kabel Tsunami BPPT	979.79	117° 1' 53.560" E	1° 16' 24.075" S					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>• Pengintroduksian organisme hasil rekayasagenetika ke lingkungan</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> </ul>	
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	39.32	116° 58' 59.094" E	1° 15' 46.708" S					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pendalaman dan pelebaran alur pelayaran</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> <li>• salvage;</li> <li>• kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Pemasangan pipa intake dan outake</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PT-05	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan dan Kabel Bawah Laut Balikpapan-Doda (Sulawesi Barat) (Kepmen KP 14 2021)	223.92	116° 59' 22.394" E	1° 15' 7.458" S			<ul style="list-style-type: none"> <li>industri dan perikanan</li> <li>Pemasangan Belat/Jermal</li> </ul>	
		KPU-PT-06	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Pipa Bawah Laut Koridor Sepinggahan/Balikpapan-Offshore (Kepmen KP 14 2021) Pipa Gas Mubada Petroleum	1,128.88	117° 8' 21.675" E	1° 17' 1.352" S				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PT-06	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan	3,900.68	117° 6' 52.884" E	1° 16' 16.379" S				
		KPU-PT-06	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan dan Pipa Bawah Laut Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)	918.52	117° 0' 43.907" E	1° 12' 0.862" S				
		KPU-PT-06	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar, Kota Balikpapan-Kab. Kutai Kartanegara	1,247.61	117° 2' 58.440" E	1° 12' 58.050" S				
		KPU-PT-07	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Selat Makassar-Kota Balikpapan	4,457.35	117° 11' 51.608" E	1° 14' 48.072" S				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PT-08	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Muara Mahakam, Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	2,039.77	117° 28' 21.430" E	1° 4' 7.622" S				
		KPU-PT-08	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Pipa Bawah Laut Koridor Kutai Kertanegara-Offshore Eni (Kepmen KP 14 2021) Pipa Gas ENI Muara Bakau	644.07	117° 29' 20.550" E	1° 3' 33.155" S				
		KPU-PT-09	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Muara Mahakam, Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	51,784.67	117° 37' 12.717" E	0° 52' 59.123" S				
		KPU-PT-09	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Muara Mahakam, Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	1,377.13	117° 42' 51.408" E	0° 46' 55.764" S				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					ara dan Pipa Bawah Laut Koridor Muara Delta Mahakam-Pesisir Delta Mahakam (Kepmen KP 14 2021)								
		KPU-PT-09	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Pelabuhan Samarinda, Muara Mahakam-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Muara Delta Mahakam-Pesisir Delta Mahakam (Kepmen KP 14 2021)	3,015.40	117° 40' 59.845" E	0° 50' 44.138" S					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PT-10	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Muara Mahakam, Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	39,18 4.42	117° 45' 26.66 3" E	0° 30' 37.40 7" S				
		KPU-PT-10	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Muara Mahakam, Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	630.9 6	117° 46' 38.65 2" E	0° 20' 17.38 5" S				
		KPU-PT-10	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Muara Mahakam, Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Muara Delta	2,467 .72	117° 44' 29.62 5" E	0° 35' 48.26 2" S				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Mahakam-Pesisir Delta Mahakam (Kepmen KP 14 2021) dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)							
		KPU-PT-11	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara	1,850 5.18	117° 30' 7.268 " E	0° 13' 15.80 7" S				
		KPU-PT-11	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	3,863 .32	117° 33' 15.33 1" E	0° 7' 19.92 7" S				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PT-12	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar -Kab. Kutai Kartanegara	1,596.51	117° 32' 29.968" E	0° 8' 1.316" S				
		KPU-PT-13	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar -Kab. Kutai Kartanegara	14,880.69	117° 37' 48.353" E	0° 6' 25.914" S				
		KPU-PT-13	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar -Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	504.11	117° 35' 46.195" E	0° 6' 31.986" S				
		KPU-PT-14	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar -Kab. Kutai Kartanegara	716.59	117° 30' 56.796" E	0° 4' 21.081" S				
		KPU-PT-15	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar -Kab. Kutai	1,677.64	117° 35' 15.573" E	0° 4' 6.596" S				



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Kartanegara								
		KPU-PT-15	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara-Kota Bontang	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara-Kota Bontang	89.24	117° 33' 11.291" E	0° 0' 7.858" S					
		KPU-PT-15	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara-Kota Bontang	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	79,834.35	117° 40' 55.897" E	0° 10' 38.807" N					
		KPU-PT-15	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	8,416.59	117° 35' 52.939" E	0° 2' 30.120" S					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PT-15	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Selat Makassar -Kab. Kutai Timur	2651.13	117° 41' 17.023" E	0° 23' 28.634" N				
		KPU-PT-15	Kawasan Perikanan	Kota Bontang-Kab. Kutai Timur	Selat Makassar -Kab. Kutai Timur dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	263.55	117° 34' 1.318" E	0° 21' 50.029" N				
		KPU-PT-15	Kawasan Perikanan	Kota Bontang	Selat Makassar -Kota Bontang-Kab. Kutai Timur	13,693.96	117° 34' 37.815" E	0° 16' 19.095" N				
		KPU-PT-15	Kawasan Perikanan	Kota Bontang	Teluk Bontang-Kota Bontang	3805.03	117° 32' 46.340" E	0° 6' 55.019" N				
		KPU-PT-15	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Teluk Bontang-Kota Bontang dan Pipa Bawah Laut Koridor	2631.63	117° 37' 32.070" E	0° 4' 18.276" N				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)								
		KPU-PT-16	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara-Kota Bontang	1,891.25	117° 32' 3.216" E	0° 1' 30.219" S					
		KPU-PT-16	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Selat Makassar-Kab. Kutai Kartanegara dan Pipa Bawah Laut Koridor Bontang-Offshore (Kepmen KP 14 2021)	187.53	117° 32' 5.992" E	0° 1' 30.194" S					
		KPU-PT-17	Kawasan Perikanan	Kota Bontang	Teluk Bontang-Kota Bontang	2,103.73	117° 31' 23.083" E	0° 3' 20.872" N					
		KPU-PT-18	Kawasan Perikanan	Kota Bontang	Teluk Bontang-Kota Bontang	787.45	117° 29' 39.036" E	0° 4' 14.618" N					
		KPU-PT-19	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Selat Makassar-Kab.	12,372.53	117° 41'	0° 25' 26.503" N					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Kutai Timur		29.926" E						
		KPU-PT-19	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Selat Makassar-Kab. Kutai Timur dan Kabel Bawah Laut Koridor Sanggata-Pahu (Kepmen KP 14 2021): namkab Jaka2Ladema	70.31	117° 36' 38.308" E	0° 28' 57.721" N					
		KPU-PT-20	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Selat Makassar-Kab. Kutai Timur	1307.19	117° 47' 20.693" E	0° 25' 48.055" N					
		KPU-PT-21	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur-Kab. Berau	Laut Sulawesi-Kab. Kutai Timur-Kab. Berau	737,549.08	118° 33' 0.849" E	1° 5' 56.858" N					
		KPU-PT-21	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Selat Makassar-Kab. Kutai Timur	18,620.06	117° 45' 21.537" E	0° 39' 15.007" N					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PT-21	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Selat Makassar -Kab. Kutai Timur dan Kabel Bawah Laut Koridor Sanggata -Palu (Kepmen KP 14 2021): namkab Jaka2Ladema	2,381.91	117° 43' 16.870" E	0° 27' 34.284" N				
		KPU-PT-21	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Selat Makassar, Kab. Kutai Timur	13,195.76	118° 39' 41.927" E	0° 49' 45.951" N				
		KPU-PT-21	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Teluk Sangkulirang-Selat Makassar -Kab. Kutai Timur	15,311.3	117° 58' 40.903" E	0° 45' 34.880" N				
		KPU-PT-21	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Teluk Sangkulirang, Kab. Kutai Timur	15,054.87	118° 8' 30.567" E	0° 50' 26.632" N				
		KPU-PT-21	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Tg. Mangkalahat, Kec.	2,476.7	118° 57'	0° 58' 22.764" N				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Sandaran -Kab. Kutai Timur dan Kec. Biduk-Biduk-Kab. Berau		22.908" E						
		KPU-PT-22	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Laut Sulawesi-Kab. Berau	25,3149.27	118° 18' 31.870" E	1° 54' 20.556" N					
		KPU-PT-23	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Muara Berau, Laut Sulawesi-Kab. Berau dan Kabel Bawah Laut Koridor Berau-Berau (Kepmen KP 14 2021): namkab IGG	89.96	118° 14' 38.868" E	2° 16' 15.867" N					
		KPU-PT-23	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Muara Berau, Laut Sulawesi-Kab. Berau	45,813.69	118° 4' 58.854" E	2° 6' 51.018" N					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-PT-23	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Muara Berau, Laut Sulawesi-Kab. Berau dan Kabel Bawah Laut Koridor Berau-Berau (Kepmen KP 14 2021): namkab IGG	5,745 .15	118° 7' 38.25 0" E	2° 6' 53.85 4" N				
		KPU-PT-23	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Kabel IGG Dari dan Ke P. Derawan Kab. Berau (Jalur Segmen S14.3 Mangkajang-BU7A)	2635. 07	118° 7' 22.09 1" E	2° 12' 56.21 0" N				
		KPU-PT-24	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Laut Sulawesi-Kab. Berau	121,8 31.92	118° 13' 42.58 0" E	2° 24' 41.99 5" N				
		KPU-PT-24	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Laut Sulawesi-Kab. Berau dan Kabel	1,091 .75	118° 18' 56.17 2" E	2° 17' 20.41 8" N				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Bawah Laut Koridor Berau-Berau (Kepmen KP 14 2021): namkab IGG								
		KPU-PT-25	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Laut Sulawesi-Kab. Berau	13,610	118° 29' 15.739" E	2° 24' 52.185" N					
		KPU-PT-26	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	KSNT P. Maratua dan P. Sambit: Laut Sulawesi-Kab. Berau	22,397.93	118° 35' 27.507" E	2° 27' 5.675" N					
		KPU-PT-27	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	KSNT P. Maratua dan P. Sambit: Laut Sulawesi-Kab. Berau	72,833.45	118° 46' 44.178" E	2° 14' 0.780" N					
		KPU-PT-27	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	KSNT P. Maratua dan P. Sambit: Laut Sulawesi-Kab. Berau	1,691.71	118° 38' 54.672" E	2° 24' 59.970" N					



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					dan Kabel Bawah Laut Koridor Berau-Berau (Kepmen KP 14 2021): namkab IGG							
		KPU-PT-28	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	P. Maratua, Kec. Maratua-Kab. Berau	5,019.87	118° 37' 44.642" E	2° 13' 4.861" N				
		KPU-PT-29	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Laut Sulawesi-Kab. Berau	44,105.34	119° 4' 21.528" E	1° 54' 15.181" N				
		KPU-PT-30	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Laut Sulawesi-Kab. Berau	6,033.82	119° 12' 35.698" E	1° 45' 56.412" N				
5.	Zona Perikanan Budi Daya	KPU-BD-01	Kawasan Perikanan	Kab. Paser	Teluk Adang, Kec. Kuaro-Kab. Paser	278.81	116° 17' 4.269" E	1° 45' 42.681" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata edukasi</li> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata selancar</li> <li>• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> <li>• Reklamasi di wilayah perairan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata dayung</li> <li>• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>• Penanaman Pipa 0-20 cm</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-BD-02	Kawasan Perikanan	Kab. Paser	Teluk Adang, Kec. Long Kali dan Long Ikis-Kab. Paser	2,23 1.09	116° 26' 5.204" E	1° 40' 8.130" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil</li> <li>Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera indonesia</li> <li>Usaha dermaga wisata</li> <li>Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>Usaha wisata tontonan</li> <li>Usaha wisata alam perairan</li> <li>Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>Pengambilan foto/video bawah laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>Pengambilan terumbu karang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut</li> <li>Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja</li> <li>Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja</li> <li>Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan</li> <li>Pengoperasia Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> </ul>	
		KPU-BD-03	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Pantai Babulu, Kec. Babulu-Kab. PPU	308. 90	116° 33' 27. 688" E	1° 27' 48. 923" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha dermaga wisata</li> <li>Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>Usaha wisata tontonan</li> <li>Usaha wisata alam perairan</li> <li>Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>Pengambilan foto/video bawah laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>Pengambilan terumbu karang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut</li> <li>Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja</li> <li>Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja</li> <li>Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan</li> <li>Pengoperasia Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> </ul>	
		KPU-BD-04	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Pantai Api-Api, Kec. Waru-Kab. PPU	240. 03	116° 35' 53. 530" E	1° 25' 53. 628" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha dermaga wisata</li> <li>Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>Usaha wisata tontonan</li> <li>Usaha wisata alam perairan</li> <li>Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>Pengambilan foto/video bawah laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>Pengambilan terumbu karang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut</li> <li>Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja</li> <li>Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja</li> <li>Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan</li> <li>Pengoperasia Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> </ul>	
		KPU-BD-04	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Pantai Api-Api, Kec. Waru-Kab. PPU dan Kabel	22.9 6	116° 34' 56. 859" E	1° 26' 26. 851" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha dermaga wisata</li> <li>Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>Usaha wisata tontonan</li> <li>Usaha wisata alam perairan</li> <li>Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>Pengambilan foto/video bawah laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>Pengambilan terumbu karang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut</li> <li>Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja</li> <li>Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja</li> <li>Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan</li> <li>Pengoperasia Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					Bawah Laut Koridor Panajam-WP Balikpapan (Kepmen KP 14 2021)				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>• Pendidikan kegiatan konservasi</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah;daun; buah dan biji; tanin;ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut</li> <li>• Pembudidayaan ikan untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal <math>\geq</math> 30GT</li> <li>• Pelepasan jangkar</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dalam</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dangkal</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan pukut hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Usaha pelayaran perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan</li> <li>• Pembangunan terminal Roro</li> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran</li> </ul>	
		KPU-BD-05	Kawasan Perikanan	Kab. Penajam Paser Utara	Teluk Balikpapan, Kec. Penajam -Kab. PPU	243.03	116° 45' 57.982" E	1° 18' 44.357" S				
		KPU-BD-06	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	P. Balang Teluk Balikpapan - Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan	25.01	116° 43' 53.16" E	1° 6' 54.617" S				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-BD-07	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Pantai Manggar, Kec. Balikpapan Timur-Kota Balikpapan	176.24	116° 57' 54.9" E	1° 14' 0.315" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>kepentingan industri</li> <li>Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil</li> <li>Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>Pengerukan perairan dengan capital dredging</li> <li>Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan</li> <li>Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>Pengolahan dan Pemurnian mineral logam</li> <li>Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>Usaha wisata selam</li> <li>Usaha wisata memancing</li> <li>Usaha wisata olahraga tirta</li> </ul>	
		KPU-BD-08	Kawasan Perikanan	Kota Balikpapan	Pantai Lamaru, Kec. Balikpapan Timur-Kota Balikpapan	338.20	117° 1' 16.356" E	1° 9' 58.755" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>kepentingan industri</li> <li>Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil</li> <li>Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>Pengerukan perairan dengan capital dredging</li> <li>Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan</li> <li>Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>Pengolahan dan Pemurnian mineral logam</li> <li>Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>Usaha wisata selam</li> <li>Usaha wisata memancing</li> <li>Usaha wisata olahraga tirta</li> </ul>	
		KPU-BD-09	Kawasan Perikanan	Kota Bontang	Tanjung Manukmanukan, Kec. Bontang Selat	86.61	117° 31' 12.231" E	0° 2' 50.302" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>kepentingan industri</li> <li>Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil</li> <li>Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>Pengerukan perairan dengan capital dredging</li> <li>Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan</li> <li>Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>Pengolahan dan Pemurnian mineral logam</li> <li>Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>Usaha wisata selam</li> <li>Usaha wisata memancing</li> <li>Usaha wisata olahraga tirta</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
					an-Kota Bontang				<ul style="list-style-type: none"> <li>Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>Pemanfaatan dan pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya</li> <li>Pembangunann sarana prasaranapendukung budidaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan PLTU</li> <li>Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik</li> <li>Eksplorasi energi OTEC</li> <li>Pertambangan pasir di laut</li> <li>Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area)</li> <li>Destructive fishing</li> <li>Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>Usaha vila (cottage) di atas laut</li> <li>Usaha wisata snorkeling</li> <li>Usaha wisata berenang</li> <li>Usaha restoran di atas laut</li> <li>Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal &lt;30 GT</li> <li>Pengambilan barang-barang purbakala</li> <li>Pengambilan barang-barang selain barang purbakala</li> <li>Penggunaan galah untuk mendorong perahu</li> <li>Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Gill</li> </ul>	
		KPU-BD-10	Kawasan Perikanan	Kota Bontang	P. Badak-badak, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	465.54	117° 31' 22.518" E	0° 9' 12.146" N				
		KPU-BD-11	Kawasan Perikanan	Kota Bontang	P. Selokia, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	15.46	117° 30' 12.355" E	0° 11' 23.851" N				
		KPU-BD-12	Kawasan Perikanan	Kota Bontang	Tanjung Pukul, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang dan Kec. Teluk Pandan-Kab.	1,27 1.43	117° 31' 35.613" E	0° 11' 52.819" N				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Kukar								
		KPU-BD-13	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	P. Miang Besar, Kec. Sangkulirang-Kab. Kutai Timur	197.03	118° 0' 12.006" E	0° 44' 33.284" N				<ul style="list-style-type: none"> <li>Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya</li> <li>Penanaman kabel</li> <li>Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>Penanaman dan atau pemancangan</li> </ul>	
		KPU-BD-14	Kawasan Perikanan	Kab. Kutai Timur	Tg. Mangkalihat, Kec. Sandaran - Kab. Kutai Timur	45.22	118° 58' 1.201" E	1° 2' 20.407" N				<ul style="list-style-type: none"> <li>Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya</li> <li>Penanaman kabel</li> <li>Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>Penanaman dan atau pemancangan</li> </ul>	
		KPU-BD-15	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Pulau Balikpapan, Kec. Batu Putih - Kab. Berau	3,571.44	118° 36' 49.1" E	1° 32' 33.176" N				<ul style="list-style-type: none"> <li>Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya</li> <li>Penanaman kabel</li> <li>Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>Penanaman dan atau pemancangan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-BD-16	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Tebabing a, Kec. P. Derawan- Kab. Berau dan Kabel Bawah Laut Kori dor Berau- Berau (Kepmen KP 14 2021): namkab IGG	6,34 7.25	118° 15' 51.97 0" E	2° 13' 38.74 1" N			<ul style="list-style-type: none"> <li>kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>Penetapan tempat labuh</li> <li>Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> <li>Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> <li>Penempatan kapal mati</li> <li>Pembangunan TPI</li> <li>Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>Pembangunan turap (revetment)</li> <li>pembangunan groin;</li> <li>Uji coba kapal</li> <li>Usaha pelayananperbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan :</li> </ul>	
		KPU-BD-17	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Tg. Panda n dan Tg. Batu Kec. P.	208. 42	118° 5' 55.75 6" E	2° 19' 4.130 " N				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Derawan-Kab. Berau								
		KPU-BD-18	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Tg. Karangti gau, Kec. P. Derawan-Kab. Berau	1,69 6.46	118° 2' 3.99 0" E	2° 23' 59. 36 3" N					
		KPU-BD-19	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Teluk P. Maratua, Kec. Maratua - Kab. Berau	306. 19	118° 38' 47. 84 6" E	2° 10' 37. 32 3" N					
		KPU-BD-20	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Teluk P. Maratua, Kec. Maratua - Kab. Berau	240. 29	118° 35' 25.81 6" E	2° 13' 33.19 8" N					
		KPU-BD-21	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Teluk P. Maratua, Kec. Maratua - Kab. Berau	103. 0	118° 36'39 .02 3" E	2°15' 41.2 71" N					



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
		KPU-BD-22	Kawasan Perikanan	Kab. Berau	Teluk P. Maratua, Kec. Maratua - Kab. Berau	1,107.11	118° 34'40.70 3" E	2°16' 44.25 4" N			pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas</li> </ul>	



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											Sekunder dan pantai air) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri penggaraman</li> <li>• Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>• Penarikan (Towing)</li> <li>• Pengapungan (refloating)</li> <li>• Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>• Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Pipa intake dan outake industri dan kegiatan perikanan</li> <li>• Pemasangan Bagan Tancap</li> <li>• Pemasanga Belat, Jermal</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
6.	Zona Industri	KPU-I-01	Zona Industri	Kota Bontang	Reklamas i Kilang Minyak, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	41.75	117° 29' 37.559" E	0° 2' 35.128" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung)</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> <li>• Pengambilan terumbu karang</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Penangkapan ikan</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata edukasi</li> <li>• Penanaman Pipa 0-20 cm</li> <li>• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>• kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>• Kegiatan Reklamasi</li> <li>• Usaha wisata dayung</li> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim)</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan</li> </ul>	
		KPU-I-02	Zona Industri	Kota Bontang	Reklamas i Kilang Minyak, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	181.68	117° 28' 8,597" E	0° 5' 26,187" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>• Pendidikan kegiatan konservasi</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat</li> <li>• Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> <li>• Pengambilan terumbu karang</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Penangkapan ikan</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata edukasi</li> <li>• Penanaman Pipa 0-20 cm</li> <li>• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>• kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>• Kegiatan Reklamasi</li> <li>• Usaha wisata dayung</li> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim)</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
									<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat</li> <li>• perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).</li> <li>• Penarikan (Towing)</li> <li>• Pengapungan (refloating)</li> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen systemseluas <math>\geq</math> 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kapal/alat-alat terapung saja</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja</li> <li>• Industri penggaraman</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>• Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing</li> <li>• Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing</li> <li>• Penetapan rute pelayaran internasional</li> <li>• Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut</li> <li>• usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>• Pemasangan rumpun perairan dalam</li> <li>• Pemasangan rumpun perairan dangkal</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan pukot hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)</li> </ul>	Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>• Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>• Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Uji coba kapal</li> <li>• Pembangunan terminal Roro</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>• Pengolahan dan Pemurnian mineral logam</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Pengerukan perairan dengan capital dredging</li> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Penetapan tempat labuh</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>• Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> <li>• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> </ul>	



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Batubara</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral logam</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral radioaktif</li> <li>• Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut</li> <li>• Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG</li> <li>• Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring)</li> <li>• Pemusnahan handak migas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha vila (cottage) diatas laut</li> <li>• Usaha wisata berenang</li> <li>• Usaha restoran di atas laut</li> <li>• Usaha wisata alamperairan</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Usaha wisata snorkeling</li> <li>• Usaha wisata berenang</li> <li>• Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>• Usaha restoran di atas laut</li> <li>• Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>• Usaha wisata tontonan</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Pelepasan jangkar</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Penggunaan galah untuk mendorong perahu</li> <li>• Penanaman kabel</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan</li> <li>• Pembangunan terminal ro-ro</li> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>• Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>• Pembangunan turap (revetment)</li> <li>• pembangunan groin;</li> <li>• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan</li> <li>• Pengerukan di wilayah perairan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> <li>• Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut</li> <li>• Penetapan rute pelayaran bongkar muat oleh kapal asing</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.</li> <li>• Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>• Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Pipa intake dan outake industri dan kegiatan perikanan/kelautan</li> <li>• Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>• Latihan militer</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility)</li> <li>Migas: Mooring</li> <li>• Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>• Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pembangunan PLTU</li> <li>• Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>• Eksplorasi energi OTEC</li> <li>• Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> <li>• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> <li>• Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>• Pembangunan TPI</li> <li>• Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											bagi kepentingannya sendiri. • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu	
7.	Zona Bandar Udara	KPU-BU-01	Zona Bandar Udara	Kota Balikpapan	Reklamas i Bandara Sepingg an, Kec. Balikpapan Selatan-Kota Balikpapan	158.02	116° 53' 15.890" E	1° 16' 25.302" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana pendukung bandar udara</li> <li>• Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian dan pendidikan kegiatan konservasi</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan bandar udara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>• Penanaman Pipa 0-20 cm</li> <li>• kegiatan penggelaran/pemas an gan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata edukasi</li> <li>• Kegiatan Reklamasi</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
									<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain;</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>• Penarikan (Towing)</li> <li>• Pengapungan (refloating)</li> <li>• Industri penggaraman</li> <li>• Konstruksi Pertambangan Garam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal</li> <li>• Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing</li> <li>• Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing</li> <li>• Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan</li> <li>• Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional</li> <li>• Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Pengoperasia Pelabuhan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut</li> <li>• usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional</li> <li>• Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>• Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> <li>• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>• Usaha wisata tontonan</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Pembangunan kabel</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>• Uji coba kapal</li> <li>• Pembangunan terminal Roro</li> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan</li> <li>• Pengolahan dan Pemurnian mineral logam</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>• Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>• Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>• saha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>• Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>• Pembangunan turap (revetment)</li> <li>• pembangunan groin;</li> <li>• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan</li> </ul>	



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung)</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Penetapan tempat labuh</li> <li>• Penanaman kabel</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Latihan Militer</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengerukan di wilayah perairan pelabuhan</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Pipa intake dan outake industri dan kegiatan perikanan/kelautan</li> <li>• Pembangunan Floating</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
											logam, batuan, batubara, mineral radioaktif <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Pengambilan terumbu karang</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan</li> <li>• mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin;</li> <li>• ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Penangkapan ikan</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala</li> <li>• Pelepasan jangkar</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk</li> </ul>		

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
										kepentingan ekonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dalam</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dangkal</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan pukot hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Terapung</li> </ul>			

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
											(Floating Facility) Migas: Mooring <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>• Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating</li> </ul>		

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Production Storage and Offloading)</li> <li>• Pengerukan perairan dengan capital dredging</li> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>• Pembangunan PLTU</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Batubara</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral logam</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> </ul>		

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral radioaktif</li> <li>• Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut</li> <li>• Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG</li> <li>• Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring)</li> <li>• Pemusnahan handak migas</li> <li>• Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>• Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>• Eksplorasi energi OTEC</li> <li>• Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> <li>• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> </ul>			

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan terminal ro-ro</li> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Pembangunan TPI</li> <li>• Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.</li> <li>• Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional</li> <li>• Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> <li>• Usaha jasa penyewaan</li> </ul>		

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
											peralatan angkutan laut <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi</li> <li>• Penetapan rute pelayaran internasional</li> <li>• Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.</li> <li>• Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>• Pertambangan pasir di laut</li> <li>• Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area)</li> <li>• Destructive fishing</li> </ul>		



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
8.	Zona Pertahanan dan Keamanan	KPU- PK-01	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kab. Berau	KSNT P. Maratua dan P. Sambit: Karang Muaras Barat, P. Sambit Kec. Maratua-Kab. Berau	3.14	119° 2' 23.38 5" E	1° 47' 4.532 " N	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan kelautan</li> <li>• Penetapan tempat labuh</li> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan</li> <li>• Mitigasi Bencana dan Kondisi dadrut di laut;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha vila (cottage) di atas laut</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal</li> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Usaha restoran di atas laut</li> <li>• Pengambilan terumbu karang</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah;daun; buah dan biji; tanin;ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata edukasi</li> <li>• Penanaman Pipa 0-20 cm</li> <li>• kegiatan penggelaran/pemangan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas</li> </ul>	
		KPU- PK-02	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kab. Berau	Perlindungan Titik Dasar dan/atau Titik Referensi P. Maratua, Kec. Maratua-Kab. Berau	3.14	118° 38' 40.92 0" E	2° 15' 11.88 1" N				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										batubara, mineral radioaktif <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas <math>\geq 5</math> Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>• Usaha jasa perjalanan</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>• Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG</li> <li>• Pembangunan TPI</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; Usaha pelayanan logistik</li> </ul>	pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengoperasia Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Pembangunan terminal Roro</li> <li>• Pengolahan dan Pemurnian mineral logam</li> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>• Usaha wisata dayung</li> <li>• Usaha wisata selam</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.</li> <li>Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata memancing</li> <li>Usaha wisata selancar</li> <li>Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>Usaha dermaga wisata</li> <li>Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>Usaha wisata snorkeling</li> <li>Usaha wisata tontonan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengumpulan regional.</li> <li>• Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing</li> <li>• Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>• Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>• Kegiatan pembuatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata berenang</li> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian dan pendidikan kegiatan konservasi</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Penangkapan ikan</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dalam</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>kapal/alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut</li> <li>• Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan Pertambangan pasir di laut</li> <li>• Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area)</li> <li>• Destructive fishing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan rumpon perairan dangkal</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											Pancing Rawai Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>Production Storage and Offloading)</li> <li>• Pengerukan perairan dengan capital dredging</li> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material</li> <li>• karang dan/atau batu</li> <li>• Pembangunan PLTU</li> <li>• Pembangunan Storage Offloading (FSO)</li> <li>• Pembangunan Floating</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Batubara</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral logam</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral radioaktif</li> <li>• Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut</li> <li>• Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring)</li> <li>• Pemusnahan handak migas</li> <li>• Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>• Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>• Eksplorasi energi OTEC</li> <li>• Penanaman kabel</li> </ul>	



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>• Industri penggaraman</li> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>• Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											sedang mendapat malapetaka <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>• Penarikan (Towing)</li> <li>• Pengapungan (refloating)</li> <li>• Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>• Pipa intake dan outake industri garam</li> <li>• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Penetapan tempat labuh</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> <li>• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> <li>• Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>• Pembangunan terminal ro-ro</li> <li>• Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>• Pembangunan turap (revetment)</li> <li>• pembangunan groin;</li> <li>• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan</li> <li>• Uji coba kapal</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>• Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhaninternasional</li> <li>• Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> <li>• Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut</li> <li>• Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi</li> <li>• Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan rute pelayaran internasional</li> <li>• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.</li> <li>• Pengangkutan dan penjualan Garam</li> <li>• Konstruksi Pertambangan Garam</li> </ul>	
9.	Zona Permukiman	KPU-PM-01	Kawasan Permukiman	Kota Bontang	P. Tihik-Tihik, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	2.35	117° 31' 43.999" E	0° 3' 55.100" N	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata edukasi</li> <li>• Usaha wisata dayung</li> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha wisata snorkeling</li> <li>• Usaha wisata tontonan</li> <li>• Usaha wisata berenang</li> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan terumbu karang</li> <li>• Pembuangan Limbah</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung)</li> <li>• Penanaman Pipa 0-20 cm</li> <li>• kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> </ul>	
		KPU-PM-02	Kawasan Permukiman	Kota Bontang	Tanjung Selangan, Kec. Bontang Selatan-Kota Bontang	2.69	117° 30' 31.165" E	0° 4' 4.019" N				
		KPU-PM-03	Kawasan Permukiman	Kota Bontang	P. Melahing, Kec. Bontang Selatan-	1.96	117° 31' 49.690" E	0° 6' 53.222" N				

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
					Kota Bontang					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil</li> <li>• Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri</li> <li>• Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>• Pendidikan kegiatan konservasi</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja</li> <li>• Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>• Industri penggaraman</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>• Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali</li> </ul>	
		KPU-PM-04	Kawasan Permukiman	Kota Bontang	Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	22.50	117° 31' 11.78 4" E	0° 8' 13.42 6" N					
		KPU-PM-05	Kawasan Permukiman	Kota Bontang	P. Gusung Dua, Kec. Bontang Utara-Kota Bontang	2.73	117° 30' 39.70 6" E	0° 11' 26.62 0" N					

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
									<p>mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</p>	<p>bukan logam atau mineral batuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Batubara</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral logam</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral radioaktif</li> <li>• Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut</li> <li>• Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG</li> <li>• Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring)</li> <li>• Pemusnahan handak migas</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Pembangunan terminal ro- ro</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan</li> </ul>	<p>dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan rute pelayaran internasional</li> <li>• Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan</li> <li>• Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional</li> <li>• Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>• Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Pengoperasia Pelabuhan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Pertambangan pasir di laut</li> <li>• Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area)</li> <li>• Destructive fishing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>• Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>• Pembangunan terminal Roro</li> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>• Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>• Pengolahan dan Pemurnian mineral logam</li> <li>• Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> </ul>	



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
												<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>• Penetapan tempat labuh</li> <li>• Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional</li> <li>• Usaha wisata selancar</li> <li>• Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>• Usaha dermaga permukiman</li> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian cement grinding</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											plant dan cement packing plant <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/ delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.</li> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Uji coba kapal</li> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>• Pembangunan PLTU</li> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengerukan perairan dengan capital dredging</li> <li>• Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>• Eksplorasi energi OTEC</li> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> <li>• Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha vila (cottage) di atas laut</li> <li>• Usaha restoran di atas laut</li> <li>• Usaha Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan;</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											hasil hutan bukan kayu lainnya) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal &lt;10GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala</li> <li>• Pengambilan barang- barang selain barang purbakala</li> <li>• Pelepasan jangkar</li> <li>• Penggunaan galah untuk mendorong perahu Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industr Pembangunan Fasilitas penggaraman</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung;</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>• Pemasangan rumpun perairan dangkal</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik</li> <li>• Penanaman kabel</li> <li>• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
												<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> <li>• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>• Pembangunan TPI</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>• Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>• Pembangunan turap (revetment)</li> <li>• pembangunan groin;</li> <li>• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan</li> <li>• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Pengoperasian Pelabuhan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>• Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional</li> <li>• Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> <li>• Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut</li> <li>• Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing</li> <li>• Pengangkutan dan penjualan Garam</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).</li> <li>• Penarikan (Towing)</li> <li>• Pengapungan (refloating)</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Kegiatan budidaya biota laut untuk</li> </ul>	



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pipa intake dan outtake</li> <li>industri garam dan perikanan budidaya</li> <li>Kegiatan tambat perahu</li> <li>Kegiatan fasilitas umum</li> <li>Kegiatan pendidikan dan penelitian umum</li> <li>Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing</li> </ul>	
10.	Zona Perdagangan Barangan dan/atau Jasa	KPU-JP-01	Zona Fasilitas Umum	Kota Balikpapan	Coastal Road, Kec. Balikpapan Selatan dan Kec. Balikpapan Kota-Kota Balikpapan	485.8	116° 50' 28.550" E	1° 16' 53.997" S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha wisata edukasi</li> <li>Usaha wisata dayung</li> <li>Usaha wisata memancing</li> <li>Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>Usaha jasa perjalanan wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan terumbu karang</li> <li>Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>Penangkapan ikan menggunakan Gill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>Penanaman Pipa 0-20 cm</li> <li>Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>kegiatan penggelaran/pemasa</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
									<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata snorkeling</li> <li>• Usaha wisata tontonan</li> <li>• Usaha wisata berenang</li> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>• Pendidikan kegiatan konservasi</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan</li> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana publik</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan kelautan</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Pembuangan Limbah Pembudidayaan ikan</li> <li>• untuk kepentingan industri</li> <li>• Usaha budidaya perikanan</li> <li>• terapung (jaring apung dan pen system seluas <math>\geq 5</math> Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan</li> <li>• Kapal Pengangkut Ikan</li> <li>• Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls),</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• n gan kabel/pipa bawah laut;</li> <li>• Kegiatan Reklamasi</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
									<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>Kegiatan pengujian kapal</li> <li>perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif</li> <li>Pengolahan &amp; Pemurnian Batubara</li> <li>Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral logam</li> <li>engolahan &amp; Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal</li> <li>Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>Penetapan rute pelayaran internasional</li> <li>Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut</li> <li>Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur, antar Provinsi dan pelabuhan internasional</li> <li>Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral radioaktif</li> <li>• Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut</li> <li>• Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG</li> <li>• Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring)</li> <li>• Pemusnahan handak migas</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> <li>• Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>• Pembangunan terminal ro-ro</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>• Pengoperasia Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>• Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>• Pembangunan terminal Roro</li> <li>• Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung)</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pancing Rawai Dasar</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal</li> <li>• Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing</li> <li>• Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>• Pengolahan dan Pemurnian mineral logam</li> <li>• Penetapan tempat labuh</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> <li>• Pertambangan pasir di laut</li> <li>• Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area)</li> <li>• Destructive fishing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional</li> <li>• Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan</li> <li>• Usaha wisata selancar</li> <li>• Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>• Usaha dermaga permukiman</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha vila (cottage) diatas laut</li> <li>• Usaha restoran di atas laut</li> <li>• Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu</li> <li>• Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan</li> <li>• Pembangunan pembangkitan,</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal &lt; 10GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala</li> <li>• Pelepasan jangkar</li> <li>• Penggunaan galah untuk</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>• Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery,</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Uji coba kapal</li> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>• Pembangunan PLTU</li> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu</li> <li>• Pengerukan perairan dengan capital dredging</li> <li>• Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> </ul>	



NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>• Eksplorasi energi OTEC</li> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja</li> <li>• mendorong perahu</li> <li>• Pembangunan permukiman</li> <li>• Pembangunan perkantoran</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air)</li> <li>• Industri penggarapan</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung;</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											kepentingan ekonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dangkal</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan</li> <li>• Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik</li> <li>• Penanaman kabel</li> <li>• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> <li>• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>• Pembangunan TPI</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>• Pembangunan turap (revetment)</li> <li>• pembangunan groin;</li> <li>• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan</li> <li>• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional</li> <li>• Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> </ul>	

NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG				
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS	
												<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut</li> <li>• Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing</li> <li>• Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).</li> <li>• Penarikan (Towing)</li> <li>• Pengapungan (refloating)</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut</li> <li>• Pipa intake dan outake industri dan perikanan</li> <li>• Kegiatan tambat perahu</li> <li>• Kegiatan fasilitas umum</li> <li>• Kegiatan pendidikan dan penelitian umum</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Terapung</li> </ul>	

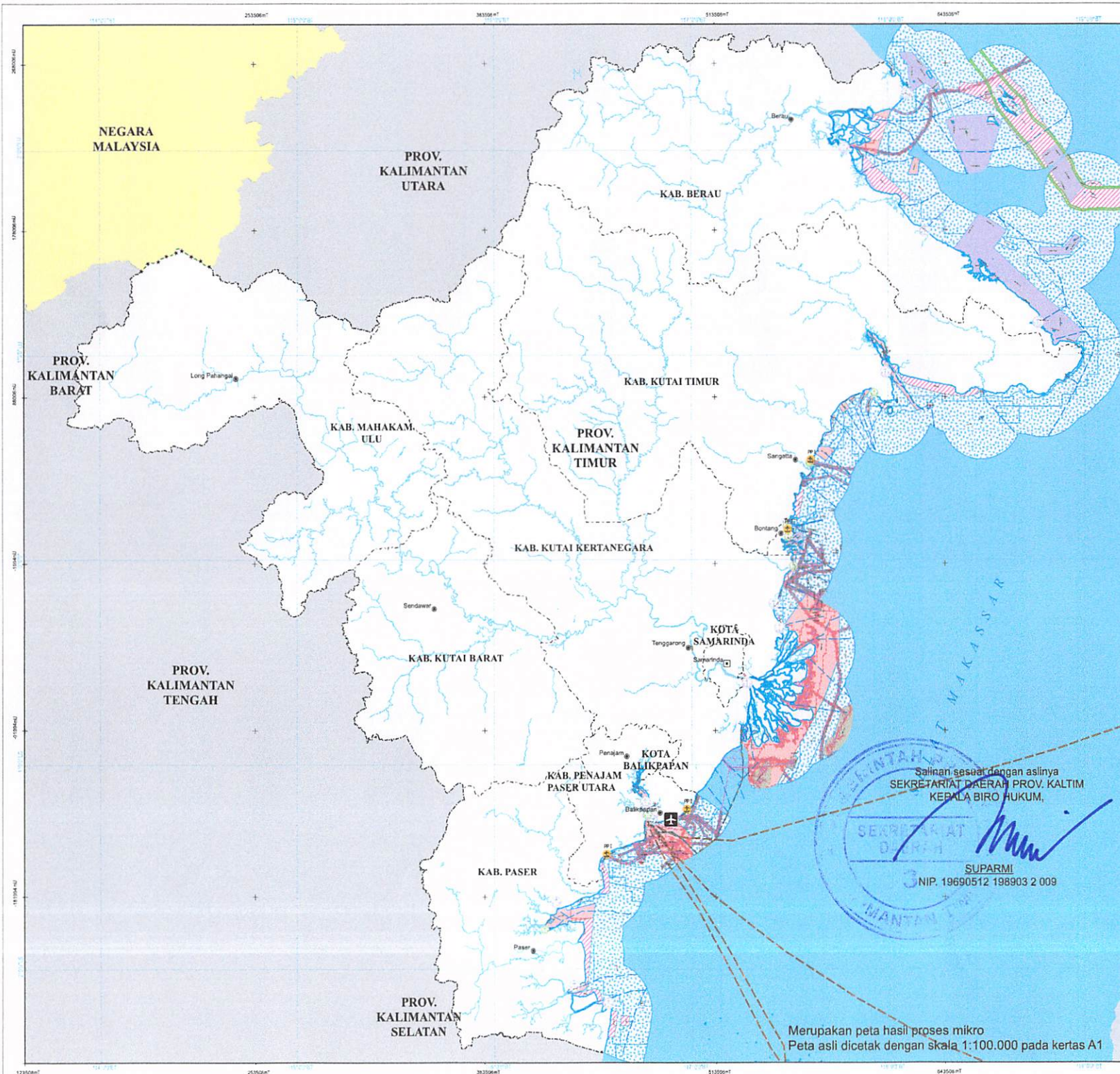
NO	RENCANA POLA RUANG LAUT	KODE	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		ARAHAN PEMANFAATAN RUANG			
			PERAIRAN	KABUPATEN / KOTA	TOPONIMI		LONG	LAT	DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	KETENTUAN KHUSUS
											(Floating Facility) Migas: Mooring • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)	

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009





**PEREMPTING DAERAH  
KALIMANTAN TIMUR**

---

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

---

**PETA KESESUAIAN KEGIATAN  
PEMANFAATAN RUANG LAUT**

---

U SKALA 1:1.000.000  
0 25 50 100 Km

---

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

---

DIAGRAM LOKASI



---

**KETERANGAN :**

<ul style="list-style-type: none"> <li> Ibu Kota Pemerintahan</li> <li> Ibu Kota Kabupaten / Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Batas Administrasi</li> <li> Batas Negara</li> <li> Batas Provinsi</li> <li> Batas Kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Perairan</li> <li> Garis Pantai</li> <li> Garis Pantai Rencana</li> </ul>
--	---	---

---

**JARINGAN SARANA DAN PRASARANA**

<p><b>Jaringan Transportasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Bandar Udara Pengumpul</li> <li> Pelabuhan Penyeberangan</li> <li> Pelabuhan Pengumpan</li> <li> Pelabuhan Pengumpul</li> <li> Pelabuhan Utama</li> <li> Pengkalan Pendaratan Ikan</li> <li> Aul-Pelayaran Umum dan Perikanan</li> <li> Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi</li> <li> Lintas Penyeberangan Antarprovinsi</li> </ul>	<p><b>Alur Laut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Jaringan Teluk</li> <li> Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas</li> </ul>
--	--

---

**KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT**

<p><b>Kawasan Pemanfaatan Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Zona Bandar Udara</li> <li> Zona Industri</li> <li> Zona Pariwisata</li> <li> Zona Pelabuhan Perikanan</li> <li> Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa</li> <li> Zona Perikanan Budi Daya</li> <li> Zona Perikanan Tangkap</li> <li> Zona Permukiman</li> <li> Zona Pertahanan dan Keamanan Bumi</li> <li> Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi</li> <li> Zona Pelabuhan Umum</li> </ul>	<p><b>Kawasan Konservasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Kawasan Konservasi Lainnya</li> <li> Kawasan Konservasi Maritim</li> <li> Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi</li> <li> Taman</li> </ul>	<p><b>Ketentuan Khusus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Kawasan Migrasi Satwa</li> <li> Koridor Pipa Kabel Bawah Laut</li> </ul>
--	---	---

---

Sumber data dan riwayat peta:  
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
2. Peta Administrasi RT/RW Provinsi Kalimantan Timur  
3. Peta RZWP/RTK Tahun 2021-2041 Skala 1 : 50.000 Peta Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

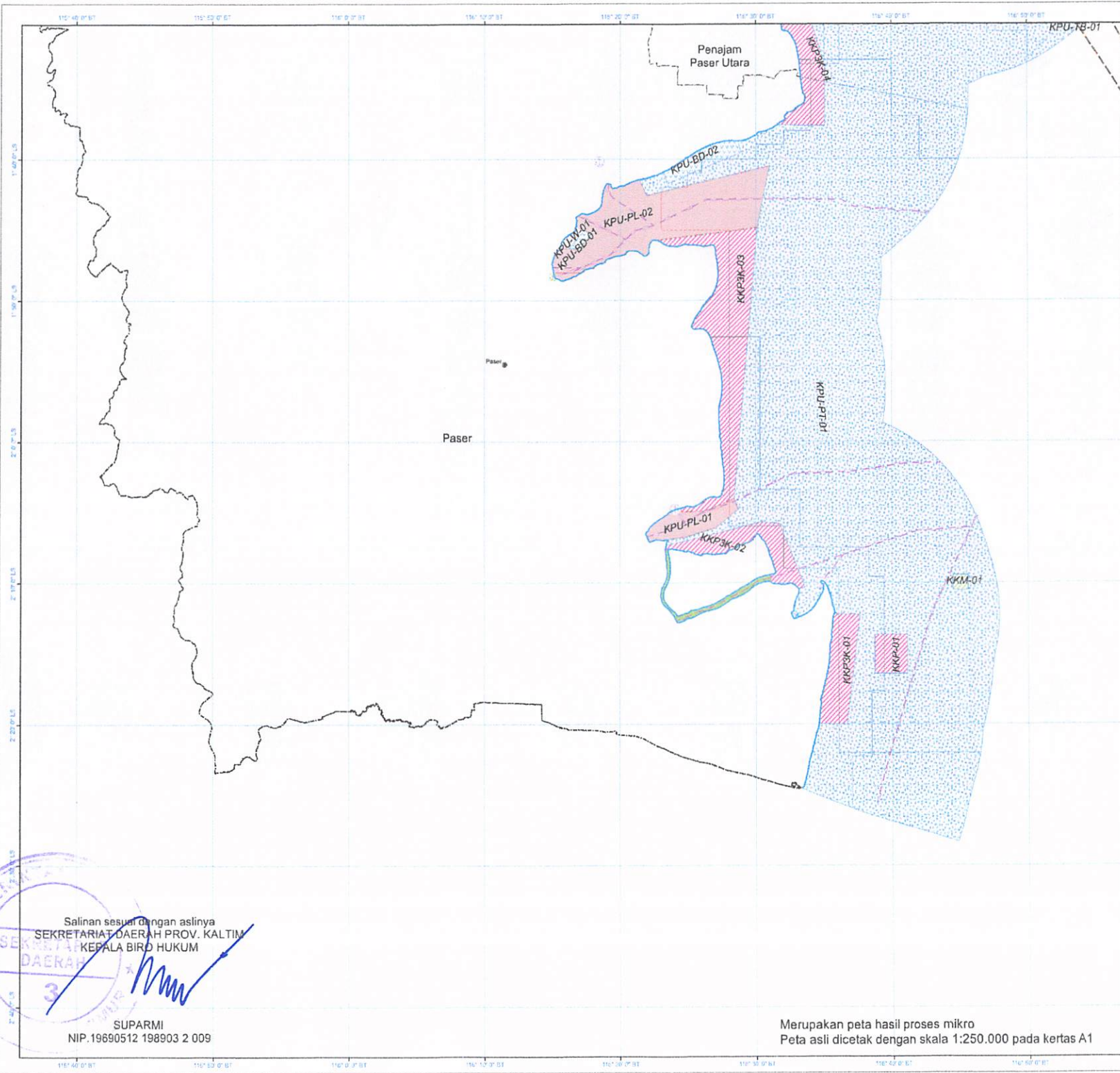
---

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

---

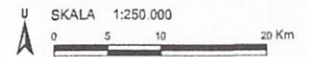
Gubernur Kalimantan Timur,  
  
ttd  
**ISRAN NOOR**

Merupakan peta hasil proses mikro  
Peta asli dicetak dengan skala 1:100.000 pada kertas A1

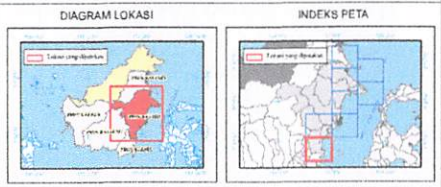









**LAMPIRAN XIII**  
**TANJUNG ARU LEMBAR 6401**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042**














**PETA KESESUAIAN KEGIATAN**  
**PEMANFAATAN RUANG LAUT**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**  
 Ibukota Pemerintahan :  Ibu Kota Provinsi  
 Ibu Kota Kabupaten / Kota  
 Batas Administrasi :  Batas Negara  
 Batas Provinsi  
 Batas Kabupaten / Kota  
 Perairan :  Garis Pantai  
 Garis Pantai Rencana

**JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**  
**Jaringan Transportasi**  
 Bandar Udara Pengumpul  
 Pelabuhan Perhubungan  
 Pelabuhan Pengumpul  
 Pelabuhan Utama  
 Pelabuhan Perikanan  
 Pelabuhan Perikanan  
 Pelabuhan Perikanan  
 Pelabuhan Perikanan  
 Pelabuhan Perikanan  
 Pelabuhan Perikanan  
 Pelabuhan Perikanan  
**Alur Laut**  
 Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi  
 Kabel Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi

**KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT**  
**Kawasan Pemanfaatan Umum**  
 Zona Bandar Udara  
 Zona Industri  
 Zona Perkotaan  
 Zona Pelabuhan Perikanan  
 Zona Pelabuhan Umum  
 Zona Perdagangan Barang dan Jasa  
 Zona Perikanan Budidaya  
 Zona Perikanan Tangkap  
 Zona Permukiman  
 Zona Pertahanan dan Keamanan  
 Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi  
**Kawasan Konservasi**  
 Kawasan Konservasi Lainnya  
 Kawasan Konservasi Maritim  
 Perencanaan/Indeks Kawasan Konservasi  
 Taman  
**Kelentuan Khusus**  
 Kawasan Migrasi Betawa  
 Koridor Pipa Kabel Bawah Laut

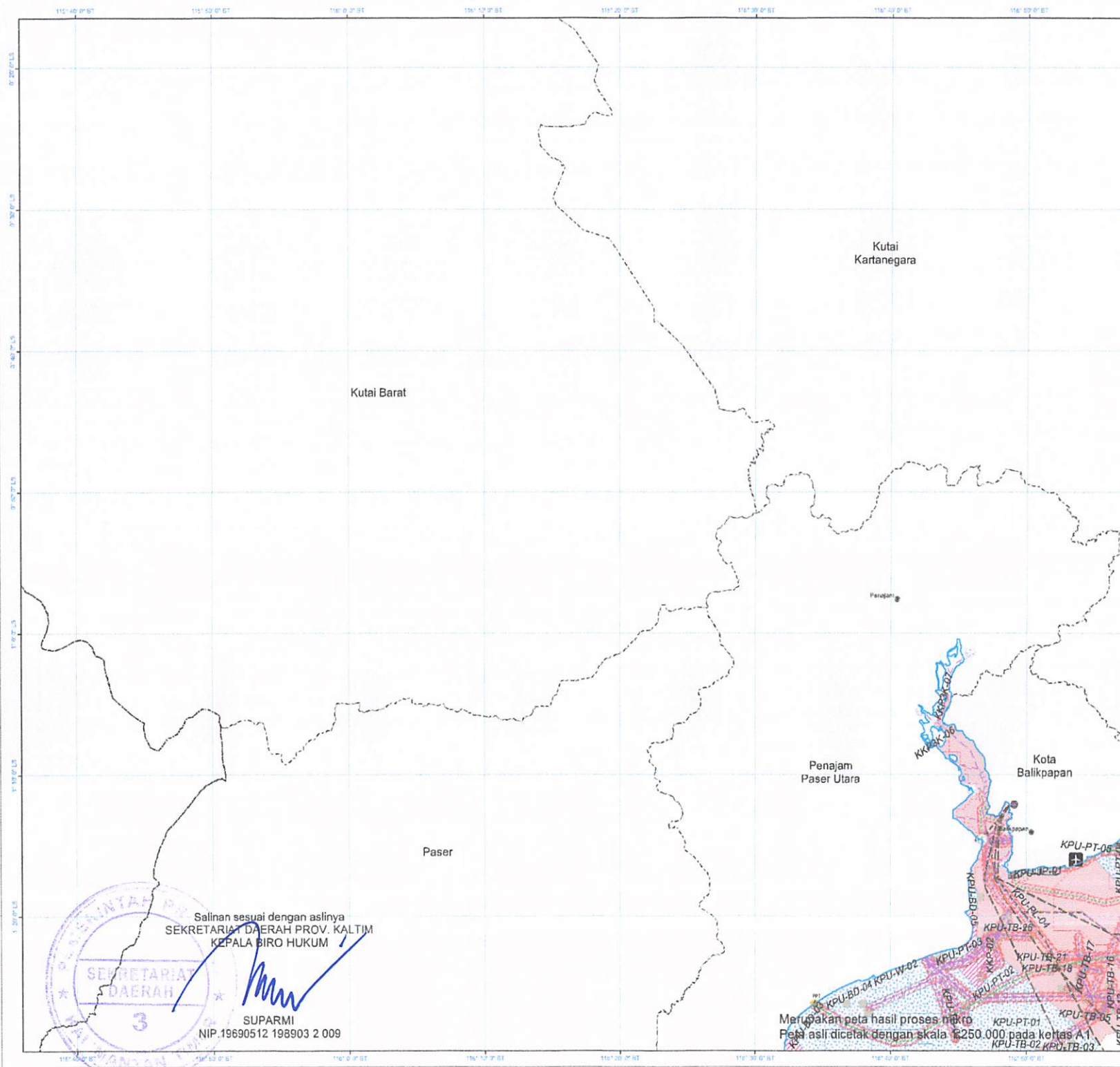
**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Peta RZWP skala 1:250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Sekali SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
 2. Peta Administrasi RTRW Provinsi Kalimantan Timur  
 3. Peta RZWP/K Tahun 2021-2041 Skala 1:50.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**  
 ttd  
**ISRAN NOOR**

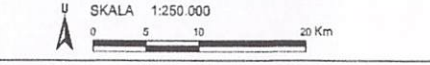
Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIDANG HUKUM  
  
**SUPARMI**  
 NIP.19690512 198903 2 009

Merupakan peta hasil proses mikro  
 Peta asli dicetak dengan skala 1:250.000 pada kertas A1

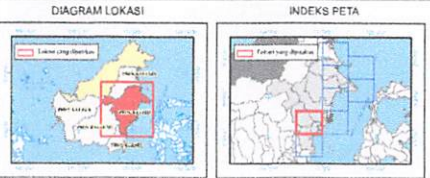


**LAMPIRAN XIII**  
**TELUK BALIKPAPAN LEMBAR 6402**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042**

**PETA KESESUAIAN KEGIATAN**  
**PEMANFAATAN RUANG LAUT**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**  
 Ibu Kota Pemerintahan : Ibu Kota Provinsi / Kota  
 Batas Administrasi : Batas Negara, Batas Provinsi, Batas Kabupaten / Kota  
 Perairan : Garis Pantai, Garis Pantai Rencana

**JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**  
**Jaringan Transportasi**  
 Bandar Udara Pengumpul  
 Pelabuhan Perikanan  
 Pelabuhan Pengumpan  
 Pelabuhan Pengumpul  
 Pelabuhan Utama  
 Pangkalan Perikanan Ikan  
 Alur Pelayanan Umum dan Perikanan  
 Lintas Perseberangan  
 Angkutan Busi Kota dalam Provinsi  
 Lintas Perseberangan  
**Alur Laut**  
 Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi  
 Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi

**KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT**  
**Kawasan Pemanfaatan Umum**  
 Zona Bender Utara  
 Zona Industri  
 Zona Pariwisata  
 Zona Pelabuhan Perikanan  
 Zona Pelabuhan Umum  
 Zona Perdagangan Barang dan Jasa  
 Zona Perikanan Budidaya  
 Zona Perikanan Tangkap  
 Zona Pemukiman  
 Zona Pertahanan dan Keamanan  
 Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi  
**Kawasan Konservasi**  
 Kawasan Konservasi Lainnya  
 Kawasan Konservasi Maritim  
 Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi  
 Tarian  
**Ketentuan Khusus**  
 Kawasan Migrasi Delta  
 Kender Pipa Kabel Bawah Laut

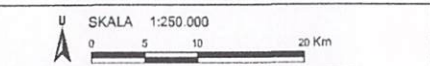
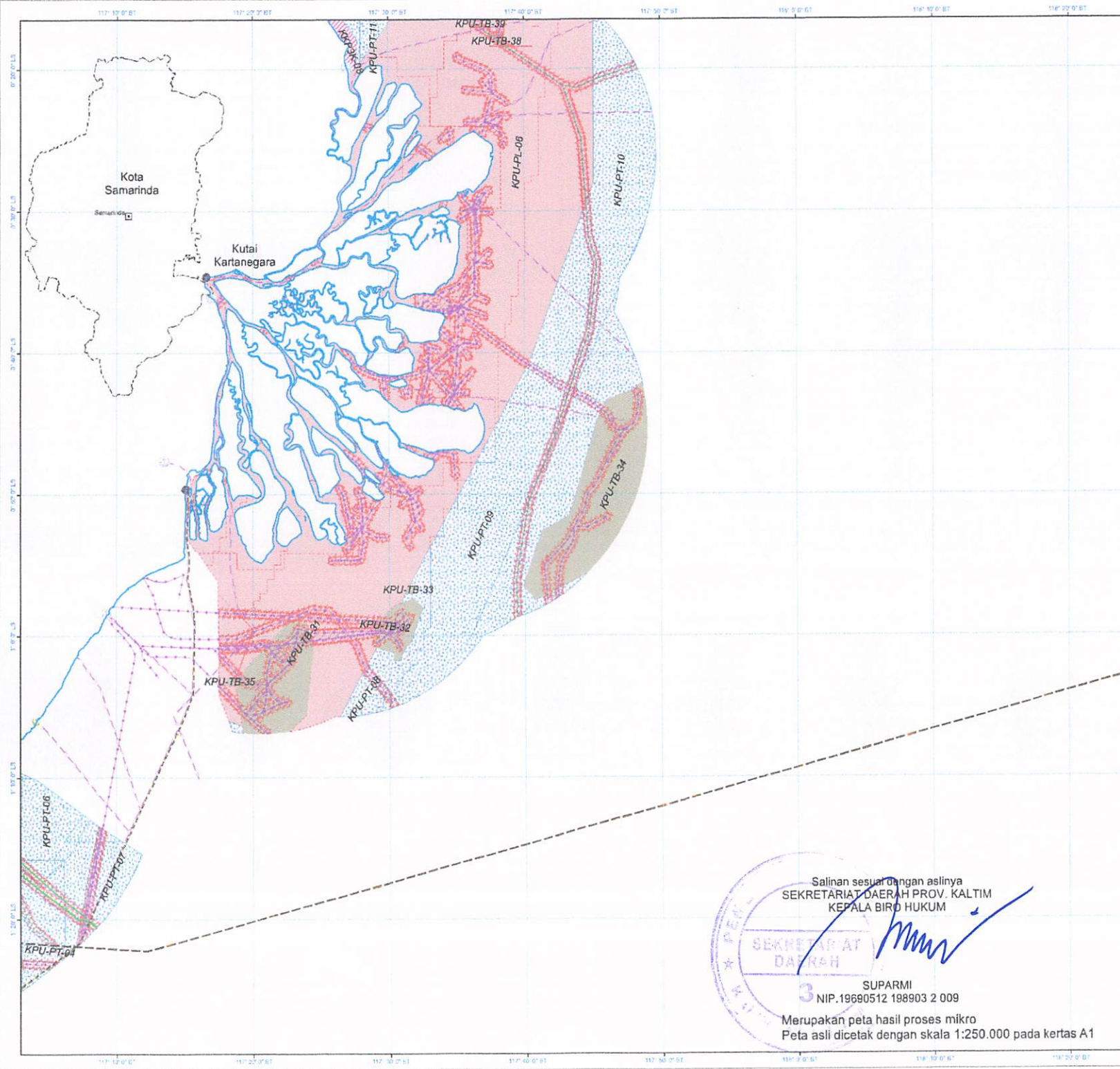
**SUMBER DATA DAN REVISI PETA:**  
 1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2016 dan 2019  
 2. Peta Administrasi RTRW Provinsi Kalimantan Timur  
 3. Peta RZWPJK Tahun 2021-2041 Skala 1 : 50.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

**GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,**  
 ttd  
**ISRAN NOOR**

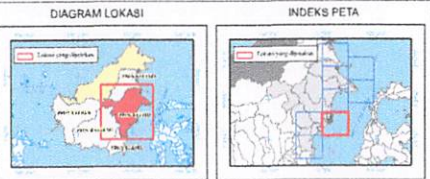
Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM  
  
**SUPARMI**  
 NIP.19690512 198903 2 009

Merupakan peta hasil proses mikro  
 Peta asli dicetak dengan skala 1:250.000 pada kertas A1  
 KPU-PT-01  
 KPU-TB-02  
 KPU-TB-03  
 KPU-PT-04  
 KPU-TB-04  
 KPU-PT-05  
 KPU-TB-05  
 KPU-PT-06  
 KPU-TB-06  
 KPU-PT-07  
 KPU-TB-07  
 KPU-PT-08  
 KPU-TB-08  
 KPU-PT-09  
 KPU-TB-09  
 KPU-PT-10  
 KPU-TB-10  
 KPU-PT-11  
 KPU-TB-11  
 KPU-PT-12  
 KPU-TB-12  
 KPU-PT-13  
 KPU-TB-13  
 KPU-PT-14  
 KPU-TB-14  
 KPU-PT-15  
 KPU-TB-15  
 KPU-PT-16  
 KPU-TB-16  
 KPU-PT-17  
 KPU-TB-17  
 KPU-PT-18  
 KPU-TB-18  
 KPU-PT-19  
 KPU-TB-19  
 KPU-PT-20  
 KPU-TB-20  
 KPU-PT-21  
 KPU-TB-21  
 KPU-PT-22  
 KPU-TB-22  
 KPU-PT-23  
 KPU-TB-23  
 KPU-PT-24  
 KPU-TB-24  
 KPU-PT-25  
 KPU-TB-25  
 KPU-PT-26  
 KPU-TB-26  
 KPU-PT-27  
 KPU-TB-27  
 KPU-PT-28  
 KPU-TB-28  
 KPU-PT-29  
 KPU-TB-29  
 KPU-PT-30  
 KPU-TB-30





Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

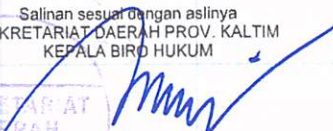


**KETERANGAN :**  
 Ibu Kota Pemerintahan: Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten / Kota  
 Batas Administrasi: Batas Negara, Batas Provinsi, Batas Kabupaten / Kota  
 Perairan: Garis Pantai, Garis Pantai Rencana

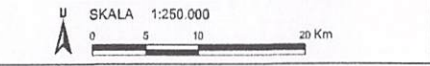
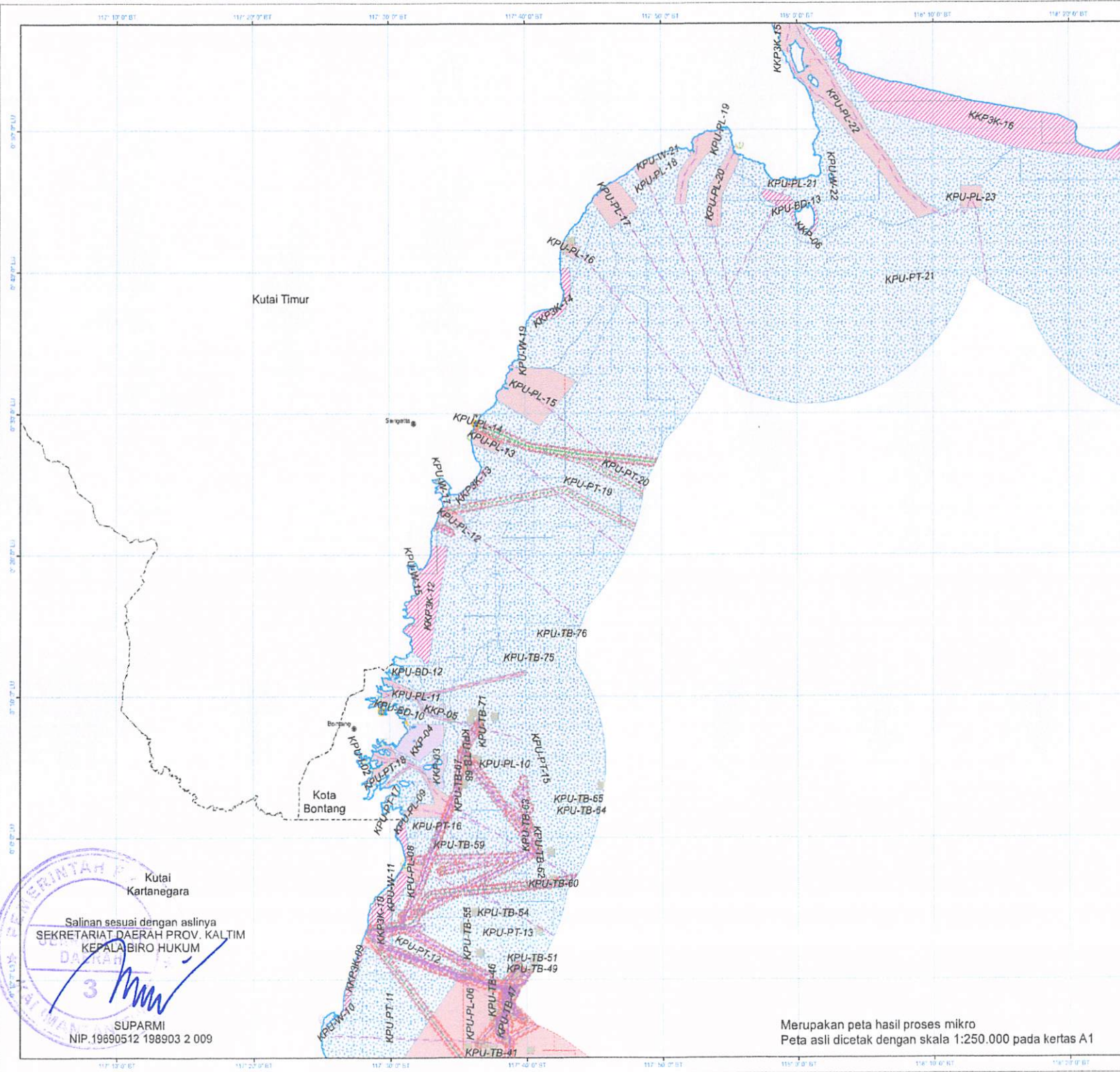
**JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**  
**Jaringan Transportasi**: Bandar Udara Pengumpul, Pelabuhan Perhubungan, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Utama, Pangkalan Perikanan Ikan, Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan, Lintas Perhubungan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, Lintas Perhubungan  
**Alur Laut**: Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi, Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi

**KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT**  
**Kawasan Pemanfaatan Umum**: Zona Bandar Udara, Zona Industri, Zona Pariwisata, Zona Pelabuhan Perikanan, Zona Pelabuhan Umum, Zona Pengendalian Rerang dan Vektor Jarak, Zona Perikanan Budi Daya, Zona Perikanan Tangkap, Zona Pemukiman, Zona Pertahanan dan Keamanan, Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi  
**Kawasan Konservasi**: Kawasan Konservasi Lautnya, Kawasan Konservasi Maritim, Pesisir yang Rentan Kawasan Konservasi, Taman  
**Ketentuan Khusus**: Kawasan Migrasi Estuari, Raster Pipa Kabel Bawah Laut

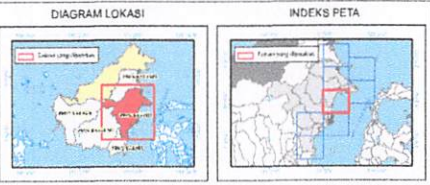
**SUMBER DATA DAN BAHAN PETA:**  
 1. Peta RZ skala 1:250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
 2. Peta Administrasi RTRW Provinsi Kalimantan Timur  
 3. Peta RZWP/K Tahun 2021-2041 Skala 1:50.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021  
**Catatan:**  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi











Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM  
  
 SUPARMI  
 NIP.19690512 198903 2 009  
 Merupakan peta hasil proses mikro  
 Peta asli dicetak dengan skala 1:250.000 pada kertas A1















**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**  
 ttd  
**ISRAN NOOR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**  
 Ibu Kota Pemerintahan   
 Ibu Kota Provinsi   
 Ibu Kota Kabupaten / Kota   
 Batas Administrasi   
 Batas Negara   
 Batas Provinsi    
 Batas Kecamatan / Kota   
 Perairan   
 Garis Pantai   
 Garis Pantai Rencana 

**JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**  
**Jaringan Transportasi**  
 Bandar Udara Pengumpul  
 Pelabuhan Penyberangan  
 Pelabuhan Pengumpan  
 Pelabuhan Pengumpul  
 Pelabuhan Utama  
 Pelabuhan Perikanan  
 Pelabuhan Perikanan  
 Pelabuhan Perikanan  
 Pelabuhan Perikanan  
 Pelabuhan Perikanan  
 Pelabuhan Perikanan  
 Pelabuhan Perikanan  
**Alur Laut**  
 Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi  
 Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi

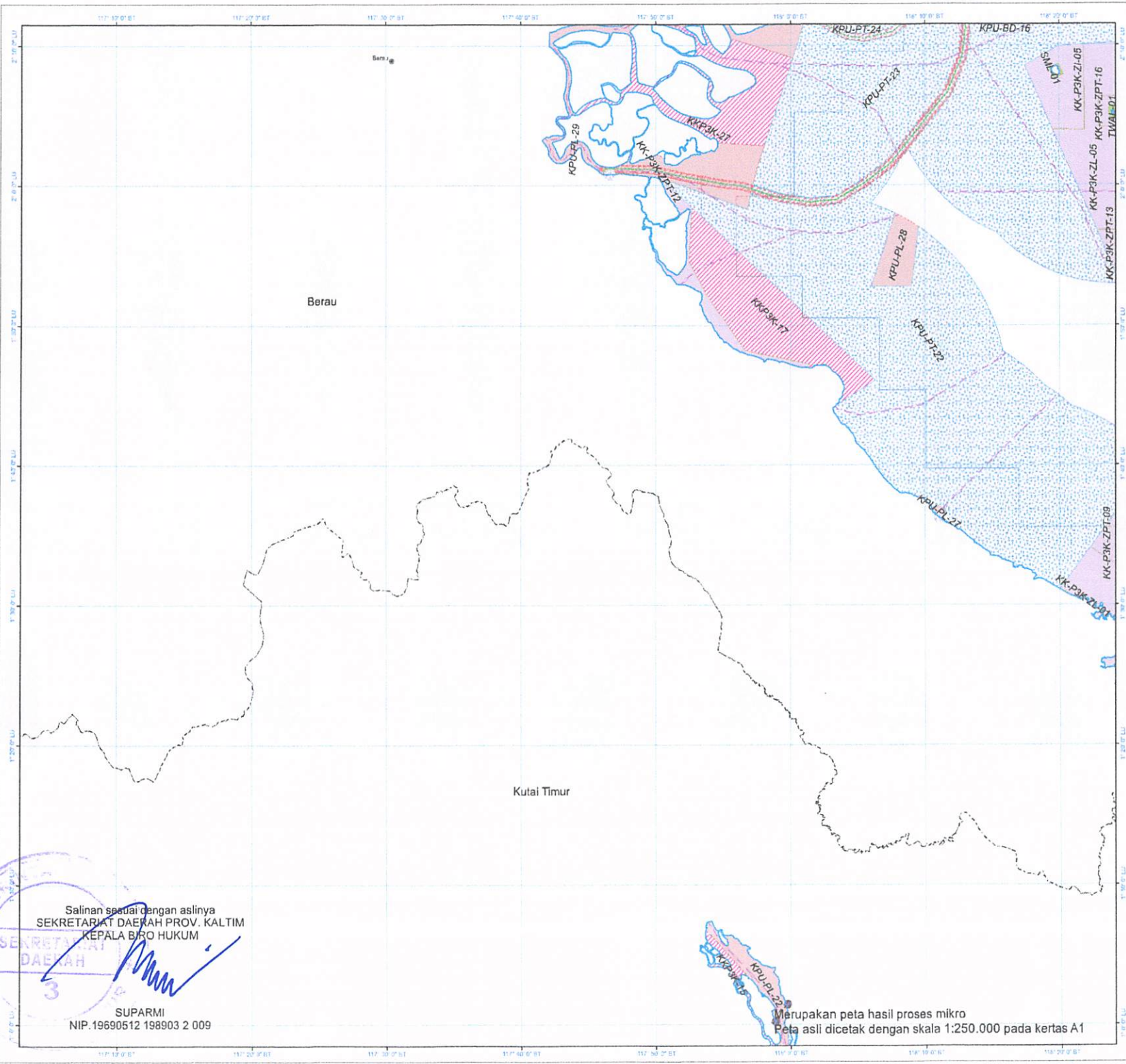
**KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT**  
**Kawasan Pemanfaatan Umum**  
 Zona Bandar Udara  
 Zona Industri  
 Zona Perikanan  
 Zona Pelabuhan Perikanan  
 Zona Pelabuhan Umum  
 Zona Perdagangan Barang dan Jasa  
 Zona Perikanan Budidaya  
 Zona Perikanan Tangkap  
 Zona Pemukiman  
 Zona Pertahanan dan Keamanan  
 Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi  
**Kawasan Konservasi**  
 Kawasan Konservasi Lainnya  
 Kawasan Konservasi Maritim  
 Pencadangan/Inti/Kawasan Konservasi  
 Taman  
**Ketentuan Khusus**  
 Kawasan Migrasi Burung  
 Koridor Pipa Kabel Bawah Laut

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Peta TB skala 1 : 250.000 BGD tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
 2. Peta Administrasi RTW Provinsi Kalimantan Timur  
 3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 50.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**  
 ttd  
**ISRAN NOOR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM  
  
 SUPARMI  
 NIP. 19690512 198903 2 009

Merupakan peta hasil proses mikro  
 Peta asli dicetak dengan skala 1:250.000 pada kertas A1





**PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

**LAMPIRAN XIII  
SUNGAI BERAU LEMBAR 6405  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042  
**PETA KESESUAIAN KEGIATAN  
PEMANFAATAN RUANG LAUT****







SKALA 1:250.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008


DIAGRAM LOKASI  INDEKS PETA 

**KETERANGAN :**

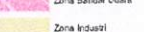
 Ibukota Pemerintahan	 Batas Administrasi	 Parairan
 Ibu Kota Provinsi	 Batas Negara	 Garis Pantai
 Ibu Kota Kabupaten / Kota	 Batas Provinsi	 Garis Pantai Rencana
	 Batas Kecamatan / Kota	

**JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**



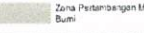
**Jaringan Transportasi**

-  Bandar Udara Pengumpul
-  Pelabuhan Perikanan
-  Pelabuhan Pengumpan
-  Pelabuhan Pengumpul
-  Pelabuhan Utama
-  Pangkalan Perikanan Ikan

**Alur Laut**

-  Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
-  Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi

**KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT**

 Zona Baidar Udara	 Kawasan Konservasi
 Zona Industri	 Kawasan Konservasi Lainnya
 Zona Perikanan	 Kawasan Konservasi Maritim
 Zona Pelabuhan Perikanan	 Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
 Zona Pelabuhan Umum	 Taman
 Zona Perdagangan Barang dan Jasa	 Kawasan Migrasi Ekota
 Zona Perikanan Budi Daya	 Kondisi Pipa Kabel Bawah Laut
 Zona Perikanan Tangkap	
 Zona Pemukiman	
 Zona Pertahanan dan Keamanan	
 Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	

**SUMBER DATA DAN RENCANA PETA:**

- Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan EPOT 7 tahun 2018 dan 2019
- Peta Administrasi RTRW Provinsi Kalimantan Timur
- Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 50.000 Perle Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

**Catatan:**  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

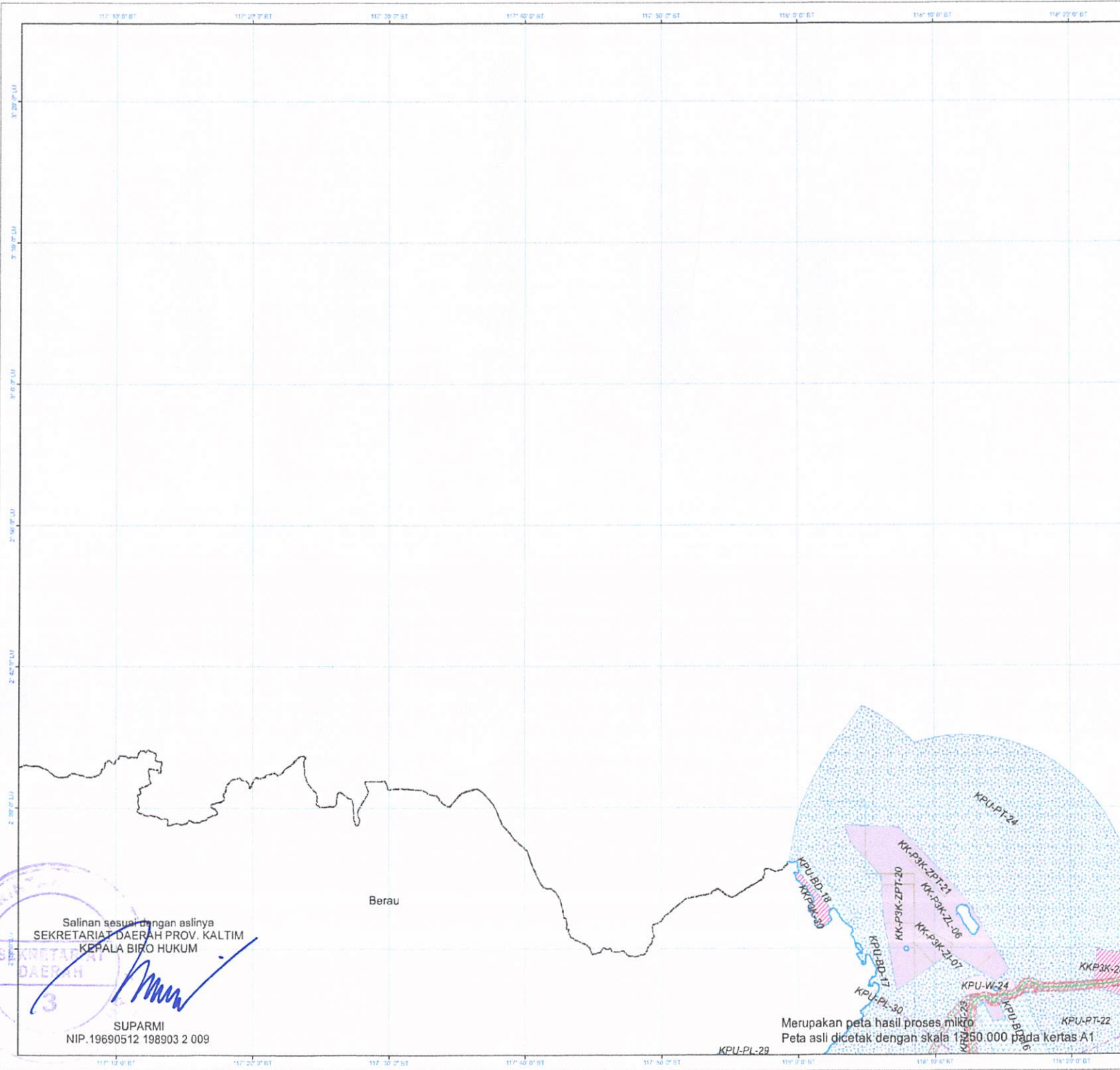
**ISRAN NOOR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM



SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

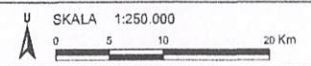
Merupakan peta hasil proses mikro  
Peta asli dicetak dengan skala 1:250.000 pada kertas A1



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN XIII  
TANJUNG BATU LEMBAR 6406  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

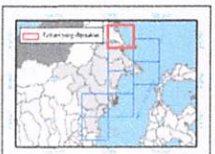
**PETA KESESUAIAN KEGIATAN  
PEMANFAATAN RUANG LAUT**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

INDEKS PETA



**KETERANGAN :**

- |                           |                        |                      |
|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Ibu Kota Provinsi         | Batas Administrasi     | Parairan             |
| Ibu Kota Kabupaten / Kota | Batas Provinsi         | Garis Pantai         |
|                           | Batas Kabupaten / Kota | Garis Pantai Rencana |

**JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Bandar Udara Pengumpul                                    | Kabel Bawah Laut Umum               |
| Pelabuhan Penyeberangan                                   | Saluran Air                         |
| Pelabuhan Pengumpan                                       | Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi |
| Pelabuhan Pengumpul                                       |                                     |
| Pelabuhan Utama   |                                     |
| Pengisian Pendaratan Ikan                                 |                                     |
| Aks-Pelayaran Umum dan Perikanan                          |                                     |
| Limas Penyeberangan Antar-kabupaten / Kota dalam Provinsi |                                     |
| Limas Penyeberangan                                       |                                     |

**KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zona Bendera Umum                     | Kawasan Konservasi Lainnya              |
| Zona Industri                         | Kawasan Konservasi Maritim              |
| Zona Pariwisata                       | Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi |
| Zona Pelabuhan Perikanan              | Taman                                   |
| Zona Pelabuhan Umum                   |   |
| Zona Perdagangan Barang dan Jasa      | Kawasan Migrasi Satwa                   |
| Zona Perikanan Budidaya               | Koridor Pipa Kabel Bawah Laut           |
| Zona Perikanan Tangkap                |   |
| Zona Pemukiman                        |   |
| Zona Pertahanan dan Keamanan          |   |
| Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi |   |

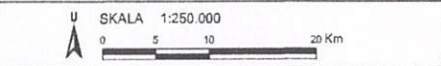
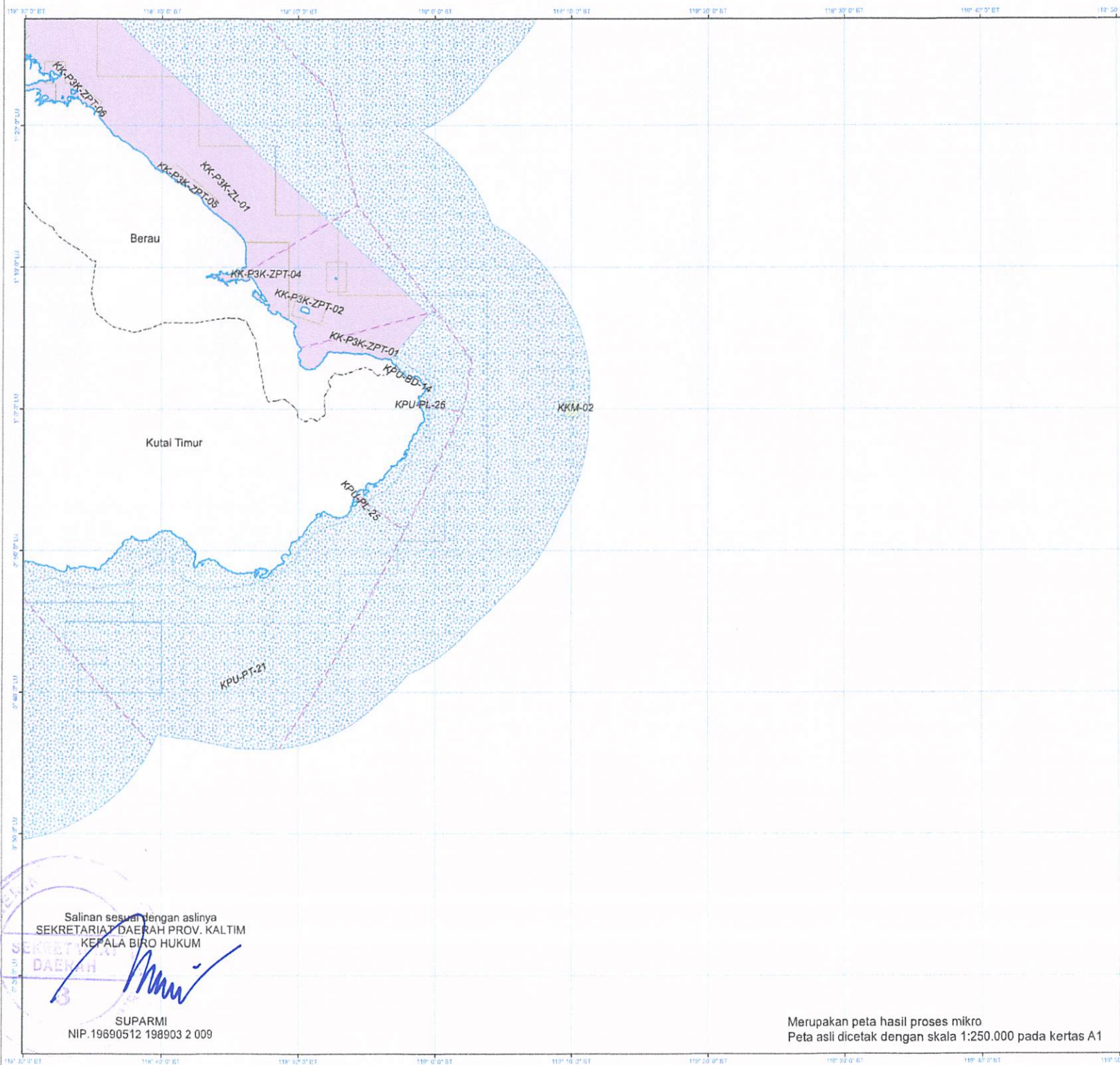
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
2. Peta Administrasi RTW Provinsi Kalimantan Timur  
3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 50.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

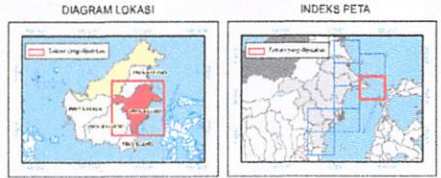
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,  
  
ttd  
  
ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM  
  
  
SUPARMI  
NIP.19690512 198903 2 009

Merupakan peta hasil proses mikro  
Peta asli dicetak dengan skala 1:250.000 pada kertas A1



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**  
 Ikon Kota Pemerintahan, Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten / Kota  
 Batas Administrasi: Batas Negara, Batas Provinsi, Batas Kabupaten / Kota  
 Perairan: Garis Pantai, Garis Pantai Rencana

**JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**  
**Jaringan Transportasi:** Bandar Udara Pengumpul, Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Umum, Pangkalan Perikanan Ikan, Akar-Pelayaran Umum dan Perikanan, Lintasan Perhubungan AntarKabupaten/Kota dalam Provinsi, Lintasan Perhubungan  
**Alur Laut:** Kabel Bawah Laut Untuk Transmisi Data, Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi

**KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT**  
**Kawasan Pemanfaatan Umum:** Zona Bandar Udara, Zona Industri, Zona Pariwisata, Zona Pelabuhan Perikanan, Zona Pelabuhan Umum, Zona Perdagangan Barang dan Jasa, Zona Perikanan Budidaya, Zona Perikanan Tangkap, Zona Perikanan, Zona Pertahanan dan Keamanan, Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi  
**Kawasan Konservasi:** Kawasan Konservasi Lainnya, Kawasan Konservasi Maritim, Perencanaan/Indikasi Kawasan Konservasi, Taman  
**Kelentuan Khusus:** Kawasan Migrasi Satwa, Koridor Pipa Kabel Bawah Laut

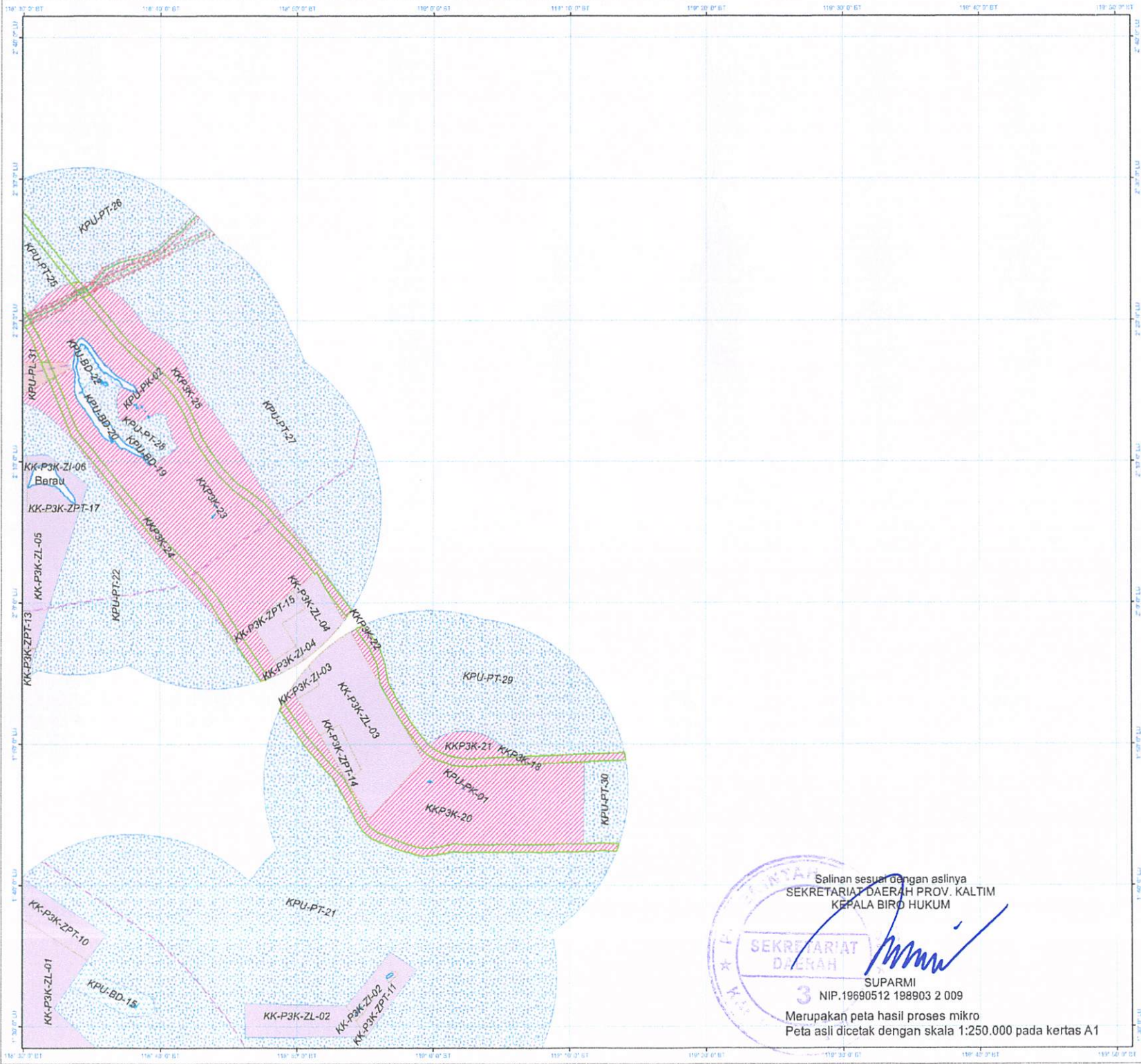
**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Peta RBI Skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
 2. Peta Administrasi RTRW Provinsi Kalimantan Timur  
 3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 50.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

**Catatan:**  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis garis batas administrasi.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,  
 ttd  
 ISRAN NOOR

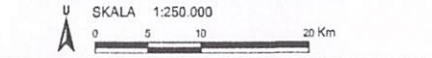
Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM  
 SUPARMI  
 NIP. 19690512 198903 2 009

Merupakan peta hasil proses mikro  
 Peta asli dicetak dengan skala 1:250.000 pada kertas A1

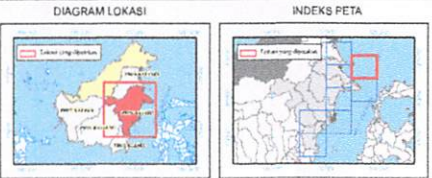


LAMPIRAN XIII  
PULAU MARATUA LEMBAR 6408  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA KESESUAIAN KEGIATAN  
PEMANFAATAN RUANG LAUT



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**  
 Ibukota Pemerintahan: [Symbol] Kota Samarinda  
 Ibu Kota Provinsi: [Symbol] Kota Balikpapan  
 Ibu Kota Kabupaten / Kota: [Symbol] Kota Berau  
 Batas Administrasi: [Symbol] Batas Provinsi, [Symbol] Batas Kabupaten / Kota  
 Perairan: [Symbol] Garis Pantai, [Symbol] Garis Pantai Rencana

**JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT**  
**Jaringan Transportasi**  
 Bandar Udara Pengumpul, Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Umum, Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Perikanan Ikan, Abu-Pelayaran Umum dan Perikanan, Lintas Perhubungan Antar Kabupaten / Kota dalam Provinsi, Lintas Perhubungan  
**Alur Laut**  
 Kabel Bawah Laut Untuk Transmisi, Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi

**KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT**  
**Kawasan Pemanfaatan Umum**  
 Zona Bandar Udara, Zona Industri, Zona Perikanan, Zona Perikanan Perikanan, Zona Perikanan Umum, Zona Perdagangan Barang di perairan, Zona Perikanan Budi Daya, Zona Perikanan Tangkap, Zona Pemukiman, Zona Perlindungan dan Keamanan, Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi  
**Kawasan Konservasi**  
 Kawasan Konservasi Lainnya, Kawasan Konservasi Maritim, Perincangan/Indikasi Kawasan Konservasi, Taman  
**Ketentuan Khusus**  
 Kawasan Migrasi Satwa, Koridor Pipa Kabel Bawah Laut

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
 1. Peta RIB skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbarui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2016 dan 2019  
 2. Peta Administrasi RTRW Provinsi Kalimantan Timur  
 3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 50.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi.  
 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,  
 ttd  
 ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM  
 SUPARMI  
 NIP.19680512 198903 2 009  
 Merupakan peta hasil proses mikro  
 Peta asli dicetak dengan skala 1:250.000 pada kertas A1

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 TAHUN 2023-2042

**INDIKASI PROGRAM UTAMA**

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
<b>I.</b>	<b>PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG</b>									
<b>1.</b>	<b>PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN</b>									
<b>1.1.</b>	<b>Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional</b>									
<b>a.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>  <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</b>	1. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang; 2. IKN.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Provinsi (Dinas PUPRPERA) Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>b.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b> <b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas:</b> 1) Penyediaan sarana dan prasarana pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi	1. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang; 2. IKN.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perdagangan (Kemendag), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p><b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>  <b>Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri:</b>                      Fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat provinsi</p> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Perdagangan dan Jasa oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>									
c.	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  <b>Pengelolaan Pendidikan Perguruan Tinggi</b>  <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)</li> <li>2) Penambahan ruang kelas baru</li> <li>3) Pembangunan ruang laboratorium</li> <li>4) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah</li> </ol> <p><b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)</li> <li>2) Penambahan ruang kelas baru</li> <li>3) Pembangunan ruang laboratorium</li> <li>4) Rehabilitasi ruang kelas sekolah</li> </ol> <p><b>Pengelolaan Pendidikan Khusus:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)</li> <li>2) Penambahan ruang kelas baru</li> <li>3) Pembangunan ruang laboratorium</li> <li>4) Rehabilitasi ruang kelas sekolah</li> </ol> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Pendidikan oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang;</li> <li>2. IKN.</li> </ol>	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi, pelaku usaha, dan/atau Masyarakat						



NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5	
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
d.	<p><b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b></p> <p><b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya</li> <li>2) Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya</li> <li>3) Pengembangan rumah sakit</li> <li>4) Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya</li> <li>5) Pengembangan unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional</li> <li>6) Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya</li> <li>7) Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit</li> </ol> <p><b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</li> </ol> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Kesehatan oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang;</li> <li>2. IKN.</li> </ol>	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat							
e.	<p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Industri oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang;</li> <li>2. IKN.</li> </ol>	sumber lain yang sah	Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat							
f.	<p><b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b></p> <p><b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan daya tarik wisata unggulan provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang;</li> <li>2. IKN.</li> </ol>	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi, Pelaku							

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p>2) Perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi</p> <p>3) Pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi</p> <p><b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>  <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</b>  <b>Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis</b>  <b>Pariwisata Provinsi:</b></p> <p>1) Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri</p> <p>2) Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri</p> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan</b>  <b>Pariwisata oleh Pelaku Usaha dan/atau</b>  <b>Masyarakat</b></p>			Usaha, dan/atau Masyarakat						
g.	<p><b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>  <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga</b>  <b>Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang</b>  <b>Menjadi Kewenangan Pusat:</b></p> <p>1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha</p> <p>2) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga</p> <p><b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga</b>  <b>Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang</b>  <b>Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi:</b></p> <p>1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta</p>	<p>1. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang;</p> <p>2. IKN.</p>	<p>APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah</p>	<p>Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kemen PUPR, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat</p>						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha 2) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga provinsi  <b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Olahraga oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b>									
<b>h.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b> Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan	1. Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang; 2. IKN.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan/atau Polisi Republik Indonesia (Polri)						
<b>1.2.</b>	<b>Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah</b>									
<b>a.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>  <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</b>	1. Tana Paser di Kabupaten Paser; 2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat; 3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan 4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.	APBD Provinsi	Kemen PUPR, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>b.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b> <b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas:</b> 1) Penyediaan sarana dan prasarana pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi  <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b> <b>Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri:</b>	1. Tana Paser di Kabupaten Paser; 2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat; 3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan 4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendag, Disperindagkop dan UKM Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat provinsi  <b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Perdagangan dan Jasa oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b>									
<b>c.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b> <b>Pengelolaan Pendidikan Perguruan Tinggi</b> <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas:</b> 1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah  <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan:</b> 1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi ruang kelas sekolah  <b>Pengelolaan Pendidikan Khusus:</b> 1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi ruang kelas sekolah  <b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Pendidikan oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b>	1. Tana Paser di Kabupaten Paser; 2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat; 3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan 4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendikbud, Disdikbud Provinsi, pelaku usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>d.</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP</b>	1. Tana Paser di Kabupaten Paser; 2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat;	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenkes, Dinkes Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p><b>Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya</li> <li>2) Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya</li> <li>3) Pengembangan rumah sakit</li> <li>4) Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya</li> <li>5) Pengembangan unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional</li> <li>6) Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya</li> <li>7) Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit</li> </ol> <p><b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</li> </ol> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Kesehatan oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan</li> <li>4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.</li> </ol>								
e.	<p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Industri oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tana Paser di Kabupaten Paser;</li> <li>2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat;</li> <li>3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan</li> <li>4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.</li> </ol>	sumber lain yang sah	Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat						
f.	<p><b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b></p> <p><b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan daya tarik wisata unggulan provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tana Paser di Kabupaten Paser;</li> <li>2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat;</li> <li>3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan</li> </ol>	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenparekraf, Dispar Provinsi, pelaku usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p>2) Perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi</p> <p>3) Pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi</p> <p><b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>  <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</b>  <b>Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis</b>  <b>Pariwisata Provinsi:</b></p> <p>1) Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri</p> <p>2) Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri</p> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan</b>  <b>Pariwisata oleh Pelaku Usaha dan/atau</b>  <b>Masyarakat</b></p>	<p>4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.</p>								
g.	<p><b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>  <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga</b>  <b>Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang</b>  <b>Menjadi Kewenangan Pusat:</b></p> <p>1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha</p> <p>2) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga</p> <p><b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga</b>  <b>Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang</b>  <b>Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi:</b></p> <p>1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta</p>	<p>1. Tana Paser di Kabupaten Paser;</p> <p>2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat;</p> <p>3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan</p> <p>4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.</p>	<p>APBN, APBD Provinsi, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah</p>	<p>Kemenpora, Dispora Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat</p>						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha 2) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga provinsi  <b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Olahraga oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b>									
<b>h.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b> Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan	1. Tana Paser di Kabupaten Paser; 2. Sendawar di Kabupaten Kutai Barat; 3. Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; dan 4. Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.	APBN	Kemenhan, TNI, dan/atau Polri						
<b>1.3.</b>	<b>Perwujudan Pusat Kegiatan Strategis Nasional</b>									
<b>a.</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan:</b> Pos Lintas Batas Negara	Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	APBN	Kemen PUPR						
<b>b.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</b>	Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>c.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b> <b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas:</b> 1) Penyediaan sarana dan prasarana pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi  <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b> <b>Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri:</b>	Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendag, Disperindagkop dan UKM Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat provinsi  <b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Perdagangan dan Jasa oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b>									
d.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b> <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas:</b> 1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah  <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan:</b> 1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi ruang kelas sekolah  <b>Pengelolaan Pendidikan Khusus:</b> 1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi ruang kelas sekolah  <b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Pendidikan oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b>	Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	APBN, APBD Provinsi, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendikbud, Disdikbud Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
e.	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP</b>	Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	APBN, APBD Provinsi, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendes, Dinkes Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						



NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p><b>Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya</li> <li>2) Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya</li> <li>3) Pengembangan rumah sakit</li> <li>4) Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya</li> <li>5) Pengembangan unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional</li> <li>6) Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya</li> <li>7) Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit</li> </ol> <p><b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</li> </ol> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Kesehatan oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>									
f.	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Industri oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b>	Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	sumber lain yang sah	Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat						
g.	<p><b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b></p> <p><b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan daya tarik wisata unggulan provinsi</li> <li>2) Perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi</li> <li>3) Pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi</li> </ol>	Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendagri, Dispar Provinsi, pelaku usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p><b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>  <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</b>  <b>Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis</b>  <b>Pariwisata Provinsi:</b></p> <p>1) Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri</p> <p>2) Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri</p> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Pariwisata oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>									
h.	<p><b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>  <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Pusat:</b></p> <p>1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha</p> <p>2) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga</p> <p><b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi:</b></p> <p>1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha</p> <p>2) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga provinsi</p>	Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenpora, Dispora Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Olahraga oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b>									
i.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b> Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan	Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu	APBN	Kemenhan, TNI, dan/atau Polri						
<b>1.4.</b>	<b>Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal</b>									
a.	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser;</li> <li>2. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak, dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara;</li> <li>3. Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau;</li> <li>4. Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongan di Kabupaten Kutai Barat;</li> <li>5. Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur;</li> <li>6. Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan</li> <li>7. Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.</li> </ol>	APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
b.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b> Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser;</li> <li>2. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak,</li> </ol>	APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Disperindagkop dan UKM Provinsi, Pelaku usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p>1) Penyediaan sarana dan prasarana pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi</p> <p><b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>  <b>Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri:</b>                      Fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat provinsi</p> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Perdagangan dan Jasa oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>	<p>dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara;</p> <p>3. Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau;</p> <p>4. Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongan di Kabupaten Kutai Barat;</p> <p>5. Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur;</p> <p>6. Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan</p> <p>7. Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.</p>								
<b>c.</b>	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas:</b></p> <p>1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                      2) Penambahan ruang kelas baru                      3) Pembangunan ruang laboratorium                      4) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah</p> <p><b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan:</b></p> <p>1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                      2) Penambahan ruang kelas baru                      3) Pembangunan ruang laboratorium                      4) Rehabilitasi ruang kelas sekolah</p> <p><b>Pengelolaan Pendidikan Khusus:</b>                      1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)</p>	<p>1. Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser;</p> <p>2. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak, dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara;</p> <p>3. Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau;</p> <p>4. Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongan di Kabupaten Kutai Barat;</p> <p>5. Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur;</p>	APBD Provinsi, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Disdikbud Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2) Penambahan ruang kelas baru 3) Pembangunan ruang laboratorium 4) Rehabilitasi ruang kelas sekolah  <b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Pendidikan oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b>	6. Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan 7. Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.								
d.	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi:</b> 1) Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya 2) Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya 3) Pengembangan rumah sakit 4) Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya 5) Pengembangan unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional 6) Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya 7) Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit  <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi:</b> 1) Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)  <b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Kesehatan oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b>	1. Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser; 2. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak, dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau; 4. Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongan di Kabupaten Kutai Barat; 5. Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur; 6. Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan 7. Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.	APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Dinkes Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
e.	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Industri oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser;</li> <li>2. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak, dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara;</li> <li>3. Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau;</li> <li>4. Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongon di Kabupaten Kutai Barat;</li> <li>5. Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur;</li> <li>6. Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan</li> <li>7. Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.</li> </ol>	sumber lain yang sah	Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat						
f.	<p><b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b></p> <p><b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan daya tarik wisata unggulan provinsi</li> <li>2) Perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi</li> <li>3) Pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi</li> </ol> <p><b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser;</li> <li>2. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak, dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara;</li> <li>3. Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau;</li> </ol>	APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Dispar Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5	
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	<p><b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri</li> <li>2) Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri</li> </ol> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Pariwisata oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongan di Kabupaten Kutai Barat;</li> <li>5. Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur;</li> <li>6. Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan</li> <li>7. Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.</li> </ol>									
g.	<p><b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b></p> <p><b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Pusat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha</li> <li>2) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga</li> </ol> <p><b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha</li> <li>2) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser;</li> <li>2. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak, dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara;</li> <li>3. Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau;</li> <li>4. Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongan di Kabupaten Kutai Barat;</li> <li>5. Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur;</li> <li>6. Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan</li> <li>7. Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.</li> </ol>	APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Dispora Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat							

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Kegiatan Olahraga oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b>									
<b>h.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b> Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batu Kajang, Kuaro, Long Ikis, dan Kerang di Kabupaten Paser;</li> <li>2. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak, dan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara;</li> <li>3. Talisayan, Sido Bangen, Tanjung Batu, dan Tepian Buah di Kabupaten Berau;</li> <li>4. Tanjung Isuy, Linggang Bigung, dan Bongon di Kabupaten Kutai Barat;</li> <li>5. Muara Bengkal, Muara Wahau, dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur;</li> <li>6. Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan</li> <li>7. Ujoh Bilang, Long Hubung, dan Tiong Ohang di Kabupaten Mahakam Ulu.</li> </ol>	APBN	Kemenhan, TNI, dan/atau Polri						
<b>2.</b>	<b>PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI</b>									
<b>2.1.</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Jalan</b>									
<b>2.1.1.</b>	<b>Perwujudan Jalan Umum</b>									
<b>2.1.1.1.</b>	<b>Perwujudan Jalan Arteri Primer</b>									
<b>a.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Nasional:</b> 1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerang (Bts. Prov. Kalsel)- Bts. Kota Tanah Grogot;</li> <li>2. Jln. Noto Sunardi (Tanah Grogot);</li> </ol>	APBN	Kemen PUPR dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)						











NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		78. Barong Tongkok-Mentiwan (Sendawar); 79. Akses Pelabuhan Maloy Baru.								
<b>b.</b>	<p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Nasional:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan</li> <li>2) Survey kondisi jalan/jembatan</li> <li>3) Pelebaran jalan menuju standar</li> <li>4) Pelebaran jalan menambah lajur</li> <li>5) Rekonstruksi jalan</li> <li>6) Rehabilitasi jalan</li> <li>7) Pembangunan jembatan</li> <li>8) Penggantian jembatan</li> <li>9) Pelebaran jembatan</li> <li>10) Rehabilitasi jembatan</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan prasarana jalan di jalan nasional</li> <li>2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Kalimantan (Akses Bandara Kalimantan Tanjung Redeb);</li> <li>2. Jalan Akses Pelabuhan Lhok Tuan.</li> </ol>	APBN	Kemen PUPR dan Kemenhub						
<b>c.</b>	<p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Nasional:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan</li> <li>2) Survey kondisi jalan/jembatan</li> <li>3) Pembangunan jalan</li> <li>4) Pembangunan jembatan</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpang Tiga Riko-Simpang Gresik-Simpang Lango-Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek;</li> <li>2. Akses Pelabuhan Kuala Samboja;</li> <li>3. AP-1;</li> <li>4. AP-2;</li> <li>5. AP-3;</li> <li>6. AP-4;</li> <li>7. AP-5.</li> </ol>	APBN	Kemen PUPR dan Kemenhub						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional:</b> 1) Pembangunan prasarana jalan di jalan nasional 2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan nasional									
<b>2.1.1.2.</b>	<b>Perwujudan Jalan Kolektor Primer</b>									
<b>a.</b>	<b>Perwujudan Jalan Kolektor Primer Satu</b>									
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Nasional:</b> 1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan 2) Survey kondisi jalan/jembatan 3) Pelebaran jalan menuju standar 4) Pelebaran jalan menambah lajur 5) Rekonstruksi jalan 6) Rehabilitasi jalan 7) Pemeliharaan berkala/rutin jalan 8) Pembangunan <i>flyover</i> 9) Pembangunan <i>underpass</i> 10) Pembangunan terowongan/ <i>tunnel</i> 11) Penggantian jembatan 12) Pelebaran jembatan 13) Rehabilitasi jembatan 14) Pemeliharaan rutin/berkala jembatan 15) Penanggulangan bencana/tanggap darurat  <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional:</b> 1) Penyediaan perlengkapan jalan 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan 3) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	1. Jln. Pattimura (Akses Terminal Batu Ampar Balikpapan); 2. Sp. 3 Blusuh-Batas Prov. Kalteng; 3. Gunung Tabur (Simpang Tiga Maluang)-Usiran; 4. Usiran-Tanjung Batu (Dermaga Derawan); 5. Barong Tongkok-Sp. Tereng; 6. Sp. Tereng-Bts. Kab. Mahakam Ulu.	APBN	Kemen PUPR dan Kemenhub						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Nasional:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan</li> <li>2) Survey kondisi jalan/jembatan</li> <li>3) Pelebaran jalan menuju standar</li> <li>4) Pelebaran jalan menambah lajur</li> <li>5) Rekonstruksi jalan</li> <li>6) Rehabilitasi jalan</li> <li>7) Pembangunan jembatan</li> <li>8) Penggantian jembatan</li> <li>9) Pelebaran jembatan</li> <li>10) Rehabilitasi jembatan</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan prasarana jalan di jalan nasional</li> <li>2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Janju-Simpang Tiga Jone-Pondong Baru;</li> <li>2. Akses Pelabuhan Penyeberangan Kariangau;</li> <li>3. Akses Pelabuhan Sangata (Kutai Timur).</li> </ol>	APBN	Kemen PUPR dan Kemenhub						
	<p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Nasional:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan</li> <li>2) Survey kondisi jalan/jembatan</li> <li>3) Pembangunan jalan</li> <li>4) Pembangunan jembatan</li> </ol> <p><b>Program Pengembangan Kawasan:</b> Jalan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur</p> <p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batas Kabupaten Kutai Barat/Batas Kabupaten Mahakam Ulu-Ujoh Bilang/Long Bangun;</li> <li>2. Batas Provinsi Kalimantan Barat-Tiong Ohang;</li> <li>3. Long Bagun-Long Pahangai;</li> <li>4. Long Pahangai-Tiong Ohang;</li> <li>5. Long Pahangai-Batas Provinsi Kalimantan</li> </ol>	APBN	Kemen PUPR dan Kemenhub						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional dan Provinsi:</b> 1) Pembangunan prasarana jalan di jalan nasional Penyediaan perlengkapan jalan di jalan nasional	Timur/Provinsi Kalimantan Utara (Long Boh); 6. Tiong Ohang-Long Apari-Batas Malaysia; 7. KP-9.								
<b>b.</b>	<b>Perwujudan Jalan Kolektor Primer Dua</b>									
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Provinsi:</b> 1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan 2) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan 3) Survey kondisi jalan/jembatan 4) Pelebaran jalan menuju standar 5) Pelebaran jalan menambah lajur 6) Rekonstruksi jalan 7) Rehabilitasi jalan 8) Pemeliharaan berkala/rutin jalan 9) Penggantian jembatan 10) Pelebaran jembatan 11) Rehabilitasi jembatan 12) Pemeliharaan rutin/berkala jembatan 13) Penanggulangan bencana/tanggap darurat  <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi:</b> 1) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan 3) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	1. Jalan Suryanata (Samarinda); 2. Jalan Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Samarinda Seberang); 3. Jalan KH. Wahid Hasyim II (Samarinda); 4. Simpang Batu Cermin-Batu Besaung-Simpang Empat <i>Outer Ring Road</i> IV; 5. Samarinda Seberang-Sanga Sanga; 6. Sanga Sanga-Dondang (Bentuas); 7. Simpang Samboja-Simpang Muara Jawa; 8. Jalan Mulawarman (Balikpapan); 9. Batas Balikpapan-Simpang Samboja; 10. Patung Lembuswana-Sebulu; 11. Simpang Empat Kaliorang-Talisayan; 12. Tanjung Redeb-Talisayan.	APBD Provinsi	Dinas PUPRPERA Provinsi dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi						



NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan</li> <li>2) Survey kondisi jalan/jembatan</li> <li>3) Pelebaran jalan menuju standar</li> <li>4) Pelebaran jalan menambah lajur</li> <li>5) Rekonstruksi jalan</li> <li>6) Rehabilitasi jalan</li> <li>7) Pembangunan jembatan</li> <li>8) Penggantian jembatan</li> <li>9) Rehabilitasi jembatan</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi</li> <li>2) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan</li> <li>3) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan R. Soeprpto (Samarinda);</li> <li>2. Jalan S. Parman (Samarinda);</li> <li>3. Jalan Ahmad Yani (Samarinda);</li> <li>4. Jalan D.I. Pandjaitan II (Samarinda);</li> <li>5. Ring Road II (Simpang Jalan Jakarta-Simpang M. Said-Simpang Suryanata (Samarinda);</li> <li>6. Ring Road III (HM. Ardans) (Samarinda);</li> <li>7. Ring Road IV;</li> <li>8. Tenggarong Seberang-Simpang Empat Outer Ring;</li> <li>9. Bukit Raya/Trans L1-Teluk Dalam (Kutai Kartanegara).</li> </ol>	APBD Provinsi	Dinas PUPRPERA dan Dishub Provinsi						
	<p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan</li> <li>2) Survey kondisi jalan/jembatan</li> <li>3) Pembangunan jalan</li> <li>4) Pembangunan jembatan</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpang Empat <i>Outer Ring Road</i> IV-Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto;</li> <li>2. Jalan Riko-Bongan;</li> <li>3. <i>Ring Road</i> I (Jalan Pendekat Jembatan Mahakam Ulu-Simpang M. Said).</li> </ol>	APBD Provinsi	Dinas PUPRPERA dan Dishub Provinsi						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi:</b> 1) Pembangunan prasarana jalan di jalan provinsi 2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi									
<b>c.</b>	<b>Perwujudan Jalan Kolektor Primer Tiga</b>									
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Provinsi:</b> 1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan 2) Survey kondisi jalan/jembatan 3) Pelebaran jalan menuju standar 4) Pelebaran jalan menambah lajur 5) Rekonstruksi jalan 6) Rehabilitasi jalan 7) Pemeliharaan berkala/rutin jalan 8) Penggantian jembatan 9) Pelebaran jembatan 10) Rehabilitasi jembatan 11) Pemeliharaan rutin/berkala jembatan 12) Penanggulangan bencana/tanggap darurat  <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi:</b> 1) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan 3) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	1. Kilometer 38-Simpang Samboja; 2. Jalan Moeis Hasan (Samarinda Seberang); 3. Jalan Teuku Umar (Samarinda); 4. Jalan MT. Haryono (Samarinda); 5. Jembatan Mahakam Ulu; 6. Samarinda-Anggana; 7. Simpang Tiga Sambera-Muara Badak.	APBD Provinsi	Dinas PUPRPERA dan Dishub Provinsi						
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Provinsi:</b> 1. Simpang Kadungan Jaya-Jembatan Nibung-Simpang Lempake;		APBD Provinsi	Dinas PUPRPERA dan Dishub Provinsi						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5	
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan</li> <li>2) Survey kondisi jalan/jembatan</li> <li>3) Pelebaran jalan menuju standar</li> <li>4) Pelebaran jalan menambah lajur</li> <li>5) Rekonstruksi jalan</li> <li>6) Rehabilitasi jalan</li> <li>7) Pembangunan jembatan</li> <li>8) Penggantian jembatan</li> <li>9) Rehabilitasi jembatan</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi</li> <li>2) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan</li> <li>3) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jalan Kadrie Oening (Samarinda);</li> <li>3. Jalan Pendekat Jembatan Mahakam Ulu-<i>Ring Road</i> I;</li> <li>4. Jalan Pendekat Jembatan Mahakam Ulu-Teratai-Mas Mansyur-Untung Suropati-Simpang Jembatan Mahakam.</li> </ol>									
	<p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan</li> <li>2) Survey kondisi jalan/jembatan</li> <li>3) Pembangunan jalan</li> <li>4) Pembangunan jembatan</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan prasarana jalan di jalan provinsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Ahmad Yani (Akses Pelabuhan Handil II);</li> <li>2. Poros Kenohan-Batas Kabupaten Kutai Barat;</li> <li>3. Melak-Batas Kabupaten Kutai Kartanegara;</li> <li>4. Jalan Akses Pelabuhan Sangkulirang;</li> <li>5. Jalan Akses Pelabuhan Mantaritip;</li> <li>6. Muara Badak-Marangkayu;</li> <li>7. Sebulu-Muara Bengkal; dan</li> </ol>	APBD Provinsi	Dinas PUPRPERA dan Dishub Provinsi							

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	8. Muara Bengkal-Batu Ampar.								
<b>2.1.2.</b>	<b>Perwujudan Jalan Khusus</b>									
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS</b> Penyelenggaraan jalan khusus: 1) Pembangunan jalan khusus	kawasan pertanian dan kawasan pertambangan	sumber lain yang sah	Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>2.1.3.</b>	<b>Perwujudan Jalan Tol</b>									
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN TOL</b> 1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan tol 2) Survey kondisi jalan tol/jembatan 3) Pembangunan jalan tol 4) Pemeliharaan berkala/rutin jalan tol 5) Pembangunan <i>flyover</i> 6) Pembangunan <i>underpass</i> 7) Pembangunan terowongan/ <i>tunnel</i> 8) Pembangunan jembatan 9) Pemeliharaan rutin/berkala jembatan 10) Penanggulangan bencana/tanggap darurat	1. Balikpapan-Samarinda; 2. Batulicin-Tanah Grogot; 3. Tanah Grogot-Penajam; 4. Samarinda-Tenggarong; 5. Samarinda-Bontang; 6. Bontang-Sangatta; 7. Sangatta-Maloy; 8. Sangatta-Tanjung Selor-Nunukan; 9. Balikpapan-Penajam (Tol Teluk Balikpapan); 10. Bandar Udara Sepinggang-Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN (IKN 1); 11. Tol Teluk Balikpapan Penajam; 12. Tol Teluk Balikpapan Balikpapan; dan 13. Bandar Udara VVIP-Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN (IKN 2).	APBN	Kemen PUPR dan Kemenhub						
<b>2.1.4.</b>	<b>Perwujudan Terminal Penumpang</b>									

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A:</b> 1) Pengembangan sarana dan prasarana terminal Tipe A 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe A (fasilitas utama dan pendukung)	1. Terminal Batu Ampar di Kota Balikpapan; dan 2. Terminal Samarinda Seberang di Kota Samarinda.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A:</b> 1) Pengembangan sarana dan prasarana terminal Tipe A 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe A (fasilitas utama dan pendukung)	Terminal Rinding/Terminal Terpadu Tanjung Redeb di Kabupaten Berau.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A:</b> 1) Pembangunan gedung terminal Tipe A 2) Pengembangan sarana dan prasarana terminal Tipe A	1. Terminal Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu; 2. Terminal WP IKN Timur 1 di IKN.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B:</b> 1) Pengembangan sarana dan prasarana terminal Tipe B Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal Tipe B (fasilitas utama dan pendukung)	1. Terminal Timbau di Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. Terminal Rinding/Terminal Terpadu Tanjung Redeb di Kabupaten Berau; 3. Terminal Sangatta dan Terminal Marga Mulia di Kabupaten Kutai Timur; 4. Terminal Sei Kunjang dan Terminal Lempake di Kota Samarinda; 5. Terminal Bontang di Kota Bontang.	APBD Provinsi dan/atau sumber lain yang sah	Dishub Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						



NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> <b>Penyelenggaraan Jembatan Timbang:</b> 1) Pembangunan jembatan timbang 2) Pengembangan sarana dan prasarana jembatan timbang	1. Jembatan Timbang Karang Joang Kilometer 17 di Kota Balikpapan; 2. Jembatan Timbang Kuaro dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Paser di Kabupaten Paser; 3. Jembatan Timbang Labanan Kilometer 7 di Kabupaten Berau; 4. Jembatan Timbang Resak di Kabupaten Kutai Barat; 5. Jembatan Timbang Sangkimah, Jembatan Timbang Bengalon, dan Jembatan Timbang Tepian Langsung di Kabupaten Kutai Timur; 6. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Samboja di IKN.	APBN, APBD Provinsi dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Dishub Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>2.1.7.</b>	<b>Perwujudan Jembatan</b>									
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b> <b>Penyelenggaraan Jalan Nasional dan Provinsi:</b> 1) Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan 2) Survey kondisi jalan/jembatan 3) Pembangunan jalan 4) Pembangunan jembatan  <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional dan Provinsi:</b> 1) Pembangunan prasarana jalan di jalan provinsi	1. Jembatan Kutai Kertanegara-Tenggarong dan Jembatan Martadipura-Kota Bangun di Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. Jembatan Sambaliung di Kabupaten Berau; 3. Jembatan Pulau Balang di Teluk Balikpapan; 4. Jembatan Mahakam I, Jembatan Mahakam IV, Jembatan Mahulu, dan Jembatan Achmad Amins di Kota Samarinda;	APBN dan APBD Provinsi	Kemen PUPR, Kemenhub, Dinas PUPRPERA Provinsi dan Dishub Provinsi						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	5. Jembatan Dondang di IKN; 6. Jembatan Aji Tulus Jejangkat-Melak di Kabupaten Kutai Barat.								
<b>2.2.</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api</b>									
<b>2.2.1.</b>	<b>Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api</b>									
	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>  <b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian:</b>            1) Pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian  <b>Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah;</b>  <b>Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:</b>  <b>Penyelenggaraan Jaringan Jalur Kereta Api:</b>            1) Pembangunan jaringan jalur kereta api umum            2) Pengembangan sarana dan prasarana jaringan jalur kereta api umum</p> <p><b>Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:</b>  <b>Penyelenggaraan Jaringan Jalur Kereta Api:</b>            1) Pembangunan jaringan jalur kereta api khusus            2) Pengembangan sarana dan prasarana jaringan jalur kereta api khusus</p>	1. Trans Kalimantan (Kalimantan Selatan) Tanjung-Penajam Paser Utara-Batas Balikpapan; 2. Trans Kalimantan (Kalimantan Timur) Balikpapan-Samarinda; 3. Samarinda-Bontang; 4. Simpang Samboja-KIPP; 5. WP KIPP-WP IKN Barat-WP IKN Timur 1-WP IKN Timur 2-WP IKN Utara; 6. WP IKN Barat-WP IKN Timur 2; 7. kereta api perkotaan IKN; 8. jalur kereta api batubara; 9. jalur kereta api logistik.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Dishub Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						



NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5	
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
2.2.2.	<b>Perwujudan Stasiun Kereta Api</b>										
	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>  <b>Penyelenggaraan Stasiun Kereta Api Penumpang:</b>                      1) Pembangunan stasiun penumpang                      2) Pengembangan sarana dan prasarana stasiun penumpang</p> <p><b>Penyelenggaraan Stasiun Kereta Api Barang:</b>                      1) Pembangunan stasiun barang                      2) Pengembangan sarana dan prasarana stasiun barang</p> <p><b>Penyelenggaraan Stasiun Kereta Api Operasi:</b>                      1) Pembangunan stasiun operasi                      2) Pengembangan sarana dan prasarana stasiun operasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stasiun Muara Langun, Stasiun Batu Butok, Stasiun Songka, Stasiun Batu Kajang, Stasiun Jelada, Stasiun Kuaro, Stasiun Adeling, Stasiun Semutai, dan Stasiun Longkali di Kabupaten Paser;</li> <li>2. Stasiun Babulu Darat, Stasiun Pondok Sungkai, Stasiun Simpang Tiga Petung, Stasiun Buluminung, Stasiun Riko, dan Stasiun Pantai Lango di Kabupaten Penajam Paser Utara;</li> <li>3. Stasiun Karang Joang di Kota Balikpapan;</li> <li>4. Stasiun Sanga-Sanga, Stasiun Palaran, Stasiun Loa Bakung, Stasiun Sempaja Timur, dan Stasiun Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Kota Samarinda;</li> <li>5. Stasiun Samboja, Stasiun Sungai Merdeka, Stasiun Sentral Bumi Harapan, Stasiun Sentral Sepaku, Stasiun Simpang Tengin Baru, dan 5 (lima) stasiun depo di IKN; dan</li> <li>6. rencana stasiun barang meliputi stasiun di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten</li> </ol>	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Dishub Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat							

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.								
<b>2.3.</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan</b>									
<b>2.3.1.</b>	<b>Perwujudan Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Penyelenggaraan Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau:</b> 1) Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan alur-pelayaran sungai 2) Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan alur-pelayaran danau	1. alur pelayaran Sungai Mahakam, Sungai Kedangpahu, Sungai Kendilo, Sungai Kuaro, Sungai Telake, Sungai Apar Besar, Sungai Kecil, Sungai Kerang, Sungai Lombok, Sungai Segendang, Sungai Adang, Sungai Baruangen, Sungai Kelinjau, Sungai Belayan, Sungai Kelay, Sungai Segah, Sungai Karangan, Sungai Meintang Kecil, Sungai Telen, Sungai Jengeru, Sungai Kahala, dan Sungai Semayang; dan 2. alur pelayaran Danau Semayang, Danau Melintang, Danau Jempang, Danau Prian, Danau Wis, dan Danau Tempatung.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang sah	Dishub Provinsi, Dishub Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>2.3.2.</b>	<b>Perwujudan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan</b>	1. Kariangau Kota Balikpapan dengan Taipa Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah,	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Dishub Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<b>Jalan Nasional dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Nasional: Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Provinsi:</b>	1. Kariangau Kota Balikpapan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, dan Kariangau Kota Balikpapan dengan Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Kariangau Kota Balikpapan dengan Lamongan di Pulau Jawa								
<b>2.3.3.</b>	<b>Perwujudan Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/kota Dalam Provinsi</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi: Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:</b>	1. Kariangau Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kariangau Balikpapan dengan Handil II; 2. Desa Sakka/Desa Peridan dengan Tanjung Kramat; 3. Sungai Meriam dengan Tenggarong.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Dishub Provinsi, Dishub Kabupaten, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>2.3.4.</b>	<b>Perwujudan Pelabuhan Sungai dan Danau</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:</b> 1) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 2) Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah	1. Pelabuhan Tana Grogot di Kabupaten Paser; 2. Pelabuhan Rimba Ayu, Pelabuhan Sebulu, Pelabuhan Kota Bangun, Pelabuhan Tenggarong, Pelabuhan Loa Kulu, Pelabuhan Muara Muntai, Pelabuhan Kenohan, Pelabuhan Tabang, Pelabuhan Muara Wis, Pelabuhan Muara Kaman, dan Pelabuhan Kutai	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Dishub Provinsi, Dishub Kabupaten, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p>kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p><b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau:</b></p> <p>1) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau</p> <p>2) Pemeliharaan dermaga sungai dan danau</p> <p>3) Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau</p> <p><b>Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau:</b></p>	<p>Lama di Kabupaten Kutai Kartanegara;</p> <p>3. Pelabuhan Tanjung Redeb, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Sambaliung, dan Dermaga Sungai Kelai di Kabupaten Berau;</p> <p>4. Dermaga Sungai Tering, Pelabuhan Muara Pahu, Pelabuhan Melak, Pelabuhan Long Iram, Pelabuhan Penyinggahan, dan Pelabuhan Damai di Kabupaten Kutai Barat;</p> <p>5. Pelabuhan Muara Wahau, Pelabuhan Muara Ancalong, Pelabuhan Karang, Pelabuhan Sangkulirang, dan Pelabuhan Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur;</p> <p>6. Pelabuhan Long Bagun, Pelabuhan Batu Dinding, Pelabuhan Long Apari, dan Pelabuhan Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu;</p> <p>7. Pelabuhan Samarinda dan Dermaga Sungai Kunjang di Kota Samarinda.</p>								
	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:</b></p> <p>1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah</p>	<p>1. Pelabuhan Long Kali/Muara Telake di Kabupaten Paser;</p> <p>2. Pelabuhan Kembang Janggut, Dermaga Danau Semayang, dan dan Pelabuhan Bongan di</p>	<p>APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah</p>	<p>Dishub Provinsi, Dishub Kabupaten, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat</p>						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p>kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>2) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>3) Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p><b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau:</b></p> <p>1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau</p> <p>2) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau</p> <p>3) Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau</p> <p>4) Pembangunan dermaga sungai dan danau</p> <p>5) Pemeliharaan dermaga sungai dan danau</p> <p><b>Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau:</b></p>	<p>Kabupaten Kutai Kartanegara;</p> <p>3. Pelabuhan Segah dan Pelabuhan Kelay di Kabupaten Berau;</p> <p>4. Pelabuhan Siluq Ngurai, Pelabuhan Muara Lawa, dan Dermaga Danau Jempang di Kabupaten Kutai Barat;</p> <p>5. Pelabuhan Muara Bengkal, Pelabuhan Long Mesangat, dan Pelabuhan Busang di Kabupaten Kutai Timur;</p> <p>6. Pelabuhan Long Hubung dan Pelabuhan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu.</p>								
<b>2.3.5.</b>	<b>Perwujudan Pelabuhan Penyeberangan</b>									
	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b></p> <p><b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan:</b></p> <p>1) Pengoperasian dan pemeliharaan/rehabilitasi pelabuhan penyeberangan</p>	<p>1. Pelabuhan Kariangau di Kota Balikpapan;</p> <p>2. Pelabuhan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara</p>	<p>APBN dan/atau sumber lain yang sah</p>	<p>Kemenuh, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat</p>						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan:</b> 1) Pembangunan pelabuhan penyeberangan 2) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan	1. Pelabuhan Tenggarong dan Pelabuhan Sungai Meriam di Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. Pelabuhan Gunung Tabur di Kabupaten Berau; dan 3. Pelabuhan Desa Sakka/Desa Peridan dan Pelabuhan Tanjung Kramat di Kabupaten Kutai Timur; 4. Pelabuhan Handil II di IKN.	APBD Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dishub Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>2.4.</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut</b>									
<b>2.4.1.</b>	<b>Perwujudan Pelabuhan Laut</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Utama:</b> 1) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan utama	Pelabuhan Balikpapan/Semayang di Kota Balikpapan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul:</b> 1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpul 2) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul	1. Pelabuhan Tana Paser/Pondong di Kabupaten Paser; 2. Pelabuhan Tanjung Santan di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Pelabuhan Tanjung Redeb di Kabupaten Berau; 4. Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; 5. Pelabuhan Penajam Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara; 6. Pelabuhan Samarinda di Kota Samarinda;	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		7. Pelabuhan Lhok Tuan dan Pelabuhan Tanjung Laut di Kota Bontang; 8. Pelabuhan Kuala Samboja di IKN.								
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional:</b> 1) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional	1. Pelabuhan Mataritip di Kabupaten Berau; 2. Pelabuhan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur.	APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Dishub Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional:</b> 1) Pembangunan pelabuhan pengumpan regional 2) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional <b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal:</b> 1) Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal 2) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan lokal	1. Pelabuhan Teluk Apar di Kabupaten Paser; 2. Pelabuhan Marang Kayu, Pelabuhan Sanga-Sanga, dan Pelabuhan Muara Badak Ilir di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Pelabuhan Mataritip, Pelabuhan Talisayan, Pelabuhan Tanjung Batu, Pelabuhan Lawang-Lawang, dan Pelabuhan Teluk Sulaiman di Kabupaten Berau; 4. Pelabuhan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur; 5. Pelabuhan Jenebora di Kabupaten Penajam Paser Utara; 6. Pelabuhan Kampung Baru di Kota Balikpapan;	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang sah	Dishub Provinsi, Dishub Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		7. Pelabuhan Muara Berau di Perairan Pesisir Selat Makassar; dan 8. Pelabuhan Meridan, Pelabuhan Dondang, Pelabuhan Muara Jawa, Pelabuhan Senipah di IKN.								
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Umum</b>	1. Terminal Umum Kariangau di Kota Balikpapan dan Terminal Umum PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka di Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan satu sistem dengan Pelabuhan Balikpapan/Semayang; 2. Terminal Umum Palaran dan Terminal Umum Sarana Abadi Lestari di Kota Samarinda, Terminal Umum STS Muara Berau di Perairan Pesisir Selat Makassar yang merupakan satu sistem dengan Pelabuhan Samarinda; dan 3. Terminal Umum STS Muara Jawa di IKN yang merupakan satu sistem dengan Pelabuhan Kuala Samboja.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenuh, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kemenuh, Dishub Provinsi, Dishub						





NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Pengembangan bandar udara pengumpul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman/Sepinggan di Kota Balikpapan</li> <li>2. Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Kota Samarinda</li> <li>3. Bandar Udara Kalimantan di Kabupaten Berau</li> </ol>	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenuh, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>2.5.2.</b>	<b>Perwujudan Bandar Udara Pengumpulan</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan sarana dan prasarana bandara/lapangan udara</li> <li>2) Pengelolaan bandara/lapangan udara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bandar Udara Maratua di Kabupaten Berau;</li> <li>2. Bandar Udara Melak/Melalan di Kabupaten Kutai Barat;</li> <li>3. Bandar Udara Muara Wahau/Uyang Lahai/Miau Baru di Kabupaten Kutai Timur;</li> <li>4. Bandar Udara Datah Dawai di Kabupaten Mahakam Ulu.</li> </ol>	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenuh, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN</b> Pembangunan bandar udara pengumpulan <b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan sarana dan prasarana bandara/lapangan udara</li> <li>2) Pengelolaan bandara/lapangan udara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bandar Udara Paser/Tana Paser di Kabupaten Paser;</li> <li>2. Bandar Udara Ujoh Bilang dan Bandar Udara Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu;</li> <li>3. Bandar Udara Bontang di Kota Bontang.</li> </ol>	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenuh, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>2.5.3.</b>	<b>Perwujudan Bandar Udara Khusus</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN</b> Pembangunan bandar udara khusus <b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bandar Udara Pujangan/Muara Badak, Bandar Udara Tanjung Santan, dan Bandar</li> </ol>	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemenuh, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	1) Penyediaan sarana dan prasarana bandara/lapangan udara 2) Pengelolaan bandara/lapangan udara	Udara Kembang Janggut di Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. Bandar Udara Sangkima, Bandar Udara KPC Tanjung Bara, dan Bandar Udara Indexim Coalindo di Kabupaten Kutai Timur; 3. Bandar Udara LNG Bontang di Kota Bontang; 4. Bandar Udara Mangkajang di Kabupaten Berau; 5. Bandar Udara VVIP di Kabupaten Penajam Paser Utara.								
<b>3.</b>	<b>PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI</b>									
<b>3.1.</b>	<b>Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</b>									
<b>3.1.1.</b>	<b>Perwujudan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI</b> <b>Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi:</b> 1) Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur minyak dan gas bumi 2) Pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur minyak dan gas bumi <b>Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b>	a. terminal gas Tanjung Santan, terminal <i>Liquefied Natural Gas</i> Sambera, dan tangki timbun (2 unit) di Kabupaten Kutai Kartanegara; b. tangki timbun (1 unit) di Kabupaten Berau; c. tangki timbun (1 unit) dan fasilitas <i>coal to methanol</i> di Kabupaten Kutai Timur; d. tangki timbun (1 unit), kilang <i>Liquified Petroleum Gas</i> dan <i>refinery unit-V (Refinery Development</i>	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		<p><i>Master Plan</i>) di Kota Balikpapan;</p> <p>e. tangki timbun (2 unit), terminal bahan bakar minyak, Samarinda <i>Powerplan</i>, depo bahan bakar minyak Patra Niaga di Kota Samarinda;</p> <p>f. kilang <i>Liquefied Natural Gas</i> dan <i>Liquified Petroleum Gas</i>, dan kilang minyak Bontang di Kota Bontang.</p>								
<b>3.1.2.</b>	<b>Perwujudan Jaringan Minyak dan Gas Bumi</b>									
	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI</b>  <b>Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Minyak dan Gas Bumi:</b></p> <p>1) Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan minyak dan gas bumi</p> <p>2) Pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan minyak dan gas bumi</p> <p><b>Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Minyak dan Gas Bumi oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>	<p>1. Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang;</p> <p>2. Koridor Bontang-<i>Offshore</i>;</p> <p>3. Koridor Kutai Kartanegara-<i>Offshore</i> Eni;</p> <p>4. Koridor Muara Delta Mahakam-Pesisir Delta Mahakam;</p> <p>5. Koridor Sepinggan-<i>Offshore</i>;</p> <p>6. Koridor Sepinggan-Pesisir Sepinggan;</p> <p>7. Koridor Sepinggan/Balikpapan-<i>Offshore</i>; dan</p>	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		8. Koridor Tanjung Jumala-Offshore Teluk Balikpapan.								
<b>3.2.</b>	<b>Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan</b>									
<b>3.2.1.</b>	<b>Perwujudan Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung</b>									
	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>  <b>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi:</b>  <b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>  <b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan:</b>                      1) Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan                      2) Penyedia solar sel bagi masyarakat kampung</p> <p><b>Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik:</b>                      1) Pembangunan pembangkit listrik</p> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kabupaten Kutai Kartanegara;</li> <li>2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, dan IKN;</li> <li>3. Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Kabupaten Kutai Kartanegara dan IKN;</li> <li>4. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di Kabupaten Kutai Kartanegara;</li> <li>5. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang;</li> <li>6. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten</li> </ol>	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda; 7. Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Bontang; 8. Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid di Kabupaten Mahakam Ulu; 9. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Timur; 10. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur; dan 11. pembangkit tenaga listrik lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.								
<b>3.2.2.</b>	<b>Perwujudan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung</b>									
<b>a.</b>	<b>Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	1. Bukuan-Sambutan; 2. Bontang (Teluk Pandan)-Sangatta;	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, PT. PLN, Dinas ESDM Provinsi,						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p><b>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi:</b></p> <p><b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana</b></p> <p><b>Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem:</b></p>	<p>3. Bukit Biru-Kota Bangun;</p> <p>4. Embalut-Incomer PLTU CFK;</p> <p>5. Harapan Baru-Bukuan;</p> <p>6. Harapan Baru-Tengkawang;</p> <p>7. Karangjoang-Harapan Baru;</p> <p>8. Karangjoang-Kariangau;</p> <p>9. Kuaro-Tanah Grogot;</p> <p>10. Embalut-Bukit Biru;</p> <p>11. Muara Badak-Teluk Pandan;</p> <p>12. Manggarsari-Industri;</p> <p>13. Manggarsari-Karangjoang;</p> <p>14. Muara Jawa-Bukuan;</p> <p>15. Petung-Kuaro;</p> <p>16. Petung-PLTU Kariangau;</p> <p>17. Senipah-Margasari;</p> <p>18. Sambutan-Muara Badak;</p> <p>19. Tanjung-Kuaro;</p> <p>20. Tengkawang-Embalut.</p>		Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b></p> <p><b>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi:</b></p> <p><b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan:</b></p>	<p>1. <i>New</i> Balikpapan-Kariangau;</p> <p>2. <i>New</i> Samarinda-Sambara;</p> <p>3. Sangatta-Maloy;</p> <p>4. PLTMG Bangkanai (Kalimantan Tengah)-Melak;</p> <p>5. Tanjung Redeb-Talisayan;</p> <p>6. Palaran-Senipah;</p> <p>7. Melak-Kota Bangun;</p> <p>8. Muara Wahau-Tanjung Redeb;</p> <p>9. Muara Wahau-Sepaso;</p> <p>10. Maloy-Kobexindo;</p> <p>11. <i>New</i> Samarinda-Embalut;</p>	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah sah	Kemen ESDM, PT. PLN, Dinas ESDM Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan  <b>Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem:</b> Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem	12. Lati-Tanjung Redeb; 13. Tanjung Redeb-Tanjung Selor; 14. jaringan transmisi tenaga listrik lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;								
<b>b.</b>	<b>Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b> <b>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi:</b> <b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>  <b>Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik:</b>	seluruh Wilayah Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah sah	Kemen ESDM, PT. PLN, Dinas ESDM Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>c.</b>	<b>Perwujudan Gardu Listrik</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b> <b>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi:</b> <b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>	1. Gardu Induk (GI) Kuaro, GI Grogot, GI Komam (Batu Sopang), GI Longikis di Kabupaten Paser; 2. GI Embalut, GI Tenggarong/Bukit Biru, GI Sambera/Muara Badak, GI Kota Bangun, GI Sanga-Sanga, GI Kembang Janggut dan	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah sah	Kemen ESDM, PT. PLN, Dinas ESDM Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						



NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<b>Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Gardu Listrik:</b>	Gardu Induk Ekstra Tinggi Embalut di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. GI Tanjung Redeb di Kabupaten Berau; 4. GI Sangatta, GI Sepaso, GI Muara Wahau (arah Muara Bengkal), dan GI Bontang/Teluk Pandan di Kabupaten Kutai Timur; 5. GI Petung di Kabupaten Penajam Paser Utara; 6. GI Gunung Malang/Industri, GI Batakan/Manggar Sari, GI Karang Joang/Giri Rejo, GI Kariangau, dan GI <i>New</i> Balikpapan di Kota Balikpapan; 7. GI Harapan Baru, GI Sambutan, GI Bukuan, GI Tengawang, dan GI Sei Keledang di Kota Samarinda; 8. GI Bontang/Teluk Pandan di Kota Bontang; 9. GI Muara Jawa dan GI Senipah di IKN.								
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b> <b>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi:</b> <b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>	1. GI Lati di Kabupaten Berau; 2. GI Melak (arah Ujoh Bilang) di Kabupaten Kutai Barat; 3. GI Maloy di Kabupaten Kutai Timur; 4. GI <i>New</i> Samarinda di Kota Samarinda; 5. GI Samboja di IKN;	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah sah	Kemen ESDM, PT. PLN, Dinas ESDM Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<b>Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Gardu Listrik:</b>	6. dan 7. gardu induk lainnya sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.								
<b>4.</b>	<b>PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI</b>									
<b>4.1.1.</b>	<b>Perwujudan Jaringan Tetap</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b> Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Tetap	1. saluran kabel serat optik di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota; 2. saluran kabel bawah Laut meliputi Koridor: a. Koridor Mamuju-Balikpapan; b. Koridor Sangatta-Palu atau Donggala; c. Koridor Berau-Berau; d. Koridor Balikpapan-Doda (Sulawesi Barat); dan e. Koridor Panajam-WP Balikpapan.	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemeninfo), Dinas Komunikasi, Informatika Persandian, dan Statistik (Diskominfo PS) Provinsi, PT. Telkom, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>4.1.2.</b>	<b>Perwujudan Infrastruktur Jaringan Tetap</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b> Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Tetap	seluruh Wilayah Kabupaten/Kota	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemeninfo, Diskominfo PS Provinsi, PT. Telkom, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>4.1.3.</b>	<b>Perwujudan Jaringan Bergerak</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b> Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Bergerak	seluruh Wilayah Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemeninfo, Diskominfo PS Provinsi, PT. Telkom, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>5.</b>	<b>PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR</b>									

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
5.1.1.	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi</b>									
	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>  <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Di Atas 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan</li> <li>2) Peningkatan/rehabilitasi bendung irigasi</li> <li>3) Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi rawa</li> <li>4) Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi tambak</li> <li>5) Peningkatan/rehabilitasi sumur jaringan irigasi air tanah</li> <li>6) Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi air tanah</li> <li>7) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa</li> <li>8) Pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi</li> <li>9) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>  <b>Penataan Prasarana Pertanian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani</li> </ol>	<p>Daerah Irigasi Rawa atau Daerah Irigasi Tambak atau Daerah Irigasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saluran Irigasi Rawa Laburan Lama, Saluran Irigasi Rawa Muara Adang, Saluran Irigasi Rawa Padang Pangrapat, Saluran Irigasi Rawa Riwang, Saluran Irigasi Rawa Sebakung, Saluran Irigasi Rawa Suliliran, Saluran Irigasi Rawa Tanjung Aru, Saluran Irigasi Rawa Tanjung Harapan, dan Saluran Irigasi Rawa Telake di Kabupaten Paser;</li> <li>2. Saluran Irigasi Panoragan, Saluran Irigasi Separi II, Saluran Irigasi Marangkayu, Saluran Irigasi Rawa Muara Badak, dan Saluran Irigasi Rawa Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara;</li> <li>3. Saluran Irigasi Beriwit, Saluran Irigasi Biatan, Saluran Irigasi Labanan, Saluran Irigasi Merancang, Saluran Irigasi Muara Bangun, Saluran Irigasi Semurut dan Buyung-Buyung, Saluran Irigasi Tepian Buah, Saluran Irigasi</li> </ol>	<p>APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah</p>	<p>Kemen PUPR, Kementerian Pertanian (Kementan), Dinas PUPRPERA Provinsi, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi</p>						



NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		9. Saluran Irigasi Sungai Buluh dan Saluran Irigasi Samboja di IKN.								
	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>  <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan jaringan irigasi permukaan</li> <li>2) Pembangunan bendung irigasi</li> <li>3) Pembangunan jaringan irigasi rawa</li> <li>4) Pembangunan jaringan irigasi tambak</li> <li>5) Pembangunan sumur jaringan irigasi air tanah</li> <li>6) Pembangunan jaringan irigasi air tanah</li> <li>7) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa</li> <li>8) Pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi</li> <li>9) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>  <b>Penataan Prasarana Pertanian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani</li> </ol>	<p>Daerah Irigasi Rawa atau Daerah Irigasi Tambak atau Daerah Irigasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. saluran irigasi Muara Asa dan saluran irigasi rawa Resak di Kabupaten Kutai Barat;</li> <li>2. saluran irigasi rawa Telake di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> </ol>	APBN, APBD Provinsi	Kemen PUPR, Kementan, Dinas PUPRPERA Provinsi, DTPH Provinsi						
<b>5.1.2.</b>	<b>Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir</b>									
<b>a.</b>	<b>Perwujudan Jaringan Pengendalian Banjir</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	1. jaringan pengendalian banjir Sungai Mahakam		Kemen PUPR, Dinas PUPRPERA Provinsi,						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p><b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Provinsi:</b>  <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>  <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan tanggul sungai</li> <li>2) Pembangunan bangunan perkuatan tebing</li> <li>3) Pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir</li> <li>4) Pembangunan kanal banjir</li> <li>5) Pembangunan stasiun pompa banjir</li> <li>6) Normalisasi/restorasi sungai</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>  <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Provinsi dan Kawasan Strategis Nasional:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>2) Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya</li> </ol> <p><b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>2) Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda;</li> <li>2. jaringan pengendalian banjir Sungai Karang Mumus di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda;</li> </ol>	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>b.</b>	<b>Perwujudan Bangunan Pengendalian Banjir</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	1. Bendung Pengendalian (Bendali) Saing Prupuk di Kabupaten Paser;	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p><b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Provinsi:</b></p> <p><b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota:</b></p> <p>1) Rehabilitasi/peningkatan polder/kolam retensi</p> <p>2) Rehabilitasi/peningkatan bangunan sabo</p> <p>3) Rehabilitasi/peningkatan <i>check dam</i></p> <p>4) Rehabilitasi/peningkatan <i>Flood Forecasting and Warning System</i> (FFWS)</p>	<p>2. Bendali I, Bendali II, Bendali III, Bendali IV, dan Bendali V di Kota Balikpapan;</p> <p>3. Bendali Sungai Karang Mumus (Griya Mukti), Kolam Retensi H. M. Ardans, Kolam Retensi Air Hitam, Kolam Retensi Vorvo 1, Kolam Retensi Vorvo 2, dan Kolam Retensi Tani Aman/Loa Hui di Kota Samarinda.</p>								
	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b></p> <p><b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Provinsi:</b></p> <p><b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota:</b></p> <p>1) Pembangunan polder/kolam retensi</p> <p>2) Pembangunan bangunan sabo</p> <p>3) Pembangunan <i>check dam</i></p> <p>4) Pembangunan <i>Flood Forecasting and Warning System</i> (FFWS)</p>	<p>1. Bendungan Lambakan dan Bendungan Kendilo di Kabupaten Paser;</p> <p>2. Bendali Hulu Sungai Ampal, dan Bendungan Sungai Wain (Pusat)/Bendungan Pertamina di Kota Balikpapan;</p> <p>3. Bendali Loa Bakung, Kolam Retensi Bengkuring, Kolam Retensi Pampang, Kolam Retensi Karang Asam Besar, Kolam Retensi Gunung Lingai, Kolam Retensi Lingai, Kolam Retensi Rapak Mahang, Kolam Retensi Rapak Dalam, Embung Sempaja, Kolam Retensi Sempaja, Danau Harapan Baru, dan Danau Simpang Pasir di Kota Samarinda;</p>	<p>APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah</p>	<p>Kemen PUPR, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat</p>						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		4. Bendungan Lawe-Lawe di Kabupaten Penajam Paser Utara; 5. Kolam Retensi Kanaan dan Bendungan <i>Estuarydam</i> di Kota Bontang; dan 6. Bendungan Sepaku Semoi di IKN.								
<b>5.1.3.</b>	<b>Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b> <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Provinsi:</b> <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota:</b> 1) Rehabilitasi bendungan 2) Rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya 3) Rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku 4) Penyediaan air bersih dan sanitasi 5) Rehabilitasi/peningkatan <i>breakwater</i> 6) Rehabilitasi/peningkatan <i>seawall</i> dan bangunan pengaman pantai lainnya	1. Bendung Muara Adang, Bendung Padang Pangrapat, Bendung Rawa Riwang, Bendung Sebakung, Bendung Suliliran, Bendung Tanjung Aru, Bendung Tanjung Harapan, dan Bendung Laburan di Kabupaten Paser; 2. Bendungan Marangkayu, Bendung Marangkayu, Bendung Panoragan, Bendung Separi, dan Bendung Muara Badak di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Embung Beriwit, Bendung Muara Bangun, Bendungan Merancang, Bendungan Labanan, Bendung Biatan, Bendung Semurut dan Buyung-Buyung, Bendung Sei Kuran, Bendung Sukan Pantai, Bendung Sukan Tengah, Bendung Tabalar, Bendung Tanjung	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Kementan, Dinas PUPRPERA Provinsi, DPTPH Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						



NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Perengat, Bendung Tepian Buah, Bendung Rantau Pangan, dan Bendung Urutang di Kabupaten Berau; 4. Bendung Mentiwan, Bendung Rapak Oros, Bendung Resak, Bendung Muara Asa, dan Bendung Jenang Denum di Kabupaten Kutai Barat; 5. Bendung Cipta Graha, Bendung Kaliorang, Bendung Rantau Pulung, Bendung Pesap, Bendung Selangkau, Bendung Kaubun, Bendung Bengalon, Bendung Tanah Abang, dan Bendungan Sangatta di Kabupaten Kutai Timur; 6. Bendung Waru, Bendung Sebulu, dan Bendung Babulu Labangka di Kabupaten Penajam Paser Utara; 7. Embung Aji Raden, Bendungan Manggar, Bendungan Teritip, dan Embung Sungai Wain di Kota Balikpapan; 8. Bendungan Lempake dan Bendung Tani Aman di Kota Samarinda; 9. Bendungan Samboja dan Bendung Sungai Buluh di IKN.								
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	1. Bendungan Kendilo, Bendungan Lambakan,		Kemen PUPR, Kementan, Dinas						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p><b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Provinsi:</b></p> <p><b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan bendungan</li> <li>2) Pembangunan embung dan penampung air lainnya</li> <li>3) Pembangunan sumur air tanah untuk air baku</li> <li>4) Pembangunan unit air baku</li> <li>5) Pembangunan insfrastruktur untuk melindungi mata air</li> <li>6) Penyediaan air bersih dan sanitasi</li> <li>7) Pembangunan <i>breakwater</i></li> <li>8) Pembangunan <i>seawall</i> dan bangunan pengaman pantai lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bendungan Pias, dan Bendung Regulator Telake di Kabupaten Paser;</li> <li>2. Bendungan Batu Lepek di Kabupaten Kutai Kartanegara;</li> <li>3. Bendung Gemuruh di Kabupaten Kutai Barat;</li> <li>4. Bendungan Kaliorang, Bendungan Sekerat, dan Bendali Suka Rahmat di Kabupaten Kutai Timur;</li> <li>5. Bendung Datah Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu;</li> <li>6. Bendungan ITCI dan Bendungan Toyu di Kabupaten Penajam Paser Utara;</li> <li>7. Bendungan Sungai Wain di Kota Balikpapan;</li> <li>8. Embung Lubang Putang dan Embung Muang di Kota Samarinda;</li> <li>9. Bendungan <i>Estuarydam</i> di Kota Bontang;</li> <li>10. Bendungan Sepaku Semoi, <i>Intake</i> Sepaku, dan Bendungan Samboja II di IKN.</li> </ol>	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	PUPRPERA Provinsi, DPTPH Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>6.</b>	<b>PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA</b>									
<b>6.1.1.</b>	<b>Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPAM Regional Kota Bontang Sistem Bendali Sukarahmat termasuk SPAM perpipaan bawah Laut Pulau Melahing;</li> </ol>	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		2. SPAM Regional Kota Balikpapan Sistem Sepaku Semoi; 3. SPAM Regional Kota Balikpapan Sistem Mahakam dan Rencana Waduk Batu Lepek; 4. SPAM Regional Sistem Long Kali; 5. SPAM Regional Sistem Indominco; 6. SPAM Regional Penajam Paser Utara Sistem Bendung Telake; 7. SPAM Strategis Maloy.								
<b>6.1.2.</b>	<b>Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR LIMBAH</b>	1. SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Samarinda-Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang; 3. SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Kota Samarinda-Kabupaten Kutai Kartanegara; 4. SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan; 5. SPAL Domestik Kawasan Perkotaan Kabupaten	APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUPRPERA Provinsi, Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan; 6. SPAL Domestik IKN.								
<b>6.1.3.</b>	<b>Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)</b>									
	<p><b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>  <b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:</b></p> <p>1) Fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</p> <p>2) Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan</p> <p>3) Pembangunan sistem pengolahan limbah B3 terpadu</p> <p><b>Pembangunan sistem pengolahan limbah B3 terpadu oleh Pelaku Usaha/Masyarakat.</b></p>	<p>1. Maloy di Kabupaten Kutai Timur;</p> <p>2. Kariangau di Kota Balikpapan.</p>	<p>APBN, APBD Provinsi, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah</p>	<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), DLH Provinsi, Dinkes Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat</p>						
<b>6.1.4.</b>	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan</b>									
	<p><b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b></p> <p><b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional:</b></p> <p>1) Penyusunan rencana, kebijakan, dan teknis penanganan sampah regional</p> <p>2) Pemrosesan akhir di TPA/TPST regional</p> <p>3) Pengoperasian dan pemeliharaan TPA/TPST regional</p>	<p>1. Tempat Pemrosesan Akhir Regional Tenggarong Seberang dan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Loa Janan di Kabupaten Kutai Kartanegara;</p> <p>2. Tempat Pemrosesan Akhir Regional Manggar di Kota Balikpapan;</p>	<p>APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah</p>	<p>Kemen PUPR, DLH Provinsi, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat</p>						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	4) Kerja sama penanganan sampah di TPA/TPST regional 5) Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST regional	3. Tempat Pemrosesan Akhir Regional Kawasan Perkotaan Bontang; dan 4. Tempat Pemrosesan Akhir Regional Samboja di IKN.								
<b>II.</b>	<b>PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG</b>									
<b>1.</b>	<b>PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG</b>									
<b>1.1.</b>	<b>Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya</b>									
<b>1.1.1.</b>	<b>Perwujudan Badan Air</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b> Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota: 1) Revitalisasi Danau	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>1.1.2.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Hutan Lindung</b>									
	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN, REHABILITASI LAHAN SERTA KONSERVASI TANAH DAN AIR</b> <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN:</b> 1) Pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari 2) Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari hutan lindung  <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN: Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi:</b> 1) Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK, Dishut Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2) Pembagian blok/petak pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan 3) Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana operasionalisasi KPH <b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung:</b> 1) Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi:</b> 1) Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan 2) Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan 3) Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hasil hutan <b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK):</b> 1) Pengolahan bahan baku hasil hutan bukan kayu hayati									
<b>1.1.3.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Lindung Gambut</b>									
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LAHAN GAMBUT</b> 1) Peningkatan kualitas ekosistem gambut (restorasi lahan gambut) 2) Pemulihan gambut rawan kebakaran hutan 3) Pembentukan desa mandiri peduli gambut 4) Pemantauan kinerja pengelolaan gambut terhadap usaha dan/atau kegiatan 5) Pemulihan gambut terdegradasi di lahan masyarakat  <b>PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b> Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut	Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Barat	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK, Dishut Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						



NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<b>PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN</b> Perubahan fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Produksi (PTB/KHP)	Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
	<b>PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN</b> Perubahan peruntukan Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Pertanian (PTB/P)	Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
	<b>PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN</b> Perubahan peruntukan Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Permukiman (PTB/PM)	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Balikpapan	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
<b>1.2.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat</b>									
	<b>PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT, DAN PULAU</b> <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil:</b> 1) Identifikasi dan inventarisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah wilayah pesisir 2) Identifikasi dan inventarisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah sempadan pantai  <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b> <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:</b> 1) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2) Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kepmen KP, DKP Provinsi, DLH Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						



NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b> <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi:</b> 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
<b>1.3.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Konservasi</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN:</b> 1) Pengelolaaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari 2) Pengembangan ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi <b>PROGRAM REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN, REHABILITASI LAHAN SERTA KONSERVASI TANAH DAN AIR</b> <b>PROGRAM PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM</b> <b>PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI</b> <b>PROGRAM KONSERVASI SPRESIES DAN GENETIK</b> <b>PROGRAM PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI</b>  <b>PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b> 1) Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut  <b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b> <b>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi:</b>	1. Cagar Alam Padang Luway di Kabupaten Kutai Barat; 2. Cagar Alam Teluk Apar di Kabupaten Paser dan Perairan Pesisir Selat Makassar; 3. Cagar Alam Teluk Adang di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara; 4. Cagar Alam Muara Kaman Sedulang di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur; 5. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung di Kabupaten Mahakam Hulu; 6. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Perairan Pulau Semama di Kabupaten Berau; 7. Taman Nasional Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang; 8. Taman Nasional Betung Kerihun di Kabupaten Mahakam Ulu;	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK, Kepmen KP, Dishut Provinsi, DKP Provinsi, DLH Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p>1) Pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan kawasan TAHURA</p> <p>2) Pengamanan kawasan TAHURA provinsi</p> <p>3) Pengawetan tumbuhan, satwa, serta habitat TAHURA provinsi</p> <p>4) Pemulihan ekosistem atau penutupan kawasan sesuai rencana pengelolaan TAHURA provinsi</p> <p>5) Pemanfaatan jasa lingkungan TAHURA provinsi</p> <p>6) Pengelolaan daerah penyangga TAHURA provinsi</p> <p><b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL:</b>  <b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi:</b></p> <p>1) Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat</p> <p>2) Rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>3) Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p><b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</b></p> <p><b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:</b></p> <p>1) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p>	<p>9. Taman Hutan Raya Lati Petangis di Kabupaten Paser;</p> <p>10. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara;</p> <p>11. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Perairan Pulau Sangalaki di Kabupaten Berau;</p> <p>12. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Berau;</p> <p>13. Kawasan Konservasi Perairan Bontang di Kota Bontang meliputi Perairan Pulau Kedindingan dan Pulau Berasbasah, Perairan Pulau Melahing, dan Perairan Pulau Segajah di Kota Bontang;</p> <p>14. Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur.</p>								

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2) Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup									
	<b>PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN</b> Perubahan peruntukan Kawasan Konservasi menjadi Kawasan Pertanian (KS/P)	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Bontang	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
	<b>PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN</b> Perubahan peruntukan Kawasan Konservasi menjadi Kawasan Perikanan (KS/IK)	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
	<b>PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN</b> Perubahan peruntukan Kawasan Konservasi menjadi Kawasan Permukiman (KS/PM)	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Penajam Paser Utara	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
<b>1.4.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b> <b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi:</b> 1) Rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil 2) Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil <b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.</b> <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b> <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:</b> 1) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Harapan, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Apar, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanjung Telake-Tanjung Sembiling, serta Kawasan Konservasi Perairan Karang Tanjung Aru di Kabupaten Paser; 2. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kecamatan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kepmen KP, DKP Provinsi, DLH Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						



NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5	
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
		Jummai di Kabupaten Penajam Paser Utara; 6. Kawasan Konservasi Maritim Kapal <i>Amagiri</i> di Kabupaten Paser dan Kawasan Konservasi Maritim Kapal SS <i>Siera Cordoba</i> di Selat Makassar pada Kabupaten Kutai Timur.									
<b>1.5.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Hutan Adat</b>										
	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN ADAT DAN EKOSISTEMNYA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan kawasan hutan adat</li> <li>Perencanaan, dan pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan adat</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b></p> <p>Pengakuan MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH: Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH:</p> <p><b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b></p> <p>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Hutan Adat Hemaq Beniuq, Kawaasan Hutan Adat Bahau Uma Luhut, Kawasan Hutan Adat Anyaang Apoq, Kawasan Hutan Adat Benuaq Telimuk, Kawasan Hutan Adat Teluyen Jarikng Lestari, Kawasan Hutan Adat Benuaq Madjaun, dan Kawasan Hutan Adat Gunung Menaliq di Kabupaten Kutai Barat</li> <li>Kawasan Hutan Adat Mului di Kabupaten Paser</li> </ol>	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK, Dishut Provinsi, DLH Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat							

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2. Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah provinsi 3. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup									
<b>1.6.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Lindung Geologi</b>									
	<p><b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>  <b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan pemanfaatan ekosistem Karst</li> <li>2) Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem Karst</li> <li>3) Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi</li> <li>4) Pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>  <b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> </ol>	Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat serta kawasan imbuhan air tanah di sekitarnya berada di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen LHK, Dinas ESDM Provinsi, DLHK Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2) Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup									
<b>1.7.</b>	<b>Kawasan Ekosistem Mangrove</b>									
	<p><b>PROGRAM REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN, REHABILITASI LAHAN SERTA KONSERVASI TANAH DAN AIR</b></p> <p><b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN</b></p> <p>1) Rehabilitasi hutan mangrove 2) Penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove</p> <p><b>PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b></p> <p>1) Pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p><b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b> <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara:</b></p> <p>1) Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara 2) Penerapan teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan 3) Pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan 4) Pengembangan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan 5) Rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan</p> <p><b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b> <b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam:</b></p>	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK, Kemen KP, DLH Provinsi, DKP Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5	
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042	
	1) Perencanaan pemanfaatan ekosistem lahan basah 2) Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem lahan basah 3) Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi 4) Pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi  <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b> <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:</b> 1) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2) Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup										
<b>2.</b>	<b>PERWUJUDAN KAWASAN BUDI DAYA</b>										
<b>2.1.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Hutan Produksi</b>										
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN</b> 1) Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi 2) Peningkatan usaha hutan produksi 3) Peningkatan usaha jasa lingkungan hutan produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 4) Peningkatan usaha industri kehutanan  <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b> <b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi:</b>	seluruh Wilayah Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK, Dishut Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat							



NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	1) Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan 2) Pembagian blok/petak pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan 3) Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana operasionalisasi KPH <b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung:</b> 1) Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi:</b> 1) Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan 2) Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan 3) Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hasil hutan <b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK):</b> Pengolahan bahan baku hasil hutan bukan kayu hayati									
	<b>PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN</b> Perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Hutan Lindung (KHP/PTB)	Kota Balikpapan	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
	<b>PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN</b> Perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Konservasi (KHP/KS)	Kabupaten Kutai Kartanegara	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
	<b>PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN</b> Perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Pertanian (KHP/P)	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Paser Utara, dan Kota Samarinda								
	<b>PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN</b> Perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Perikanan (KHP/IK)	Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
	<b>PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN</b> Perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Permukiman (KHP/PM)	Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
<b>2.2.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat</b>									
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara:</b> 1) Pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara 2) Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara 3) Penerapan teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan 4) Pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan 5) Pengembangan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan	Kabupaten Penajam Paser Utara	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen LHK, Dishut Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>2.3.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Pertanian</b>									
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b> Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian: Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	seluruh Wilayah Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan, DPTPH Provinsi, Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dister KH) Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						





NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<b>PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN</b> Perubahan fungsi Kawasan Pertanian menjadi Kawasan Konservasi (P/KS)	Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
	<b>PROGRAM PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN</b> Perubahan fungsi Kawasan Pertanian menjadi Kawasan Hutan Produksi (P/KHP)	Kabupaten Berau	APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota	Kemen LHK, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota						
<b>2.4.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Perikanan</b>									
	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b> <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan</li> <li>2) Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap</li> <li>3) Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap</li> </ol> <p><b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan</li> <li>2) Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap</li> <li>3) Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA</b> <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi;</li> <li>2. Pulau Maratua dan Muara Berau di Kabupaten Berau;</li> <li>3. Muara Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara;</li> <li>4. Teluk Sangkulirang dan Tanjung Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur;</li> <li>5. Teluk Bontang di Kota Bontang;</li> <li>6. Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang;</li> <li>7. Teluk Adang di Kabupaten Paser;</li> <li>8. Pantai Babulu, Pantai Api-Api, dan Teluk Balikpapan di Kabupaten Penajam Paser Utara;</li> </ol>	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, DKP Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p>2) Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota</p> <p>3) Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut</p> <p>4) Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota</p> <p>5) Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut dan lintas daerah kabupaten/kota</p> <p>6) Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi</p> <p>7) Pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p><b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat:</b></p> <p>1) Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota</p> <p>2) Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau</p>	<p>9. Pulau Balang Teluk Balikpapan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan;</p> <p>10. Pantai Manggar dan Pantai Lamaru di Kota Balikpapan;</p> <p>11. Tanjung Manukmanukan, Pulau Badak-Badak, dan Pulau Selokia di Kota Bontang;</p> <p>12. Tanjung Pakul di Kota Bontang dan Teluk Pandan di Kabupaten Kutai Kartanegara;</p> <p>13. Pulau Miang Besar dan Tanjung Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur; dan</p> <p>14. Pulau Balikukup, Tababinga, Tanjung Pandan dan Tanjung Batu, Tanjung Karangtigau, dan Teluk Pulau Maratua di Kabupaten Berau.</p>								

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p>manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota</p> <p><b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>  <b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</li> <li>2) Pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</li> <li>3) Pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> <li>2) Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> </ol> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>									
2.5.	Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi									
2.4.1.	Perwujudan Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi									

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI</b> Pengembangan lapangan minyak</p> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>	<p>1. Perairan Teluk Balikpapan, Perairan Muara Mahakam, dan Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.</p> <p>2. Lapangan Gendola, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia <i>Deepwater Development Project/IDD</i>) di Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi.</p>	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen LHK, Dinas ESDM Provinsi, DLH Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>2.4.2.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik</b>									
	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b> <b>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi:</b> <b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b> <b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan:</b></p> <p>1) Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan 2) Penyedia solar sel bagi masyarakat kampung</p> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>	Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Dinas ESDM Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						
<b>2.6.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri</b>									



NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p><b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>  <b>Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan rencana pembangunan industri provinsi</li> <li>2) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri</li> <li>3) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri</li> <li>4) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri</li> <li>5) Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>  <b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi:</b></p> <p><b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> <li>2) Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> </ol>	seluruh Wilayah Kabupaten/Kota serta Perairan Pesisir Selat Makassar di Kota Bontang	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Disperindag UKM Provinsi, DLH Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b>									
<b>2.7.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Pariwisata</b>									
	<p><b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b></p> <p><b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan daya tarik wisata unggulan provinsi</li> <li>2) Perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi</li> <li>3) Pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi</li> </ol> <p><b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi</li> <li>2) Perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi</li> <li>3) Pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi</li> <li>4) Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi</li> <li>5) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi</li> <li>6) Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi</li> </ol> <p><b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan destinasi pariwisata provinsi</li> <li>2) Perencanaan destinasi pariwisata provinsi</li> <li>3) Pengembangan destinasi pariwisata provinsi</li> </ol>	seluruh Wilayah Kabupaten/Kota serta Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenparkraf, Dispar Provinsi, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p>4) Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi</p> <p>5) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi</p> <p>6) Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi</p> <p><b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>  <b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif:</b></p> <p>1) Layanan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif</p> <p>2) Perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik</p> <p><b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>  <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan:</b></p> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>									
<b>2.8.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Permukiman</b>									
	<p><b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>  <b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi:</b></p> <p>1) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah provinsi</p>	seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dan Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						









NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p><b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>  <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi:</b>                      1) Penyediaan tempat penampungan pengungsi</p> <p><b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>  <b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan:</b>                      Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka pematapan satuan permukiman</p>									
<b>2.9.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Transportasi</b>									
	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>  <b>Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Penyeberangan:</b>  <b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan:</b>                      1) Pembangunan pelabuhan penyeberangan                      2) Pengoperasian dan pemeliharaan/rehabilitasi pelabuhan penyeberangan</p> <p><b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>  <b>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Utama:</b>  <b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Utama:</b>                      1) Pembangunan pelabuhan utama                      2) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan utama</p> <p><b>Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Utama:</b></p>	seluruh Wilayah Kabupaten/Kota serta Perairan Pesisir Selat Makassar dan Laut Sulawesi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhub, Dishub Provinsi, Dishub Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						







NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	3) Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan perusahaan pelabuhan perikanan  <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN</b> Pengembangan bandar udara pengumpul									
<b>2.10.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan</b>									
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b> Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan	Kabupaten Berau dan Perairan Pesisir Laut Sulawesi	APBN	Kemenhan, TNI dan/atau Polri						
<b>III.</b>	<b>PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI</b>									
<b>31.1.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi</b>									
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</b> <b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota:</b> 1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota 2) Penataan bangunan dan lingkungan 3) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan 4) Pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan  <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b> <b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi:</b> Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah provinsi  <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	1. kawasan industri di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara; 2. kawasan industri Maloy di Kabupaten Kutai Timur; 3. kawasan industri Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Kemen PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Disperindag UKM Provinsi, DLH Provinsi, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, PDAM, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p><b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> <li>2) Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> </ol> <p><b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b> Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Provinsi</p> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p> <p><b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b> <b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah:</b> Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi</p> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>									
	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b> <b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan infrastruktur lumbung pangan</li> <li>2) Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya</li> <li>3) Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik</li> </ol>	Kawasan Sentra Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan, DPTPH Provinsi, Dister KH Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p><b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>  <b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi:</b>                      Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi dan kabupaten/kota  <b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi:</b>                      Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi  <b>Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pertanian oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>									
	<p><b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</b>  <b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota:</b>                      1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota                      2) Penataan bangunan dan lingkungan                      3) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan                      4) Pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan  <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>  <b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi:</b></p>	kawasan perdagangan dan jasa di Kota Samarinda	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenperin, Kemen PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Disperindag UKM Provinsi, DLH Provinsi, Dinas PUPRPERA Provinsi, Pelaku Usaha, PDAM, dan/atau Masyarakat						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p>Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah provinsi</p> <p><b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> <li>2) Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> </ol> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat</b></p>									
<b>31.2.</b>	<b>Perwujudan KSP dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya</b>									
	<p><b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>  <b>Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH:</b>  <b>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH:</b></p> <p><b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>  <b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Hutan Adat Hemaq Beniung di Kabupaten Kutai Barat</li> <li>2. Kawasan Hutan Adat Mului di Kabupaten Paser</li> </ol>	<p>APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah</p>	<p>KLHK, Bappeda Provinsi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi, Dispar Provinsi, dan/atau Masyarakat</p>						

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan</li> <li>2. Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah provinsi</li> <li>3. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup</li> </ol>									
<b>31.3.</b>	<b>Perwujudan KSP dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup</b>									
	<p><b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>  <b>Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi:</b>  <b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem lahan basah</li> <li>2. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi</li> <li>3. Pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara</li> <li>2) Penerapan teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Danau Kaskade Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat;</li> <li>2. Kawasan Teluk Balikpapan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan;</li> <li>3. Kawasan Delta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara;</li> <li>4. Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau;</li> <li>5. Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.</li> </ol>	APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	KLHK, DLH Provinsi, Dishut Provinsi, DKP Provinsi, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat						





NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PJM-1		PJM-2	PJM-3	PJM-4	PJM-5
					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	<p><b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan</li> <li>2. Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya</li> <li>3. Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati</li> </ol> <p><b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b></p> <p><b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan</li> <li>2. Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah provinsi</li> <li>3. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup</li> </ol>									

GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

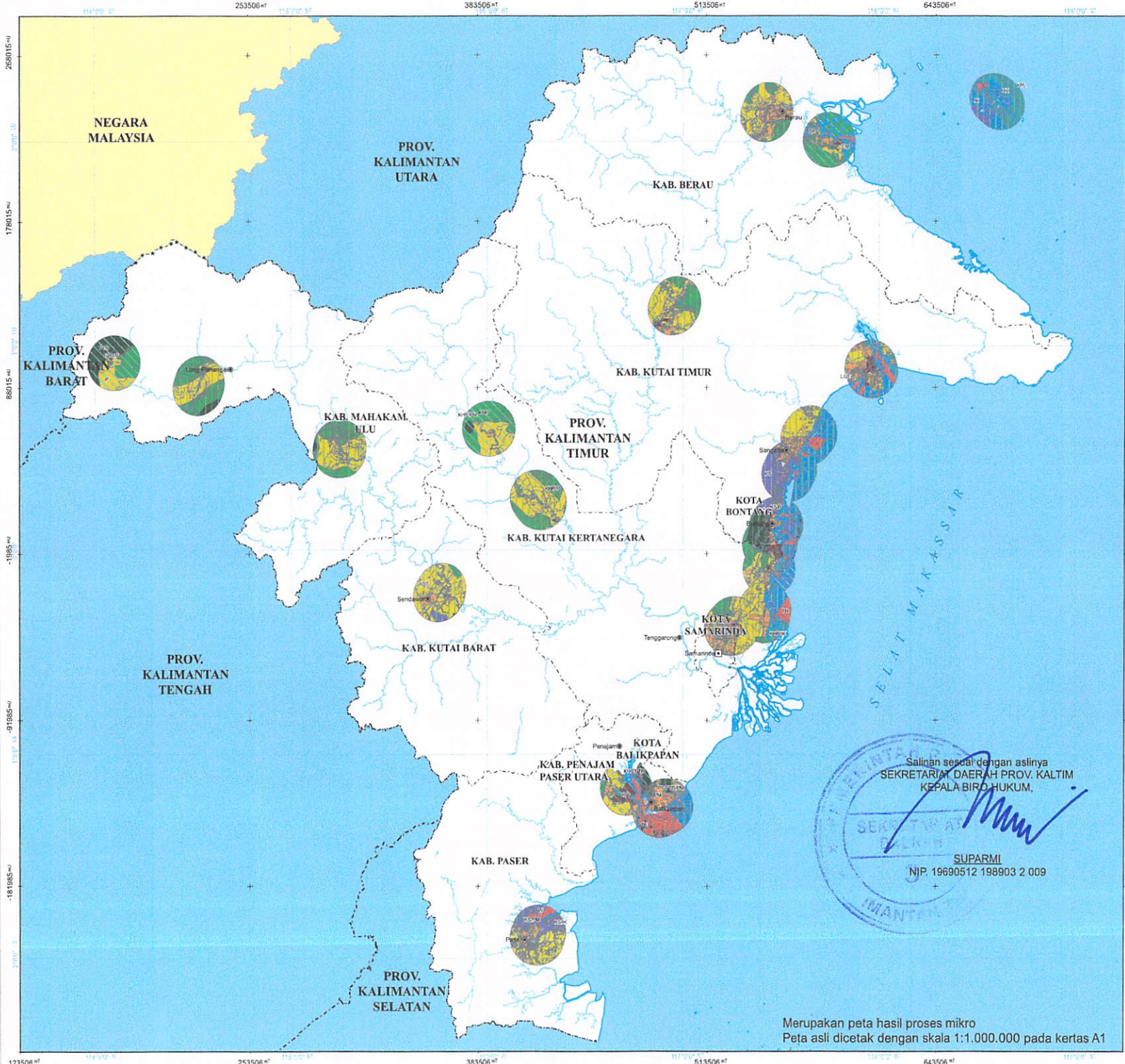
ISRAN NOOR


Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BUREAU HUKUM

SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009







**PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

---

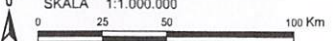
**LAMPIRAN XV  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042**

---

**PETA KETENTUAN KHUSUS  
RENCANA POLA RUANG KAWASAN  
KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN**

---

U  
SKALA 1:1.000.000




---

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008








---

**DIAGRAM LOKASI**

































































---

**KETERANGAN :**

 Ibu Kota Provinsi	 Batas Administrasi	 Perairan
 Ibu Kota Kabupaten/Kota	 Batas Provinsi	 Garis Pantai Rencana
	 Batas Kabupaten/Kota	








---

**RENCANA POLA RUANG**

 Kawasan Lindung	 Kawasan Eksistim
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan
 Kawasan Lindung	 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan

---

**KETENTUAN KHUSUS**

 Ada	 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar
 Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	 Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
 Kawasan Kemungkinan Bahaya Kematangan	 Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam	

---

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbarui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. SK No. 8628/MENLHK-PTLU/KH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

---

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

**ISRAN NOOR**

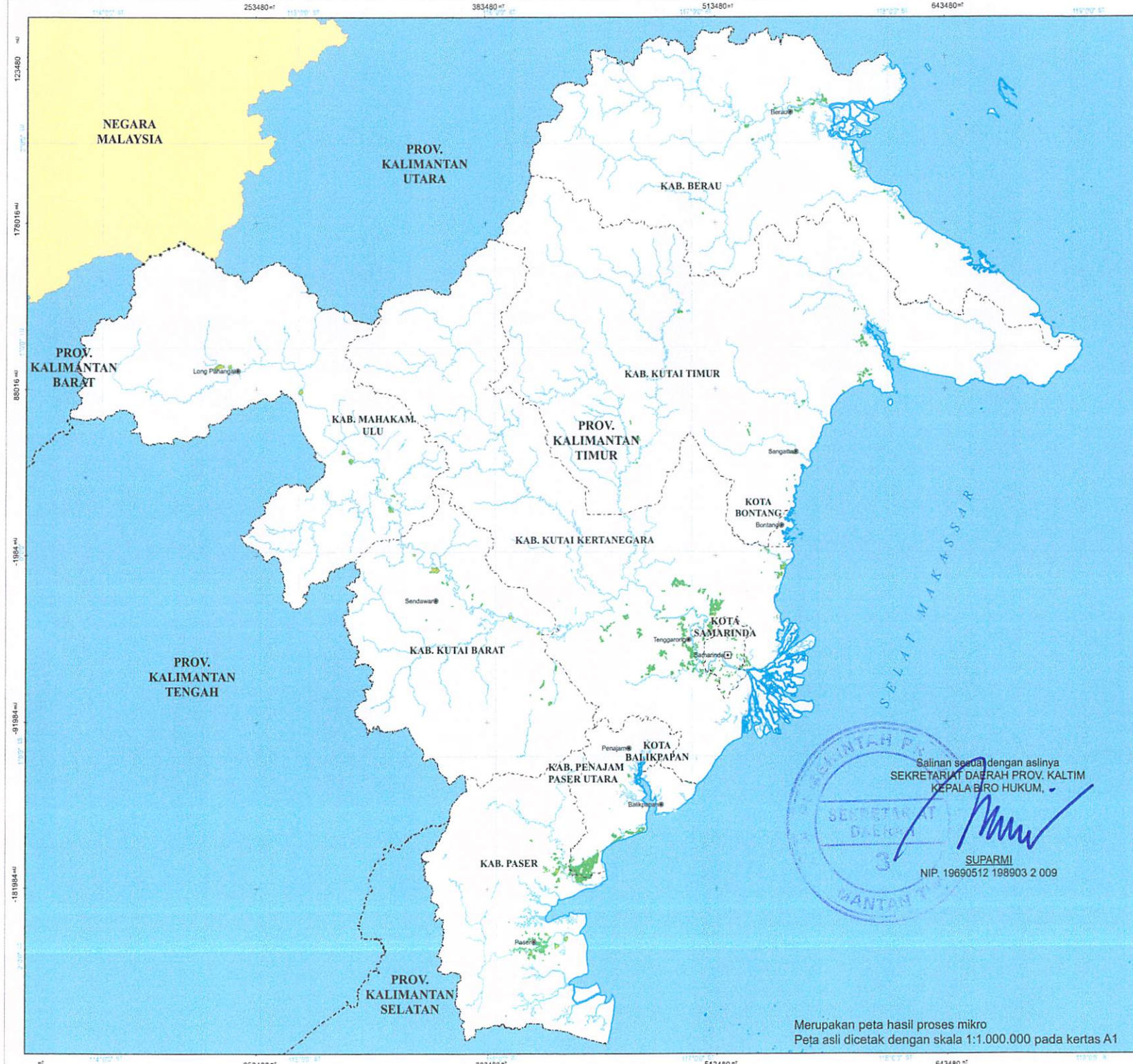
---


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRD HUKUM,

**SUPARMI**  
NIP. 19690512 198903 2 009

---

Merupakan peta hasil proses mikro  
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1





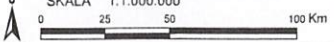
**PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

---

**LAMPIRAN XVI  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042  
PETA KETENTUAN KHUSUS  
RENCANA POLA RUANG KAWASAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

---

U SKALA 1:1.000.000




---

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

---

**DIAGRAM LOKASI**



---

**KETERANGAN :**

<ul style="list-style-type: none"> <li> Ibu Kota Pemerintahan</li> <li> Ibu Kota Provinsi</li> <li> Ibu Kota Kabupaten/Kota</li> </ul>	<p><b>Batas Administrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Batas Negara</li> <li> Batas Provinsi</li> <li> Batas Kabupaten/Kota</li> </ul>	<p><b>Pelairan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Garis Pantai</li> <li> Garis Pantai Rencana</li> </ul>
--	--	---

---

**RENCANA POLA RUANG**

Kawasan Pertanian

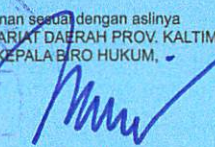
---

**KETENTUAN KHUSUS**

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
 KEPALA BIRO HUKUM,



**SUPARMI**  
NIP. 19690512 198903 2 009

---

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
 1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BHJ tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
 2. SK No.6628/MENLHK-PP/KLH/PLA/2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur  
 3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

---

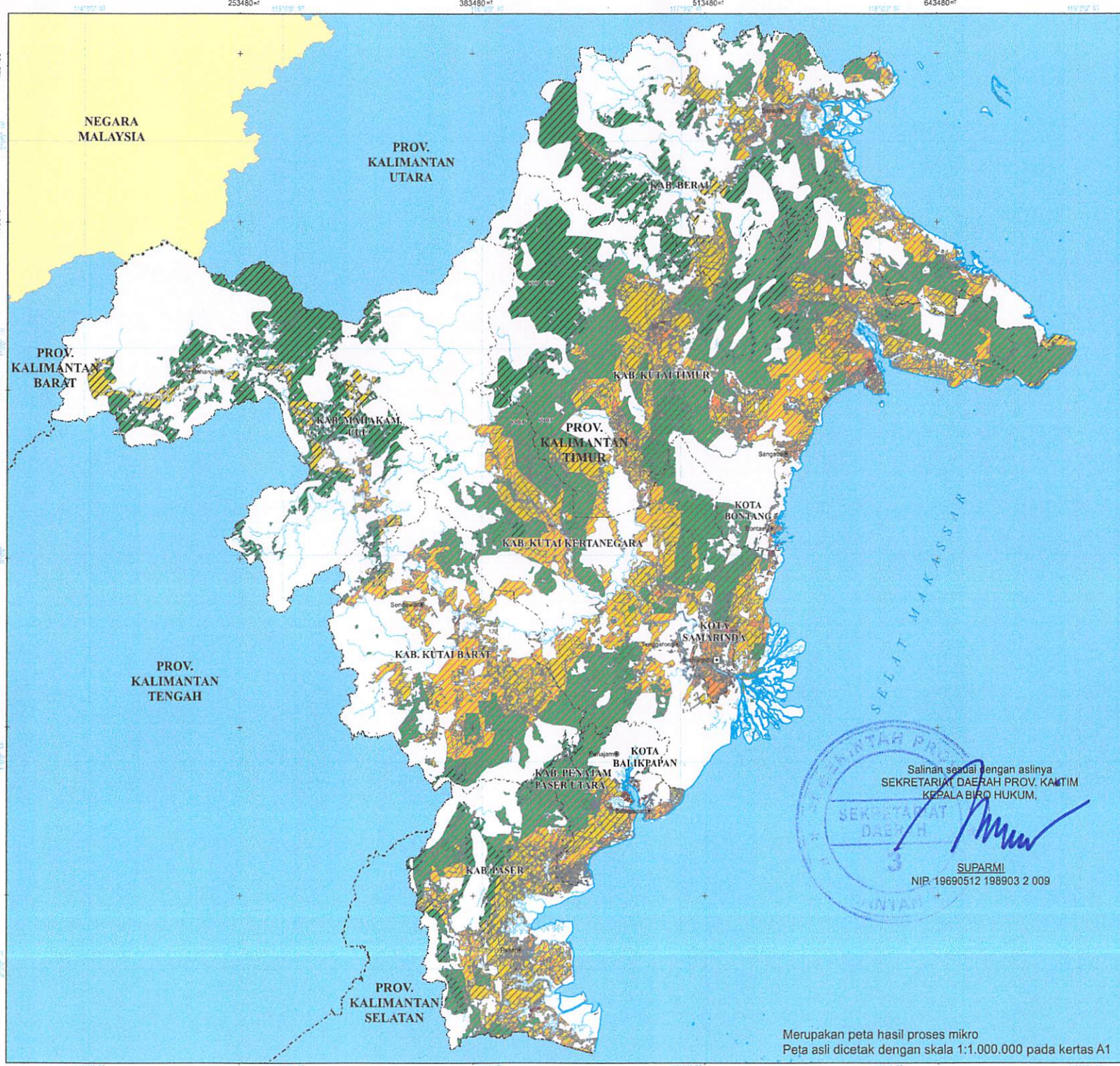
Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

**ISRAN NOOR**

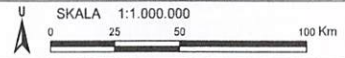
---

Merupakan peta hasil proses mikro  
 Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



**LAMPIRAN XVII**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042**

**PETA KETENTUAN KHUSUS**  
**RENCANA POLA RUANG KAWASAN**  
**RAWAN BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**  
 ■ Ibu Kota Provinsi  
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota  
 - - - Batas Negara  
 - - - Batas Provinsi  
 - - - Batas Kabupaten/Kota  
 ~~~~~ Garis Pantai  
 ~~~~~ Garis Pantai Rencana

**RENCANA POLA RUANG**

| Kawasan Budi Daya  | Kawasan Pertanian   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>PH: Kawasan Hutan Produktif</li> <li>PHPP: Kawasan Hutan Produktif/Kawasan Pertanian</li> <li>PHPK: Kawasan Hutan Produktif/Kawasan Permukiman</li> <li>PHPPK: Kawasan Hutan Produktif/Kawasan Perikanan</li> <li>PHPPK: Kawasan Hutan Produktif/Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya</li> <li>PHPKK: Kawasan Hutan Produktif/Kawasan Konservasi</li> <li>KR: Kawasan Perkebunan Rakyat</li> <li>PK: Kawasan Perikanan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>P: Kawasan Pertanian</li> <li>PPK: Kawasan Pertanian/Kawasan Hutan Produktif</li> <li>PKK: Kawasan Pertanian/Kawasan Konservasi</li> <li>PKM: Kawasan Permukiman</li> <li>PKI: Kawasan Perikanan Industri</li> <li>PKL: Kawasan Perikanan</li> <li>PKT: Kawasan Transportasi</li> <li>PKTE: Kawasan Pertambangan dan Energi</li> </ul> |

**KETENTUAN KHUSUS**

| Kawasan Rawan Bencana   | Rawan Bencana Kebakaran Hutan  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>RB1: Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi</li> <li>RB2: Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang</li> <li>RB3: Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi</li> <li>RB4: Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi</li> <li>RB5: Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi</li> <li>RB6: Rawan Bencana Kebakaran Hutan Tingkat Tinggi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>RB7: Rawan Bencana Kebakaran Hutan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi</li> <li>RB8: Rawan Bencana Kebakaran Hutan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang</li> <li>RB9: Rawan Bencana Kebakaran Hutan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi</li> <li>RB10: Rawan Bencana Kebakaran Hutan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi</li> <li>RB11: Rawan Bencana Kebakaran Hutan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang</li> <li>RB12: Rawan Bencana Kebakaran Hutan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi</li> <li>RB13: Rawan Bencana Kebakaran Hutan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi</li> </ul> |

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALIMANTAN TIMUR**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**  
  
**SUPARMI**  
 NIP. 19690512 198903 2 009

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
 2. SK No. 62/2018/MENLHK-PT/KL/PH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur  
 3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

Merupakan peta hasil proses mikro  
 Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1

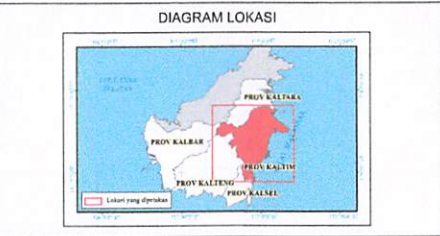


**LAMPIRAN XVIII**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042**

**PETA KETENTUAN KHUSUS**  
**RENCANA POLA RUANG KAWASAN**  
**CAGAR BUDAYA**

**U** SKALA 1:1.000.000  
 0 25 50 100 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN :**  
 ■ Ibu Kota Pemerintahan  
 ● Ibu Kota Provinsi  
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota  
 - - - Batas Negara  
 - - - Batas Provinsi  
 - - - Batas Kabupaten/Kota  
 ~~~~~ Perairan  
 ~~~~~ Garis Pantai  
 ~~~~~ Garis Pantai Rencana

**RENCANA POLA RUANG**  
 LGE Kawasan Lindung Geologi  
 PM Kawasan Permukiman

**KETENTUAN KHUSUS**  
**Kawasan Cagar Budaya**  
 Istana Pasir Balengkong dan Masjid Balengkong  
 Istana Kutai Tenggara  
 Istana Gunung Tabur  
 Keraton Simbalang  
 Situs Kutai Purba

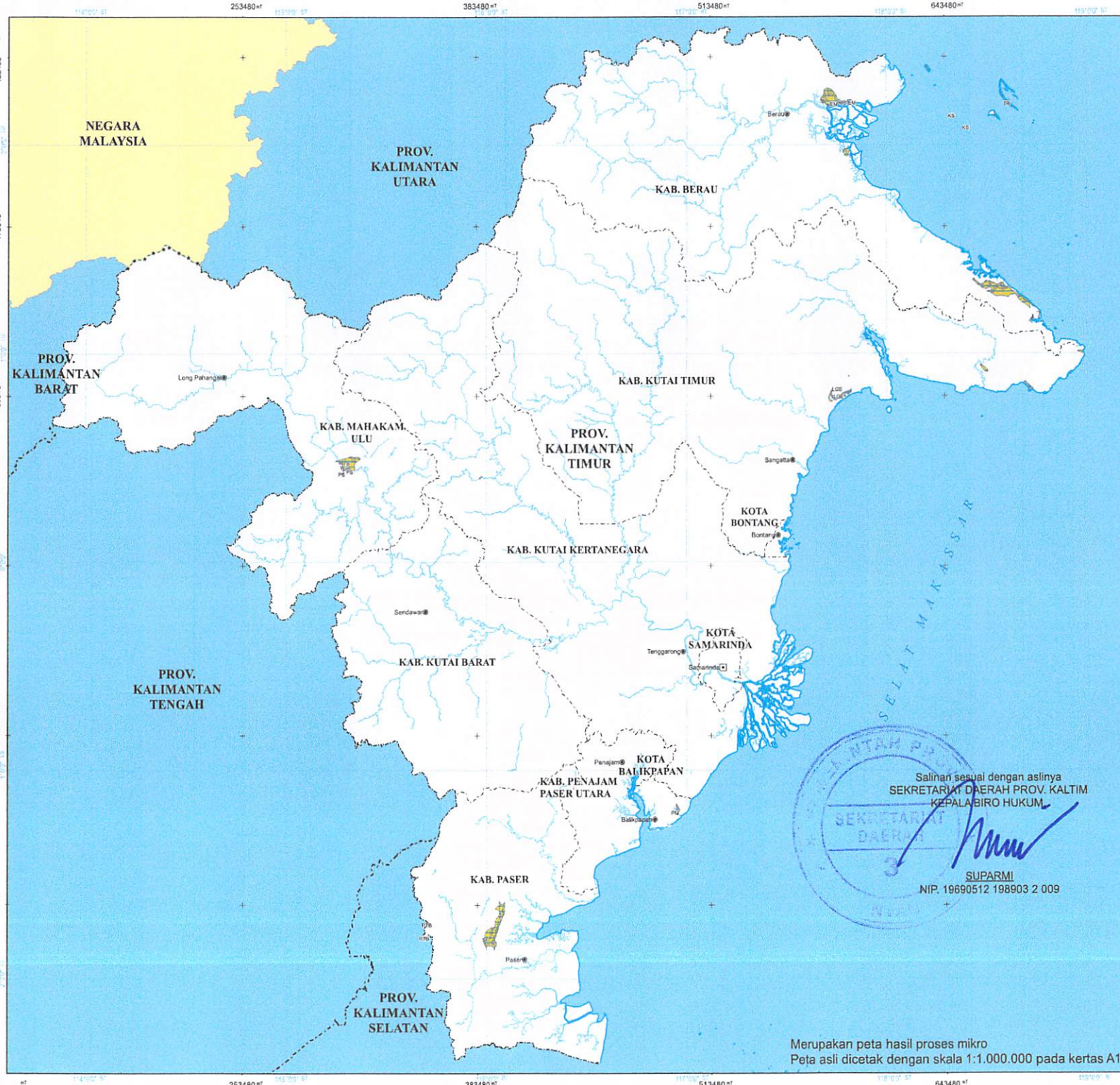
Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA B/RO HUKUM,  
  
**SUPARMI**  
 NIP. 19690512 198903 2 009

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Peta RBI skala 1 : 250.000 B10 tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
 2. SK No.6626/MENLHK-PTL/KUHPLA/2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur  
 3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,  
  
 ttd  
**ISRAN NOOR**

Merupakan peta hasil proses mikro  
 Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1





**PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

---

**LAMPIRAN XIX  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042**

---

**PETA KETENTUAN KHUSUS  
RENCANA POLA RUANG KAWASAN  
RESAPAN AIR**

---

U  
SKALA 1:1.000.000  
0 25 50 100 Km

---

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

---

**DIAGRAM LOKASI**



---

**KETERANGAN :**

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan   | Batas Administrasi   | Peraliran            |
| Ibu Kota Provinsi       | Batas Negara         | Garis Pantai         |
| Ibu Kota Kabupaten/Kota | Batas Provinsi       | Garis Pantai Rencana |
|                         | Batas Kabupaten/Kota |                      |

---

**RENCANA POLA RUANG**

**Kawasan Lindung**

|  |                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------|
|  | Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya |
|  | Kawasan Konservasi                                               |
|  | LGE Kawasan Lindung Geologi                                      |
|  | EM Kawasan Ekosistem Mangrove                                    |
|  | PSL Kawasan Perlindungan Setempat                                |

**Kawasan Budi Daya**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | P Kawasan Pertanian           |
|  | PI Kawasan Penunjang Industri |
|  | W Kawasan Perikanan           |
|  | PM Kawasan Permukiman         |
|  | TR Kawasan Transportasi       |

**KETENTUAN KHUSUS**

**Kawasan Resapan Air**

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | Kawasan Resapan Air |
|--|---------------------|

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM



**SUPARMI**  
NIP. 19690512 198903 2 009

---

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit: SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
2. SK No.6628/MENLHK/PK/TKL/HPLA/21/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

---

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

---

Merupakan peta hasil proses mikro  
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1





**PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

---

**LAMPIRAN XX  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042  
PETA KETENTUAN KHUSUS  
RENCANA POLA RUANG KAWASAN  
SEMPADAN**

---

U  
SKALA 1:1.000.000  
0 25 50 100 Km

---

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

---

DIAGRAM LOKASI



---

**KETERANGAN :**

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan   | Batas Administrasi   | Peraliran            |
| Ibu Kota Provinsi       | Batas Negara         | Garis Pantai         |
| Ibu Kota Kabupaten/Kota | Batas Provinsi       | Garis Pantai Rencana |
|                         | Batas Kabupaten/Kota |                      |

---

**RENCANA POLA RUANG**

**Kawasan Lindung**

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kawasan Konservasi                    | Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya |
| Kawasan Konservasi Kawasan Permukiman | Kawasan Lindung Geologi                                          |
| Kawasan Konservasi Kawasan Pertanian  | Kawasan Ekosistem Mangrove                                       |
| Kawasan Konservasi Kawasan Perikanan  | Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut                           |

**Kawasan Budi Daya**

|                                                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kawasan Hutan Produksi                                                                  | Kawasan Pertambangan dan Energi |
| Kawasan Hutan Produksi Kawasan Pertanian                                                | Kawasan Peruntukan Industri     |
| Kawasan Hutan Produksi Kawasan Permukiman                                               | Kawasan Pariwisata              |
| Kawasan Hutan Produksi Kawasan Perikanan                                                | Kawasan Permukiman              |
| Kawasan Hutan Produksi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya | Kawasan Transportasi            |
| Kawasan Pertanian                                                                       | Kawasan Perikanan dan Keamanan  |
| Kawasan Perikanan                                                                       |                                 |

---

**KETENTUAN KHUSUS**

**Kawasan Sempadan**

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Sempadan Pantai                         |
| Sempadan Sungai                         |
| Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk |
| Sempadan Pipa/Kabel                     |

---

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

- Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
- SK No 8628/MENLHK-PP/TLK/PLA/2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
- Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

**SUPARMI**  
NIP. 19690512 198903 2 009

---

Merupakan peta hasil proses mikro  
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1

---

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

**ISRAN NOOR**



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

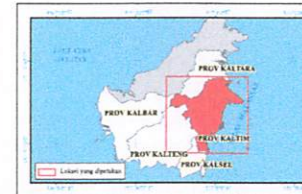
LAMPIRAN XXI  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS  
RENCANA POLA RUANG KAWASAN  
PERTAHANAN DAN KEAMANAN

U SKALA 1:1.000.000  
0 25 50 100 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- ~ Perairan
- Garis Pantai
- ~ Garis Pantai Rencana

RENCANA POLA RUANG

- Kawasan Lindung**
- BA Badan Air
  - PTB Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Budi Daya**
- PM Kawasan Perumahan
  - P Kawasan Pertanian
  - PI Kawasan Peruntukan Industri
  - TC Kawasan Transportasi
  - EC Kawasan Perikanan

KETENTUAN KHUSUS

- /// Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Peta RBI skala 1 : 250 000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019
  - SK No 6626/MENLHK-PKTL/KUHPLA 21/02/2021 Tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
  - Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

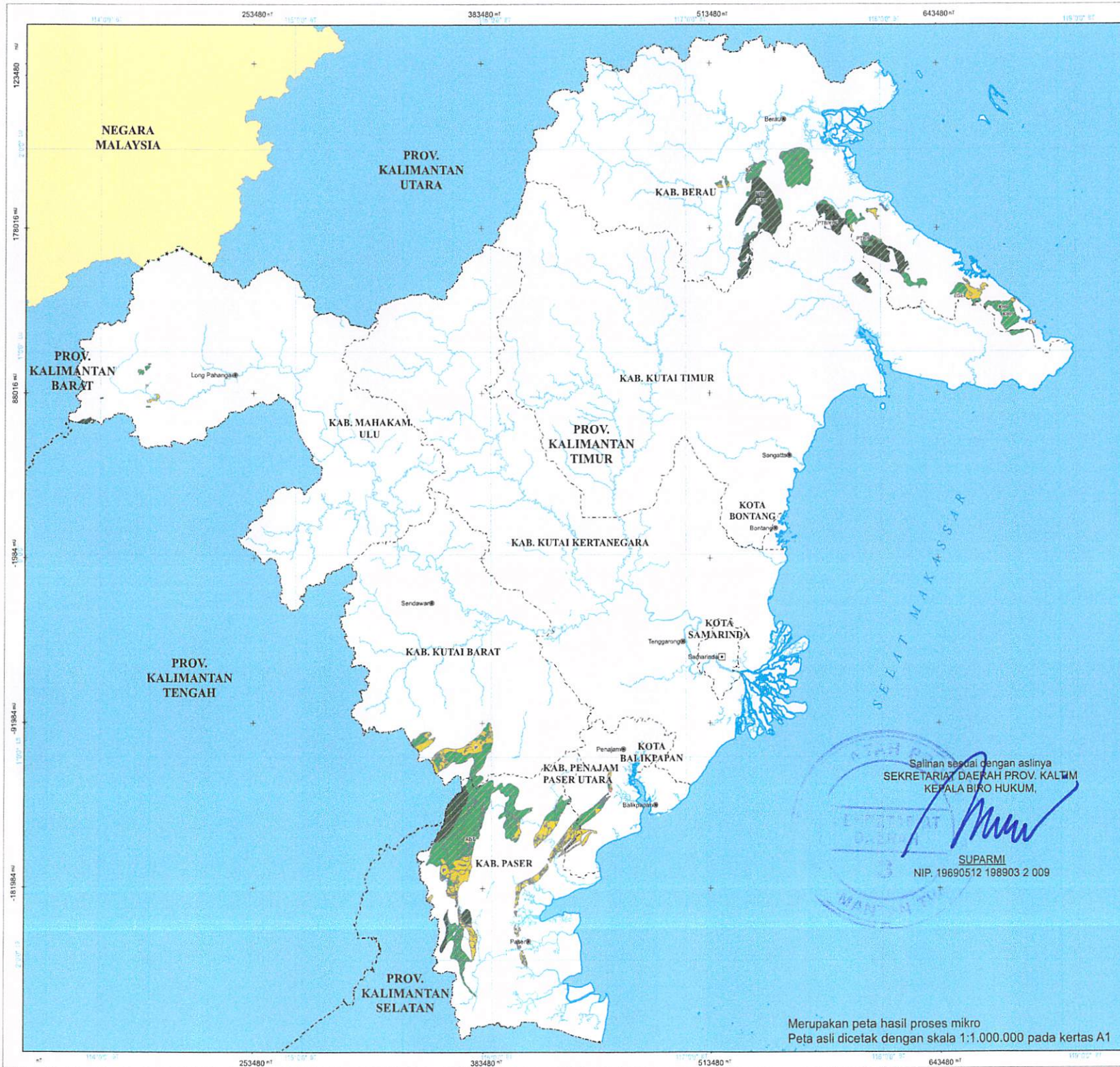
Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

Merupakan peta hasil proses mikro  
Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1

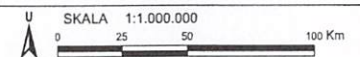




**PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

**LAMPIRAN XXII  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042**

**PETA KETENTUAN KHUSUS  
RENCANA POLA RUANG KAWASAN KARST**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**  
 ■ Ibu Kota Pemerintahan  
 □ Ibu Kota Provinsi  
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota  
 - - - Batas Administrasi  
 - - - Batas Negara  
 - - - Batas Provinsi  
 - - - Batas Kabupaten/Kota  
 ~~~~~ Perairan  
 ~~~~~ Garis Pantai  
 ~~~~~ Garis Pantai Rencana

**RENCANA POLA RUANG**

**Kawasan Lindung :**  
 BA Badan Air  
 PWB Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya  
 PWBK Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Hutan Produksi  
 PWBPK Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian

**Kawasan Budi Daya :**  
 KHP Kawasan Hutan Produksi  
 KHPK Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman  
 KHPKP Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian  
 P Kawasan Pertanian  
 PPKP Kawasan Pertanian/Kawasan Hutan Produksi

**Kawasan Konservasi :**  
 KSK Kawasan Konservasi  
 KHA Kawasan Hutan Adat  
 LGS Kawasan Lindung Geologi  
 EM Kawasan Ekosistem Mangrove

**Kawasan Perikanan :**  
 KP Kawasan Perikanan  
 KPW Kawasan Perikanan  
 PM Kawasan Permukiman  
 PPT Kawasan Pertambangan dan Energi

**KETENTUAN KHUSUS**  
 Kawasan Karst

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
 KEPALA BIRO HUKUM,  
  
**SUPARMI**  
 NIP. 19690512 198903 2 009

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Peta RBI skala 1 : 250 000 B1Q tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
 2. SK No 6628/MENLHK-PT/KU/PLA.2/10/2021 Tentang Perkenbangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur  
 3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250 000 Perda Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

**Catatan:**  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

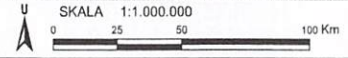
Gubernur Kalimantan Timur,  
 ttd  
**ISRAN NOOR**

Merupakan peta hasil proses mikro  
 Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



**LAMPIRAN XXIII  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042**

**PETA KETENTUAN KHUSUS  
RENCANA POLA RUANG KAWASAN  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008


**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**  
 Ibukota Pemerintahan : □ Ibu Kota Provinsi, ● Ibu Kota Kabupaten/Kota  
 Batas Administrasi : \* - \* Batas Negara, --- Batas Provinsi, - - - Batas Kabupaten/Kota  
 Peraliran : ~ Garis Pantai, ~ Garis Pantai Rencana

**RENCANA POLA RUANG**

| Kawasan Lindung |  | Kawasan Budi Daya |   |
|-----------------|--|-------------------|---|
| BA              | Badan Air  | HP                | Kawasan Hutan Produksi                                      |
| PS              | Kawasan Perlindungan Setempat                                    | HP/PP             | Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian                    |
| KS              | Kawasan Konservasi   | HP/PM             | Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman                   |
| PK              | Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya | HP/PS             | Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Konservasi                   |
| NS              | Kawasan Hutan Adat   | HP/PT             | Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian/Kawasan Konservasi |
| LG              | Kawasan Lindung Geologi  | PK/PS             | Kawasan Pertanian/Kawasan Konservasi                        |
| PKNS            | Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut                           | PK                | Kawasan Perikanan   |
| NS              |  | W                 | Kawasan Pariwisata  |
|                 |  | TR                | Kawasan Transportasi  |
|                 |  | KR                | Kawasan Perkebunan Rakyat                                   |

**KETENTUAN KHUSUS**  
 Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**  
  
**SUPARMI**  
 NIP. 19690512 198903 2 009

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2019 dan 2019  
 2. SK No 4628/MENLHK-PT/KU/HLPLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur  
 3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Peta Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

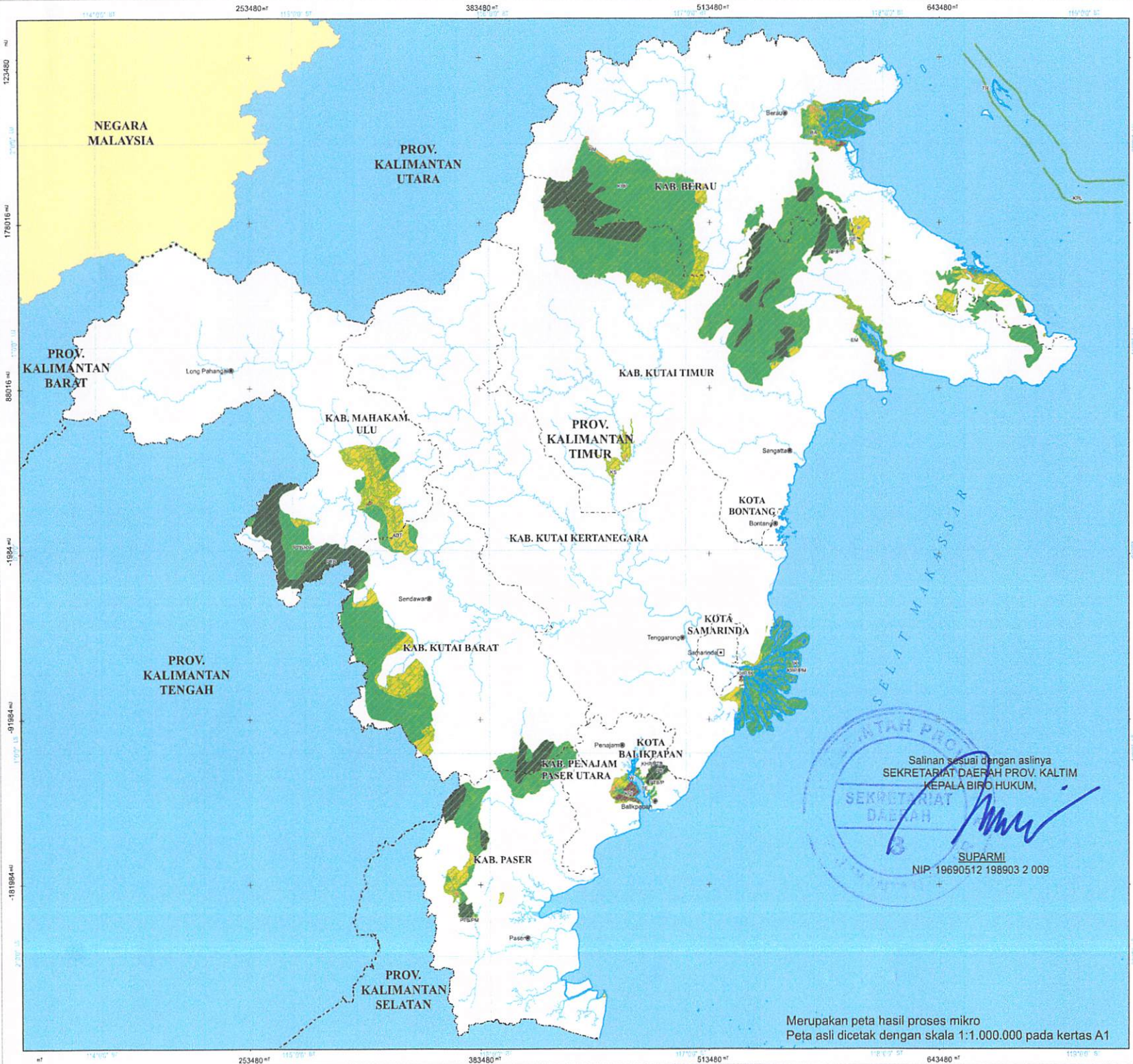
Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Gubernur Kalimantan Timur,

ttd

ISRAN NOOR

Merupakan peta hasil proses mikro  
 Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1



**PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

**LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 - 2042  
PETA KETENTUAN KHUSUS  
RENCANA POLA RUANG KAWASAN  
MIGRASI SATWA**

**DIAGRAM LOKASI**

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**RENCANA POLA RUANG**

- KETERANGAN :**
- |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi   | Batas Negara         | Batas Provinsi       | Garis Pantai         |
| Ibu Kota Provinsi    | Batas Kabupaten/Kota | Batas Kabupaten/Kota | Batas Kabupaten/Kota | Garis Pantai Rencana |
- 
- |   |  |
|---|--|
| Badan Air   | Kawasan Perlindungan Setempat          |
| Kawasan Konservasi  | Kawasan Ekosistem Mangrove             |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya                        | Kawasan Hutan Adat                     |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya                        | Kawasan Lindung Geologi                |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya                        | Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut |
| Kawasan Budi Daya   | Kawasan Permukiman                     |
| Kawasan Hutan Produksi  | Kawasan Perikanan                      |
| Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman   | Kawasan Pariwisata                     |
| Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian  | Kawasan Pertambangan dan Energi        |
| Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perikanan  | Kawasan Transportasi                   |
| Kawasan Hutan Produksi/Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya | Kawasan Peruntukan Industri            |
| Kawasan Pertanian   |  |

**KETENTUAN KHUSUS**  
 Kawasan Migrasi Satwa

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017 yang diperbaharui dengan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan 2019  
 2. SK No.6629/MENLHK/PTL/KUP/PLA/2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur  
 3. Peta RZWP3K Tahun 2021-2041 Skala 1 : 250.000 Perca Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**  
  
**SUPARMI**  
 NIP. 19690512 196903 2 009

Merupakan peta hasil proses mikro  
 Peta asli dicetak dengan skala 1:1.000.000 pada kertas A1

Guburner Kalimantan Timur,  
  
 ttd  
  
**ISRAN NOOR**